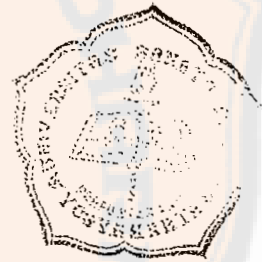


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**GERAKAN MERAPI MERBABU COMPLEX (MMC)  
DI JAWA TENGAH  
TAHUN 1950 - 1955**

**SKRIPSI**



Oleh

*Ricardus Yustinus Hari Susanto Hardjoloekito*

NIM : 87 214 081

NIRM : 87 5027200105

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1993**

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**GERAKAN MERAPI MERBABU COMPLEX (MMC)  
DI JAWA TENGAH  
TAHUN 1950 - 1955**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**

Oleh

*Ricardus Yustinus Hari Susanto Hardjoloekito*

**NIM : 87 214 081**

**NIRM : 87 5027200105**

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**1993**

**S K R I P S I**  
**GERAKAN MERAPI MERBABU COMPLEX ( MMC )**  
**DI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 1950 - 1955**

Oleh

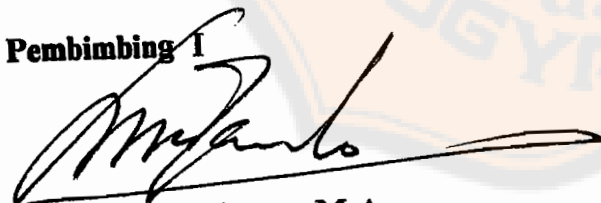
*Ricardus Yustinus Hari Susanto Hardjoloekito*

N I M : 87 214 081

N I R M : 87 5027200105

Telah disetujui oleh :

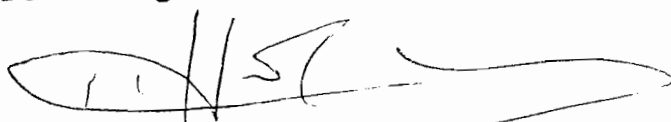
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal :

Pembimbing II



Drs. P.J. Suwarno, S.H.

tanggal :

S K R I P S I  
GERAKAN MERAPI MERBABU COMPLEX (MMC)  
DI JAWA TENGAH  
TAHUN 1950 - 1955

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

*Ricardus Yustinus Hari Susanto Hardjoloekito*

NIM : 87 214 081






NIRM : 87 5027200105

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI :

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. G. Moedjanto, M.A.	
Sekretaris	Drs. J. Markiswo	
Anggota	Drs. G. Moedjanto, M.A	
Anggota	Drs. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota	Drs. S. Adi Susilo, JR	

Yogyakarta,


1993

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

KIP Sanata Dharma

Dekan



  
Drs. G. Moedjanto, M.A.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Anda Tak Pernah Tahu Apa Yang Bisa*

*Anda Kerjakan Sampai Anda Mencobanya*



Kupersembahkan karya ini  
untuk Ayah - Bunda, Kakak  
dan seorang adik.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami hujukan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas limpahan karunia-Nya yang sangat besar, maka penulis dapat menyelesaikan tugasnya menyusun skripsi ini.

Skripsi ini berjudul : *Gerakan Merapi Merbabu Complek (MMC) di Jawa Tengah Tahun 1950 - 1955* . Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis memyadari, bahwa skripsi ini tidak akan selesai apabila tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat u.b. Asisten Pengamanan, yang telah memberikan ijin penulisan masalah ini.
2. Bapak Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro u.b. Asisten Intelejen KODAM IV Diponegoro, yang telah membantu memberikan ijin untuk mengadakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., Dekan FPIPS dan sekaligus pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.

4. Bapak Drs. P.J. Soewarno, SH., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Pembinaan Mental Angkatan Darat KODAM IV Diponegoro beserta segenap staf, yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan membantu pengadaan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Kepala Monumen Pers Nasional beserta segenap staf, yang telah banyak membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Soebadi Hardjoloekito, Bapak A.P. Soeripto, Bapak J. Sarwono, Bapak Hardjodiono, Bapak Soedarmo dan Bapak Sardiman, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi berguna untuk mendukung penyusunan skripsi ini.

8. Segenap keluarga, yang telah memberikan dorongan dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Dra. M.Fr. Cicilia Sulistyorini, yang telah banyak membantu memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini, serta pihak-pihak yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, yang dengan ikhlas telah membantu penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan kritik ataupun saran yang berguna untuk lebih menyempurnakan penyusunan karya ini agar lebih lengkap dan lebih sempurna.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan lebih berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya

Yogyakarta, November 1992

*Penulis*



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## D A F T A R I S I

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Absrak .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Batasan Waktu dan Ruang Lingkup .....	6
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Landasan Teori .....	10
G. Tinjauan Pustaka .....	18
H. Metode Penelitian dan Penulisan .....	19
<b>BAB II : LATAR BELAKANG GERAKAN MMC</b> .....	<b>23</b>
A. Keadaan Sosial Ekonomi .....	23
B. Keadaan Politik Indonesia Tahun 1945 - 1949.....	34
C. Keadaan Organisasi Militer Masa Rasionalisasi dan Rekontruksi.....	40
D. Infiltrasi eks. Pelaku Pemberontakan PKI Madiun .....	47

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>BAB III</b>	<b>: JALANNYA GERAKAN MMC MASA KELOMPOK JAGO</b>	<b>52</b>
	A. Diskripsi Wilayah Gerakan MMC .....	52
	B. Gerakan MMC masa Kelompok Jago .....	56
	1. Kepemimpinan .....	56
	2. Organisasi dan Daerah Operasi.....	59
	3. Jalannya Gerakan MMC Kelompok Jago .....	63
	4. Akhir Gerakan MMC Kelompok Jago.....	72
<b>BAB IV</b>	<b>: GERAKAN MMC MASA PERSATUAN KORBAN RASIONALISASI</b>	<b>79</b>
	A. Kepemimpinan .....	79
	B. Organisasi dan Daerah Operasi .....	83
	C. Jalannya Gerakan MMC Tahap PKR .....	86
	D. Akhir Gerakan MMC Tahap PKR .....	95
	1. Perpecahan Dalam Tubuh PKR .....	95
	2. Tindakan Pemerintah dan Aparat Keamanan .....	101
	3. Keberanian Rakyat dalam Menghadapi Gerakan MMC .....	109
	E. Akibat Gerakan MMC .....	112
	1. Sosial Ekonomi .....	112
	2. Politik .....	114
<b>BAB V</b>	<b>: K E S I M P U L A N</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>124</b>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## A B S T R A K

Pada tahun 1950 - 1955 di Jawa Tengah muncul suatu bentuk gerakan sosial berlandaskan atas kepentingan politik yang terjadi dalam suatu lokal tertentu, yaitu di daerah sekitar gunung Merapi-Merbabu, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan MMC. Dikatakan gerakan sosial karena gerakan itu muncul sebagai reaksi atas permasalahan sosial. Dikatakan sebagai gerakan politik, karena akhirnya gerakan tersebut digunakan sebagai alat oleh suatu kelompok politik untuk mencapai kepentingannya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa munculnya Gerakan MMC ini berlatar belakang masalah politik dan sosial.

Sejarah telah mencatat, bahwa Gerakan MMC muncul dua kali, yaitu masa Kelompok Jago dan masa Kelompok Korban Rasionalisasi, yang antara satu dengan yang lain dibedakan oleh kurun waktu, kepemimpinan, keanggotaan, wilayah operasi dan pengorganisasiannya. Akan tetapi mereka juga mempunyai persamaan dalam melaksanakan aksi-aksinya, yaitu dengan aksi kekerasan.

Kekacauan dan ancaman terhadap rakyat, mengakibatkan pemerintah dan rakyat mengambil serangkaian tindakan untuk menangkal ancaman dari Gerakan MMC. Tindakan tersebut diutamakan untuk memberantas gangguan keamanan melalui serangkaian operasi militer. Sejalan dengan operasi itu diadakan pula kegiatan yang bertujuan membangkitkan semangat dan keberanian rakyat untuk tidak takut memerangi ancaman dari Gerakan MMC.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian baik penelitian pustaka maupun lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap informan. Penelitian tersebut lebih dikhususkan untuk mencari jawaban mengenai bentuk Gerakan MMC yang sebenarnya mengingat gerakan ini muncul disebabkan karena permasalahan sosial dan politik.

B A B I  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Permasalahan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan puncak dari perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Dengan tercapainya kemerdekaan itu, maka rakyat Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur hidup sendiri.

Ternyata dalam mempertahankan kemerdekaan tidaklah berada di jalan yang lurus dan mulus. Sejarah telah mencatat banyak hambatan yang datang dari dalam dan dari luar dengan berbagai ragam persoalan baik dalam bidang politik ekonomi, sosial maupun idiologi.

Disaat bangsa Indonesia sedang mengkonsolidasikan kekuatannya dalam rangka pemulihan kedaulatan, maka partai-partai politik saling bermunculan dan saling berebut pengaruh kekuasaan.<sup>1</sup> Situasi semakin bertambah keruh dengan munculnya pemberontakan di beberapa daerah. Mengenai munculnya pemberontakan itu, maka A.H.Nasution berpendapat :

*" ... pemberontakan-pemberontakan dari dalam negara kita maupun dalam negara lain, sebenarnya dapat dibawa pada persoalan yang sama, yaitu adanya faktor*

---

<sup>1</sup> Kemunculan banyak partai politik disebabkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Lihat buku 30 Tahun Indonesia Merdeka: 1945-1950 (Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1986), h. 55. Lihat pula karangan Drs. G. Moedjanto, M.A., Indonesia Abad ke-20; (1) (Yogyakarta, Kanisius, 1988), h. 126-129

*ketidakpuasan dalam masyarakat yang sedemikian jauh sehingga orang tidak lagi percaya dapat memperjuangkan dengan jalan biasa, ..... dan kedua adalah adanya ambisi dari dalam masyarakat yaitu adanya ambisi pribadi dan ambisi kelompok politik yang ingin mencapai tujuannya, yaitu mengoper kekuasaan dengan jalan luar yang telah ditetapkan oleh tata negara."<sup>2</sup>*

Ketidakpuasan yang timbul dalam masyarakat muncul sebagai reaksi dari masyarakat yang mengangankan bahwa setelah merdeka, tingkat kehidupan akan menjadi lebih baik dan berkecukupan kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Mereka juga mengharapkan pekerjaan yang memuaskan serta gaya hidup yang penuh arti. Harapan semacam itu cukup wajar bagi negara yang baru saja mengalami revolusi, tetapi sangat sulit untuk dipenuhi.<sup>3</sup>

Persoalan-persoalan yang menambah ketidakpuasan dalam masyarakat pada sekitar tahun 1948 adalah pertama keadaan sosial ekonomi yang buruk yang selalu membawa revolusi kearah kiri. Kedua adalah program Rasionalisasi-Reorganisasi dalam tubuh Angkatan Perang. Ketiga adalah pengaruh perkembangan politik nasional dan internasional.<sup>4</sup>

Bertolak dari keadaan itu, maka munculnya Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC) pada permulaan tahun 1950 dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan yang mengganggu

---

<sup>2</sup> A.H. Nasution, Menuju Tentara Rakyat (Jakarta: Yayasan Penerbit Minang, 1963), h. 136-137

<sup>3</sup> Herbert Feith, "Pada 1950-an, Negara Masih Terlalu Lemah", BERNAS, 17 Februari 1992

<sup>4</sup> Onghokham, Rakyat dan Negara (Jakarta: LP3ES-Sinar Harapan, 1983), h. 147

stabilitas nasional, karena tindakan mereka cenderung menggunakan tindak kekerasan untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan teror dan suasana yang kacau. Mereka itu menurut Le Bohn disebut dengan kelompok orang-orang sentimen, yaitu orang-orang yang hanya mengeluarkan rasa hatinya dengan ditunjukkan pada tindakan yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dilain pihak, Gerakan MMC dapat pula disebut sebagai kelompok yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah yang berkuasa. Tindakan protes ini diambil setelah mereka melihat adanya kebijaksanaan dari pemerintah yang merugikan mereka. Berkaitan dengan hal ini maka Onghokham berpendapat sebagai berikut:

*"... kita terutama ingat pada suatu peristiwa pembentakan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang kadangkala ada kebiasaan dimana masa menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dirasakan ...".<sup>6</sup>*

Dari uraian diatas, kita dapat menarik suatu pendapat, bahwa Gerakan MMC merupakan suatu gerakan gangguan keamanan yang didasari oleh keadaan sosial, yaitu perasaan tidak puas terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun apabila dikaitkan dengan berbagai aspek seperti aspek ideologi dan politis, maka akan nampak Gerakan MMC yang

---

<sup>5</sup> Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 284

<sup>6</sup> Onghokham, Kedudukan Polittik Militer (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 29

sesungguhnya.

Sebagaimana suatu gerakan yang timbul dari dalam masyarakat, Gerakan MMC yang muncul di kawasan gunung Merapi dan gunung Merbabu ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan.

Pada tahun 1948 Kabinet Hatta memberlakukan Program Rasionalisasi dan Reorganisasi dalam tubuh APRI, dengan tujuan lebih menyempurnakan organisasi APRI untuk menjadi tentara yang profesional.<sup>7</sup> Program ini mengakibatkan banyak tentara dari golongan Laskar Rakyat atau TNI Masyarakat yang terkena program ini. Adapun Laskar Rakyat yang ada disekitar lereng gunung Merapi-Merbabu juga terkena program ini. Akibatnya mereka yang terkena program de-mobilisasi merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah, karena semasa perjuangan melawan Belanda mereka merasa mempunyai andil dalam perjuangan.

Kegagalan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 merupakan salah satu rangkaian kejadian yang berpengaruh terhadap kemunculan Gerakan MMC. Pada saat itu Muso dan pengikutnya berusaha merebut kekuasaan, namun berkat kegigihan APRI dan rakyat, maka pemberontakan dapat digagalkan dan banyak orang komunis yang tertangkap

---

<sup>7</sup> Boerhan dan Soebekti, Fakta dan Latar Belakang Gerakan 30 September (Jakarta: Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Kosgoro, 1965), h. 26

ditawan di penjara Wirogunan.<sup>8</sup>

Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, mengakibatkan banyak tahanan politik di Wirogunan yang melarikan diri atau sengaja dilepaskan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan agar membantu dalam mempertahankan negara dari serbuan Belanda. Diantara tahanan yang dilepas itu adalah tahanan Madiun Affair yang pada saat itu membantu melawan Belanda sebagai kekuatan pelopor.<sup>9</sup> Namun ada pula yang lari bersembunyi disekitar lereng gunung Merapi dan Merbabu.<sup>10</sup> Bukanlah suatu gerakan komunis, bila tidak muncul lagi dalam bentuk lain.

Kekecewaan rakyat akibat perang yang menyebabkan mereka kehilangan keluarga, harta, benda dan mata pencaharian menyebabkan mereka tidak mempercayai lagi pemerintah yang mereka anggap tidak mampu menciptakan situasi aman. Terlebih-lebih ada usaha dari pemerintah yang meminta kembali perkebunan (onderneming) Belanda di sekitar lereng gunung Merapi-Merbabu, sebagai akibat perjanjian KMB. Rakyat menganggap bahwa onderneming tersebut sudah menjadi milik rakyat setelah Indonesia merdeka, sehingga sudah banyak tanah yang diolah oleh

---

<sup>8</sup> Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, Rangkaian Pemberontakan Komunis di Indonesia (Jakarta: Yudha Gama Corp, 1983), h. 34

<sup>9</sup> Arnold C. Brackman, Indonesian Communism a History (New York: Frederick A. Praeger Publisher, 1963), h. 119

<sup>10</sup> M.S. Handjojo, Kisah Lahirnya Gerombolan Merapi-Merbabu Complex (Salatiga: t.p., 1977), h. 1



rakyat. Hal itu menyebabkan kekecewaan rakyat disekitar onderneming.<sup>11</sup>

Dengan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi-nya, maka pada awal tahun limapuluhan muncul suatu gerakan di sekitar lereng gunung Merapi dan Merbabu yang terkenal dengan sebutan MMC atau Merapi Merbabu Complex. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengungkap-kan dengan jelas permasalahan-permasalahan yang ber-kaitan dengan kemunculan gerakan ini. juga untuk mengung-kapkan sampai sejauh manakah pengaruh komunisme pada gerakan ini, mengingat daerah-daerah bekas gerakan MMC ini ternyata pada awal tahun enampuluhan menjadi daerah basis PKI yang sangat kuat.

## **B. Batasan Waktu dan Ruang Lingkup**

Untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dari topik penulisan skripsi ini, maka perlulah penulis mem-berikan batasan-batasan terhadap waktu terjadinya dan ruang lingkup wilayah yang akan dibahas.

Gerakan MMC adalah sebutan bagi suatu aksi yang dilakukan oleh gerombolan pengacau keamanan dengan motif-motif tertentu, yang terdapat di daerah gunung Merapi dan Merbabu. Istilah complex mengandung pengertian bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh gerombolan itu hanya

---

<sup>11</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 11 Februari 1992. Baca pula Karl J. Pelzer, Sengkettta Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 51

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7

terjadi pada suatu daerah tertentu, yaitu sekitar daerah gunung Merapi dan Merbabu

Pembatasan waktu kejadian Gerakan MMC dimulai dengan tahun 1950. Pada tahun tersebut merupakan tahun pasca perang kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda, sehingga tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negara masih belum mapan, terlebih setelah masa itu pemberotakan PKI dan Clash atau Agresi Belanda II baru saja berakhir.

Tahun 1950 Gerakan MMC tahap Kelompok Jago muncul untuk pertama kali di daerah perbatasan Kabupaten Boyolali dan Klaten dengan ditandai aksi teror dan munculnya tokoh Suradi Bledog yang mengorganisir kelompok grayak.

Tahun 1951 Gerakan MMC tahap awal berakhir. Hal ini ditandai dengan ditangkapnya dan terbunuhnya beberapa tokoh penting dan juga para anggota Gerakan MMC. Namun pada pertengahan tahun itu juga muncul Gerakan MMC yang dapat disebut Gerakan MMC tahap kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi, karena pada tahap ini anggota Gerakan MMC merupakan eks tentara korban program Rasionalisasi-Reorganisasi dengan dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Umar Yunani.

Pertengahan tahun 1955 Gerakan MMC mengalami kemunduran hal ini disebabkan adanya tindakan pembersihan dari Pemerintah melalui Operasi Militer, sehingga banyak anggota MMC yang menyerah, tertangkap atau tewas. Demikian juga dengan tokoh-tokohnya seperti Umar Yunani yang tewas pada bulan Juni 1955.

Pembatasan ruang lingkup dari pembahasan dalam skripsi ini adalah daerah-daerah yang berada disekitar gunung Merapi dan Merbabu dengan dipersempit khusus di Propinsi Jawa Tengah yang meliputi Karesidenan Surakarta, Semarang dan Kedu. Sedangkan wilayah lain diluar wilayah Complek Merapi dan Merbabu atau wilayah diluar wilayah Jawa Tengah walaupun masuk wilayah Complek Merapi dan Merbabu, seperti Kabupaten Sleman yang masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menjadi obyek pembahasan.

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka pembahasan berikut ini akan menjawab atas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini.

Pertanyaan pertama yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah apakah yang menyebabkan atau melatarbelakangi munculnya Gerakan MMC di Jawa Tengah pada awal tahun limapuluhan.

Pertanyaan kedua adalah bagaimanakah jalannya gerakan yang dilakukan oleh Gerakan MMC periode Kelompok Jago yang meliputi kepemimpinannya, wilayah operasinya, jalannya gerakan dan akhir dari gerakan tersebut.

Pertanyaan terakhir yang hendak dibahas adalah bagaimana jalannya Gerakan MMC periode Kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR), yang meliputi kepemimpinannya, daerah operasi, jalannya gerakan dan berakhirnya

gerakan tersebut, serta apa akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan tersebut.

## **D. Tujuan Penelitian**

Secara fungsional, tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini adalah untuk mengetahui latar belakang, jalannya gerakan dan faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya Gerakan MMC, sehingga penelitian yang telah dilakukan diharapkan akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dengan topik Gerakan MMC di Jawa Tengah pada tahun 1950-1955, akan tidak bermakna apabila tidak mempunyai manfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah bagi IKIP Sanata Dharma, khususnya Jurusan Pendidikan Sejarah tentang munculnya suatu gerakan ilegal komunis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
2. Mengangkat sejarah munculnya Gerakan MMC untuk lebih dikenal oleh generasi muda khususnya, mengingat masih banyak yang belum mengetahui tentang MMC.
3. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah lokal suatu daerah, khususnya sejarah lokal Jawa Tengah dimana Gerakan MMC merupakan salah

satu bagian dari sejarah lokal Jawa Tengah.

4. Bagi penulis sendiri, penelitian yang dilakukan penting untuk :

- a. Memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Sanata Dharma.
- b. Mengetahui tentang munculnya suatu gerakan massa yang terdapat di daerahnya dengan secara mendalam.
- c. Melaksanakan salah satu Dharma yang terdapat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma penelitian.

## F. Landasan Teori

Gerakan MMC hanya terjadi di daerah Jawa Tengah yaitu di daerah sekitar gunung Merapi dan gunung Merbabu sehingga sejarah Gerakan MMC tersebut oleh Taufik abdul-lah dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal, karena merupakan suatu kejadian di kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang merata pada daerah "geografis" yang terbatas.<sup>12</sup>

Gerakan MMC sebagai salah satu bentuk gerakan massa yang terjadi di Jawa Tengah akan sulit dipahami apabila hanya dilihat dari satu sudut pandang atau satu disiplin ilmu saja. Untuk itu pemahaman dengan menggunakan pendekatan multi-demensional adalah sangat tepat.

Pendekatan untuk mengungkapkan Gerakan MMC sebagai suatu gerakan ketidakpuasan adalah dengan menggunakan

---

<sup>12</sup> Taufik Abdulah, Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979), h. 11-12

konsep dan analisa sosiologi. Dengan menggunakan konsep dan analisa ini akan membantu mengungkapkan proses-proses sosial, seperti hubungan kausal antara gerakan sosial dengan perubahan sosial yang biasanya diikuti dengan konflik dan keresahan sosial.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan terjadinya suatu konflik dalam masyarakat, maka Crosser berpendapat bahwa konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang terjadi sebagai akibat adanya obyek yang dianggap mengecewakan. Sedangkan konflik non-realistik adalah suatu konflik yang terjadi bukan sebagai tujuan persaingan yang antagonis, tetapi dibutuhkan untuk meredakan ketegangan sehingga konflik ini menunjukkan hasil yang positif, memantapkan keutuhan dan keseimbangan kelompok.<sup>14</sup>

Konflik atau persaingan ataupun perebutan juga dapat terjadi sebagai akibat adanya usaha untuk mencari suatu hal yang baik dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Suyono Soekanto berpendapat, bahwa kadangkala di dalam masyarakat terdapat hal-hal yang dianggap baik seperti kekayaan, kedudukan dan kekuasaan, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat banyak dalam masyarakat. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berusaha mendapatkannya dengan berbagai usaha. Sehingga dengan adanya persaingan

---

<sup>13</sup> Phil Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Jakarta: Bina Cipta, 1983), h. 103

<sup>14</sup> Margaret M. Paloma, Sosiologi Kotemporer (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 112-115

untuk mendapatkannya terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>15</sup>

Adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang lebih kuat darinya, maka adanya sosok pahlawan yang ikut membantu menolong pihak lemah melawan pihak yang kuat, akan sangat membantu menumbuhkan semangat dari pihak yang lemah dalam melawan pihak yang kuat. Sosok pahlawan tersebut oleh E.J.Hobsbawn dinamakan sebagai Bandit Sosial, yang memperjuangkan kepentingan dengan cara-cara merampok pihak yang kuat untuk pihak yang lemah. Akibatnya pihak yang lemah akan selalu melindungi bandit sosial.<sup>16</sup> Teknik tersebut digunakan oleh Gerakan MMC dalam perjuangannya, sehingga gerombolan ini mendapatkan dukungan dari rakyat.

Munculnya Gerakan MMC sebagai suatu gerakan yang menggunakan kedok sebagai gerakan sosial, menurut pendapat Koentjaraningrat disebabkan karena sikap mental dari manusia itu sendiri. Lebih lanjut Koentjaraningrat berpendapat, bahwa semua revolusi yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan fisik dan mental.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Suyono Soekanto, Teori Sosiologi Dalam Pribadi Masyarakat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 7

<sup>16</sup> Sartono Kartodirdjo, Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 74. Kita perlu ingat tentang cerita Robin Hood

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), h. 43

Revolusi menyebabkan terjadinya perubahan secara drastis kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga dalam jaman post-revolusi tumbuh juga beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas bangsa Indonesia. Salah satu sifat itu menurut Koentjaraningrat adalah sifat mentalitas yang suka menerabas.<sup>18</sup>

Sikap mental yang suka menerabas atau dapat disamakan dengan mentalitas mencari jalan yang paling gampang, menyebabkan orang memandang penyelesaian suatu masalah secara sempit. Orang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa menggunakan cara yang beradab.

Selain menggunakan pendekatan sosiologi, maka untuk memperjelas pengungkapan Gerakan MMC digunakan pula pendekatan secara ilmu politik. Secara umum pengertian politik dapat dirumuskan sebagai suatu usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau idiologi.<sup>19</sup> Soelistyati Gani Ismail juga menyebutkan bahwa politik tidak lepas dari suatu pertentangan politik, kajahatan politik dan sebagainya.

Politik adalah yang ada hubungannya dengan kekuasaan, demikian pendapat Morgenthau. Suatu hubungan kekuasaan terjadi bilamana seseorang atau sekelompok golongan tunduk kepada orang atau golongan lain dalam suatu bentuk

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 45

<sup>19</sup> Dra. Soelistyati Gani Ismail. Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 12



kegiatan tertentu.<sup>20</sup>

Politik memuat bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain didalam politik memuat tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. <sup>21</sup>

Berkaitan dengan pertentangan politik, maka situasi politik di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ditandai dengan pertentangan dan perebutan kekuasaan antara partai-partai politik yang ada. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 merupakan suatu kemajuan politik di Indonesia, yaitu pengakuan akan keberadaan partai politik dalam suatu negara. Tetapi dilain pihak maklumat tersebut merupakan benih perpecahan dan perebutan kekuasaan antara partai-partai yang ada.

Pendekatan terakhir yang digunakan dalam pemahaman dan pengungkapan Gerakan MMC adalah berdasarkan pada idiologi, yaitu idiologi Komunis. Seperti yang telah disebutkan di bagian terdahulu, bahwa faham komunis mempunyai andil dalam Gerakan MMC.

Digunakannya suatu idiologi dalam suatu gerakan mempunyai tujuan menerangkan keberadaan masyarakat atau

---

<sup>20</sup> ibid, h. 13

<sup>21</sup> Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 30

golongan, cita-cita yang ingin dicapai serta mendorong ke arah suatu tindakan. Idiologi membenarkan atau melegitimasi tindakan-tindakan serta pilihan yang diambil oleh pendukungnya dalam tatanan masyarakat.<sup>22</sup>

William Ebenstein dan Edwin Fogelman berhasil mendefinisikan, bahwa komunisme merupakan ide penghapusan yang pasti atas hak milik pribadi dengan menempatkan aliansi diri manusia terhadap lingkungannya sesuai dengan hakekat kemanusiaan, yaitu oleh dan untuk manusia. Dengan adanya penghapusan itu, maka manusia akan berubah menjadi mahluk sosial, mahluk yang benar-benar manusiawi.<sup>23</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Marx yaitu "Materialisme Dialektis" menjadi landasan gerak dari orang-orang yang menganut paham komunisme. Materialisme Dialektis yang dikemukakan oleh Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa segala sesuatu semua akan berkembang terus.<sup>24</sup>

Pertentangan yang terjadi menurut Marx adalah pertentangan antara golongan pemilik modal dengan golongan pekerja yang menjual tenaganya kepada golongan pemilik modal. Pemusuhan dua golongan tersebut dalam ajaran Marx dirumuskan sebagai suatu perjuangan kelas pekerja, yang

---

<sup>22</sup> J.B. Sudarmanto, Agama dan Idiologi (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1987), h. 18

<sup>23</sup> William Abenstein-Edwin Fogelman, Isme-isme Dewasa ini (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1987), h. 12

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, op cit, h. 80

dari perjuangan tersebut akan dihasilkan suatu masyarakat tanpa kelas dimana sarana-sarana produksi akan menjadi milik bersama.<sup>25</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Marx ini terjadi dalam kenyataan, khususnya dalam masyarakat Jawa Tengah pada tahun 1950-an, yaitu terjadinya pertentangan antara pemerintah, yang dalam hal ini adalah pemilik modal, dengan petani penggarap tanah dan kelompok pekerja lain, yaitu kelompok bekas tentara.

Ajaran Marx menyebutkan bahwa negara menjadi alat dari golongan borjuis untuk menindas golongan proletar. Negara semacam itu menurut Marx harus lenyap, demikian menurut pendapat John H. Halloell.<sup>26</sup> Dalam perkembangannya golongan komunis selalu menentang pemerintah yang berkuasa di negara masing-masing. Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu menindas mereka karena pemerintah adalah antek kapitalis.

Perjuangan yang dilakukan oleh kaum komunis dalam mencapai cita-citanya dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara politik atau melalui perjuangan partai komunis yang legal. Cara lain adalah melalui perjuangan bawah tanah, yaitu dengan membentuk gerakan ilegal atau organisasi bawah tanah. Orang komunis dari tahun ke tahun selalu menekankan ketidakcakapan atau

---

<sup>25</sup> Sutardjo Adisusilo, "Marxisme dan Dampaknya Terhadap Eropa", Makalah Seminar Kopertis Wilayah V November 1989

<sup>26</sup> Sutarjo Adisusilo, Ibid h. 14

kelemahan pemerintah yang berkuasa dan mereka akan berusaha untuk menarik orang-orang yang tidak puas atau orang-orang yang kecewa dengan pemerintah ke pihaknya.<sup>27</sup>

Gerakan ilegal komunis yang terbentuk sebagai suatu sel atau bagian dari partai komunis yang pernah terdapat di Indonesia salah satunya adalah Gerakan MMC. Pendapat ini dikemukakan oleh Donald Hindley yang menyatakan:

*"...in 1952, the PKI leaders concentrated their armed bands into the area and give intensive military and political training to youth brought in from East and Central Java for short periods on rotating basis"*<sup>28</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Hindley tersebut, menunjukkan sampai sejauh mana keterlibatan komunis atau PKI dalam memberikan bantuan militer dan politik di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada bagian tertentu, Hindley menyebutkan bahwa daerah sekitar Merapi-Merbabu (Merapi-Merbabu Complex) merupakan daerah yang juga mendapatkan bantuan dari kelompok komunis, sehingga terdapat indikasi adanya peranan komunis dalam Gerakan MMC.

Adanya pertentangan antar kelompok pemilik modal dan kelompok pekerja inilah yang mendorong digunakannya pendekatan berdasarkan ideologi komunis, dengan memberikan batasan bahwa Gerakan MMC bukanlah gerakan komunis, tetapi dalam perkembangannya mereka dimanfaatkan komunis.

---

<sup>27</sup> Harry dan Bonaro O., Apa Yang Harus Kita Ketahui Mengenai Komunisme (Jakarta: Penerbit Endang, 1958), h. 81-83

<sup>28</sup> Donald Hindley, The Communist Party of Indonesia 1951-1963 (Los Angeles: University of California Press, 1964), h. 106-109

**G. Tinjauan Pustaka**

Skripsi ini berjudul "Gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC) di Jawa Tengah Tahun 1950 - 1955", untuk itu, dalam penulisannya didasarkan pada buku-buku, dokumen, naskah maupun surat kabar yang memuat tentang Gerakan MMC ini. Diantara sumber-sumber tertulis tersebut adalah :

1. Kisah Lahir dan matinya Gerombolan Merapi-Merbabu Complex yang ditulis oleh M.S. Handjojo, yang pada tahun 1950 menjabat sebagai Bupati Boyolali. Artikel ini mengisahkan tentang latar belakang munculnya MMC di Boyolali, Salatiga dan Semarang. Dalam artikel ini, M.S. Handjojo berkeyakinan bahwa komunis berada di belakang gerakan tersebut.
2. Gambaran Umum Tentang Gerakan MMC di kabupaten Boyolali dan Klaten adalah termuat dalam Laporan Disbintal Angkatan Darat Bandung, yang berjudul Sekitar Merapi Merbabu Complex. Kelebihan dari laporan ini adalah menyangkut tentang perkembangan organisasi bersenjata dan penyusupan orang-orang komunis yang bersembunyi di sekitar gunung Merapi-Merbabu. Selain itu, laporan dilengkapi dengan kronologi peristiwa dan obyek yang dijadikan sasaran gerakan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Buku yang berjudul *Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu*, yang diterbitkan oleh SEMDAM VII Diponegoro Semarang pada tahun 1971. Pada buku ini memuat faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan dan operasi yang dilancarkan oleh pihak pemerintah. Selain itu terdapat sumber-sumber primer dari pihak pemerintah maupun gerombolan, seperti AD/ART PKR, tentang pembagian tanah bekas onderneming bahkan tanggal dan tempat kejadian gerakan secara kronologis digambarkan. Dengan dicantumkannya sumber tersebut sangat mendukung dalam penyusunan tulisan ini.

4. Naskah yang disusun oleh sejarah Militer Tjabang 073/Makutoromo tahun 1967, yang berjudul *Gerombolan Merapi-Merbabu Complex*. Naskah ini berisi perkembangan dan situasi terakhir dari gerakan yang berlokasi di kabupaten Semarang. Oleh karena disusun oleh pihak militer, maka titik berat pengungkapan dari naskah ini adalah berkisar peranan militer dalam menghadapi gerakan MMC.

### H. Metode Penelitian dan Penulisan

Dalam mengadakan penelitian untuk menghasilkan suatu skripsi dengan judul yang disebutkan di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian Heuristik, yang dalam pelaksanaannya menggunakan tiga tahapan yang dilakukan.

Tahap awal adalah tahap Heuristik. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber primer, yang meliputi dokumen-dokumen, laporan pemerintah dan informasi lain yang diperoleh dari instansi yang berwenang dan mempunyai kepentingan dengan sejarah Gerakan MMC, yaitu BINTALDAM IV DIPONEGORO.

Selain mengumpulkan data dokumen, maka penulis juga mencari fakta-fakta dari kejadian nyata yang berkaitan dengan gerakan MMC. Fakta tersebut diperoleh dari berbagai surat kabar yang terbit pada kurun waktu tahun 1950 - 1955.

Data lain yang diperoleh dalam penelitian adalah melalui wawancara terhadap informan-informan yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung dari adanya Gerakan MMC.

Penulis juga tidak mengesampingkan untuk mengadakan studi pustaka guna mendapatkan informasi lain dan melihat pendapat para pakar sejarah yang relevan dengan pembahasan Gerakan MMC.

Tahap kedua adalah tahap Kritik. Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan, terutama data yang didapat dari sumber-sumber tertulis maupun dari sumber-sumber lisan. Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan antar sumber. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data tersebut relevan dengan topik yang dibahas.

Tahap ketiga adalah tahap Sinttesa. Pada tahap ini penulis menyusun fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai

sumber yang telah dikaji kebenarannya dalam suatu susunan peristiwa yang kronologis, yang menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan atau sesuai dengan topik.

Pada akhirnya penulis menyajikan penulisan skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan waktu dan ruang lingkup wilayah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan Latar Belakang Munculnya Gerakan MMC. Dalam bab ini diuraikan mengenai keadaan sosial, ekonomi, keadaan politik Indonesia tahun 1945-1949, keadaan organisasi militer masa Rasionalisasi dan Reorganisasi serta infiltrasi eks pelaku pemberontakan PKI Madiun.

Bab III menjelaskan Gerakan MMC Tahap Kelompok Jago. Dalam bab ini diuraikan diskripsi wilayah gerakan MMC secara umum, kepemimpinan, organisasi, wilayah operasi dan akhir Gerakan MMC tahap Kelompok Jago.

Bab IV berisi penjelasan tentang Gerakan MMC Tahap Kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR) Pada bab ini diuraikan mengenai kepemimpinan, organisasi dan wilayah operasi. akhir gerakan MMC yang meliputi perpecahan dalam tubuh PKR, tindakan yang diambil oleh aparat keamanan dan pamong praja dan keberanian rakyat dalam menghadapi gerombolan, serta melihat akibat di bidang sosial dan politik dari adanya Gerakan MMC ini.



Bab V memuat kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan dalam sripsi ini.

Pembahasan masalah dengan sisimatika yang demikian inilah, maka penulis menyusun skripsi dengan judul : *Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC) di Jawa Tengah Tahun 1950 - 1955*, seiring dengan harapan agar mudah dipahami dan dipelajari.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## B A B II

### LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN MMC

#### A. Keadaan Sosial Ekonomi.

Daerah sekitar gunung Merapi dan Merbabu, termasuk daerah tropis dengan suhu udara berkisar antara  $21-1^{\circ}$  -  $32-8^{\circ}$  C, dan mempunyai curah hujan setiap tahunnya antara 3-10 bulan basah dan dua bulan kering, serta mempunyai empat siklus musim yaitu Ketigo, Labuh, Rendheng dan Mareng.<sup>29</sup>

Pada umumnya para petani tradisional tergantung pada siklus musim tersebut, karena hal ini berpengaruh pada pengolahan tanah garapan. Kecuali itu mereka juga mengenal adanya sistem pranatamangsa yang pada hakekatnya merupakan suatu sistem penanggalan tradisional dan berkaitan erat dengan bioklimatologis dan sosiokultural antara manusia dengan alamnya. Dalam pranatamangsa tersebut, satu tahun dibagi menjadi 12 mangsa, yaitu Kasiji, Karo, Katigo, Kapat, Kalimo, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasonggo, Kasedasa, Dhesta dan Sadha.<sup>30</sup>

Bagi masyarakat agraris, tanah pertanian merupakan sumber kekayaan sekaligus sumber produksi. Oleh karena

---

<sup>29</sup> B. Sularto, dkk., Monografi Daerah Jawa Tengah (Jakarta: Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tt), h. 25. Untuk musim ketigo berlangsung dari bulan April sampai Desember, Rendeng dari bulan Desember sampai April. Sedangkan Labuh dari bulan Januari sampai Maret, Labuh dari bulan Juli sampai Oktober.

<sup>30</sup> Dr. J.H. Boeke, Pra Kapitalisme di Asia (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 44-48

itu, pemilikan tanah memperlihatkan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Berdasarkan pemilikan tanah, di Jawa Tengah dikenal adanya tiga golongan petani, yaitu tani Kenceng atau Singkep, Gundhul atau Lindung dan Wong Mondok atau numpang. Istilah ini muncul agaknya berawal dari adanya pemilikan tanah petani yang terlalu luas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri. Oleh karena itu muncul kerja sama dalam bentuk penyakapan tanah. Biasanya Wong Mondok bekerja sebagai penggarap tanah, sedangkan petani Gundhul hanya sebagai penyewa tanah.<sup>31</sup>

Dalam sistim sewa tanah, seseorang dapat menyewa tanah milik orang lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada bentuk penyakapan, berlaku sistim bagi hasil di antara pemilik dan penggarap, yang biasanya dikenal dengan istilah Maro, Mertelu dan Mrapat.<sup>32</sup>

Selain itu, dikenal juga dengan adanya sistem Bawon yang berlaku pada saat panen tiba. Pada musim menuai padi, biasanya masyarakat setempat ikut juga turun ke

---

<sup>31</sup> Tani Kenceng adalah penduduk desa yang memiliki tanah sawah dan rumah, hak serta kewajiban penuh atas segala kegiatan desa. Biasanya golongan petani ini memiliki garis keturunan dengan cikal bakal desa. Petani Gundhul adalah penduduk yang memiliki tanah dan rumah, tetapi tidak memiliki garis keturunan dengan cikal bakal desa. Sedangkan Wong Mondok adalah penduduk pendatang yang biasanya tidak memiliki rumah atau tanah. Selanjutnya lihat majalah mingguan Merdeka Tahun III no. 13 tentang "Kehidupan Masyarakat Desa"

<sup>32</sup> Dalam sistem maro, bibit berasal dari pemilik tanah, pupuk dari pemilik dan penggarap. Setelah panen dibagi dua. Mrettelu dan Mrapat berarti dalam pengolahan bibit, pupuk dan lain sebagainya ditanggung oleh pemilik, setelah panen 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap, demikian dan seterusnya.

sawah dan sebagai imbalannya mereka akan mendapat bagian tertentu yang disebut bawon, yang besarnya tergantung pada kebijaksanaan pemilik sawah.<sup>33</sup>

Dalam mengolah tanah secara tradisional, petani umumnya tidak terlepas dari bantuan tenaga hewan, seperti sapi atau kerbau. Keduanya sangat bermanfaat bagi kehidupan petani, karena selain tenaganya dipakai untuk menggarap lahan, secara ekonomis berfungsi sebagai tabungan yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dibutuhkan.

Daerah di sekitar gunung Merapi dan Merbabu pernah beberapa kali mengalami perubahan sistem pemerintah yang berpengaruh pula terhadap tata kehidupan masyarakatnya.

Diawali dari masa kerajaan tradisional, kehidupan masyarakat dapat dikatakan telah mapan dan telah hidup menurut tradisi setempat, akan tetapi pola kehidupan ini mengalami perubahan pada masa pemerintahan kolonial Belanda atau masa Hindia Belanda. Tanah yang subur dan tenaga yang melimpah, dimanfaatkan oleh pihak pemerintah sebagai daerah perkebunan teh, kopi, tebu, tembakau, serat dan palawija.<sup>34</sup> Sejak itu pula masyarakat mengenal adanya sistem sewa tanah, perburuhan (kerja paksa) dan pajak yang semakin menyulitkan kehidupan mereka.



<sup>33</sup> Biasanya Bawon diberikan dalam bentuk in natura dengan ketentuan setiap 10 ikat padi yang dihasilkan dalam suatu lahan pertanian, maka buruh tani akan mendapatkan satu ikat padi, demikian seterusnya.

<sup>34</sup> Joko Suryo, "Gerakan Petani", Prisma no. 11 (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 17

Di wilayah Kesunanan Surakarta, munculnya onderneming atau tanah perkebunan diawali adanya Agrarische Reorganisatie pada tahun 1911. Adapun tentang hak milik dan status tanah perorangan adalah berdasarkan pada Cultuur Ondeneming dan Watershap Ordonantie tahun 1920.<sup>35</sup> Dengan adanya peraturan yang telah disetujui oleh pihak Kesunanan dan Belanda, maka mulailah tanah-tanah onderneming didirikan.

Dengan berdirinya tanah-tanah onderneming, maka tanah rakyatnya semakin terdesak, karena banyak tanah yang disewa secara paksa oleh Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang berkembang pesat dan berusaha untuk memperluas perkebunan dengan jalan paksaan, terlebih pihak pemerintah Belanda memberikan kemudahan kepada para pengusaha untuk lebih mengembangkan diri. Hal itu tercermin dengan Onwettige Occupatie (okupasi yang tidak disahkan) dan Peraturan Erfpachtsrecht (hak Erfpacht) pasal 270 Undang-undang Perdata, yang intinya menyatakan adalah hak pengusaha untuk memungut hasil dari suatu benda tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban membayar pajak tahunan sebagai pengakuan kepunyaan seseorang, yang

---

<sup>35</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 30 Mei 1992. Mengenai tanah onderneming dapat dijelaskan, bahwa pada awalnya status tanah milik kasunanan Surakarta sebagian besar banyak yang disewakan kepada swasta selama 75 tahun lamanya, sebagai imbalan bagi dukungan Belanda terhadap Kasunanan Surakarta. Tanah yang disewakan tersebut dinamakan tanah Erfpacht

diwujudkan dalam bentuk uang atau barang.<sup>36</sup>

Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak penguasa ternyata membuat rakyat semakin menderita. Di satu pihak pengusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat, tetapi dilain pihak kehidupan petani semakin hancur. Sebagai dampak negatif dari keadaan yang demikian ini, menyebabkan munculnya perjudian, perampokan dan sebagainya yang semakin menambah rusaknya kehidupan masyarakat.

Pada masa pemerintahan militer Jepang, maka terjadi pula perubahan pemerintahan, sosial ekonomi dan sebagainya.<sup>37</sup> Menurut Mitsuo Nakamura, politik perang Jepang di Asia Tenggara memerankan dua kebijaksanaan penting yang keduanya adalah saling bertolak belakang. Yang pertama Jepang menekankan tujuan pembebasan rakyat Asia, dengan maksud memperoleh pengesahan operasi-operasinya di negeri asing, dan juga untuk memperoleh dukungan bagi usaha perangnya dari unsur-unsur nasionalis. Akan tetapi dilain pihak Jepang membutuhkan sumber-sumber alam dan tenaga manusia dari daerah tersebut, karena tanpa ini Jepang

---

<sup>36</sup> M.S. Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Djakarta: Soeroengan, 1955), h. 114-142. Onwettige Occupantie ini menguntungkan orang asing, kerana mereka dapat mengerjakan attau menyewa tanah Gubernemen yang diambil selama 20 ttahun lamanya.

<sup>37</sup> Mengingat pemerintahan Jepang yang berkuasa di Indone-sia adalah Pemerinttahan Militer, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan militer, sehingga rakyat Indonesia mendapat-kan tekanan dengan peraturan militer tersebut. Lihat pula karangan Dr. William H. Frederick, Gelora Api Revolusi Pendu-dukan Jepang (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 83-90

tidak dapat meneruskan politik perangnya.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan peranan politik militer yang kedua, maka Jepang melihat masyarakat Indonesia adalah masyarakat penghasil beras, yang setiap tahunnya menghasilkan 8,5 juta ton beras. Sehingga keadaan tersebut sangat menguntungkan karena dapat berfungsi sebagai pemasok kebutuhan militer.<sup>39</sup> Pada bulan Agustus 1942, Pemerintahan Militer menetapkan pungutan bahan pangan secara sistematis, yang disebut dengan politik beras. Adapun dasar-dasar politik beras Jepang tersebut adalah, hanya pemerintah yang diijinkan melakukan seluruh proses pungutan dan penyaluran padi. Para petani harus menjual hasil produksinya kepada pemerintah sebanyak kuota atau jumlah dari barang yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan dan padi harus diserahkan ke penggilingan padi yang ditunjuk oleh pemerintah desa bentukan Jepang.<sup>40</sup>

Kecuali padi, rakyat juga diharuskan menyerahkan benda mulia, seperti emas, berlian, intan dan tak terkecuali besi bekas dan senjata tajam, kepada Jepang melalui pemerintahan desa. Selain itu rakyat di daerah sekitar Merapi-Merbabu, khususnya di daerah Boyolali dan Klaten masih diwajibkan pula untuk menanam ketela rambat, karet

---

<sup>38</sup> Akira Nagazumi, Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h.3

<sup>39</sup> ibid h. 86

<sup>40</sup> ibid h. 87-88

dan pohon jarak.<sup>41</sup>

Masalah lain yang membuat masyarakat Indonesia secara umum menjadi semakin resah adalah masalah romusha. Melalui Lurah, Jepang memerintahkan untuk disediakan tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar pulau Jawa, dengan janji imbalan gaji yang tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, nasib para pekerja romusha sangat menyedihkan. Mereka bekerja keras tanpa imbalan, bahkan tanpa makanan dan jaminan kesehatan. Sehingga banyak yang tewas karena kelaparan atau terkena penyakit.

Walaupun menurut ketentuan romusha hanya dikirim ke luar Jawa, namun dalam kenyataannya ada yang dikirim sampai ke luar negeri, seperti ke Burma dan Thailand. Mereka itu dipekerjakan untuk membangun kubu-kubu pertahanan, jalan-jalan kereta api, lapangan terbang dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa pada masa pendudukan Jepang, keadaan sosial ekonomi Indonesia pada umumnya dan masyarakat di sekitar daerah-daerah Merapi dan Merbabu khususnya adalah sangat memprihatinkan. Penindasan terhadap rakyat datang silih berganti, sementara produksi semakin merosot, inflasi yang tinggi, barang yang sukar didapat dan bahaya kelaparan. Sementara itu ketimpangan sosial dalam masyarakat terjadi sebagai akibat kemakmuran hanya dinikmati oleh

---

<sup>41</sup> Biji jarak yang diserahkan kepada Jepang kemudian diolah menjadi minyak pelumas, sehingga dapat digunakan untuk merawat perlengkapan perang Jepang.



kalangan pangreh praja saja sehingga terdapat rasa dendam di kalangan rakyat.<sup>42</sup>

Ketika diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka harapan rakyat untuk terlepas dari belenggu penjajahan dan kemiskinan akan segera terwujud. Namun harapan itu pudar semenjak kedatangan kembali Belanda yang memboncong sekutu pada tanggal 19 Oktober 1945 di Semarang, yang disusul dengan Agresi Militer dan pendudukan Belanda. Pada saat inilah Belanda berhasil memasuki kembali perkebunan, pabrik-pabrik, instansi pemerintahan baik di Semarang, Salatiga dan Surakarta. Dengan hidupnya kembali berbagai usaha swasta Belanda, maka mereka dapat memerintahkan para buruh untuk menjalankan kembali aktivitas perekonomian.<sup>43</sup>

Pada masa perang kemerdekaan, para pejuang giat melakukan perang gerilya terhadap daerah yang dikuasai musuh. Dalam perang ini dikenal adanya sistim bumi hangus, sabotase dan pengrusakan terhadap hak milik Belanda, seperti pabrik, ondeneming dan sebagainya. Hal ini sangat efektif untuk menghancurkan perekonomian Belanda, namun di lain pihak hal ini menimbulkan pengangguran bagi para pekerja karena tempat bekerjanya

---

<sup>42</sup> Sartono Kartodirdjo Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Prespektivisme Struktural (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 3. Lihat pula buku Akira Nagazumi, op cit h. 84

<sup>43</sup> Tan Malaka, Gerpolek (Gerakan Politik Ekonomi) (Yogyakarta: Pustaka Murba, 1949), h. 49

dihancurkan.<sup>44</sup>

Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1949, maka rakyat sekitar bekas onderneming di Kabupaten Boyolali saling berebut dan secara liar telah menempati dan menggarap bekas tanah perkebunan itu, yang dianggap sebagai hasil revolusi. Tidakan tersebut akhirnya menja-lar di beberapa tempat, seperti Klaten, Salatiga dan Ambarawa. Untuk menertibkan aksi liar tersebut, maka Pemerintah Militer Daerah mengeluarkan Peraturan Darurat No. IV Komando PPS II Rayon III tahun 1950, tentang penyerahan bekas tanah onderneming, seperti Malangbong, Barostampir, Sukabumi dan Sukorame kepada rakyat. Dengan demikian diharapkan tingkat kehidupan rakyat di sekitar onderneming akan menjadi lebih baik.<sup>45</sup>

Kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Militer Daerah ternyata tidak sejalan dengan kebijaksanaan pusat. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 November 1949 menandatangani hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar dengan Belanda. Menurut pasal 22 bagian A pasal 4 dan 5 dari Persetujuan KMB itu, Republik Indonesia diharuskan menyerahkan kembali segala milik konsesi asing kepada Belanda, termasuk diantaranya tanah-tanah perkebunan atau onderneming, pabrik-pabrik dan sebagainya. Ini berarti hak-hak kaum penjajah masih

---

<sup>44</sup> Ibid h. 50. Aksi bumi hangus dan pengerusakan ini tidak saja dilakukan oleh pasukan, tetapi rakyat disekitarnya juga ikut serta. Lihat pula M.S. Handjojo, op cit. h.2

<sup>45</sup> Dokumen Semdam VII Diponegoro, Peraturan Darurat No. IV Komando PPS II Rayon III Boyolali, tanggal 29 April 1950

dipertahankan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil perjanjian KMB itu, maka pemerintah berusaha meminta kembali tanah perkebunan yang pernah dibagikan kepada kepada rakyat. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah, karena rakyat menolak memberikan tanah yang subur itu kepada pemerintah. Akibatnya persoalan tanah di sekitar onderneming makin rumit, dan kekecewaan terhadap pemerintah mulai muncul dikalangan masyarakat.

Persqalan tanah ini ternyata menyebabkan banyak rakyat di kabupaten Boyolali yang bergabung dengan Gerakan MMC. Dalam persidangan di Pengadilan Boyolali terhadap anggota MMC, didapat keterangan bahwa banyak masyarakat khususnya petani yang bergabung dengan MMC, karena mereka dijanjikan akan diberi sawah atau tegalan bila membantu mereka. Sebaliknya mereka takut akan dibunuh atau takut dituduh sebagai antek pemerintah dan antek Belanda, apabila tidak membantu Gerakan MMC.<sup>47</sup>

Proses kemiskinan dan penindasan di bidang ekonomi yang berkepanjangan dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan yang terus menimpa rakyat kecil, pengangguran dan kekecewaan karena gagalnya mendapatkan kesempatan

---

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1986-1987), h. 181

<sup>47</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 31 Maret 1992. Tanah atau sawah bagi masyarakat, khususnya bagi petani adalah sangat penting untuk kelangsungan hidup atau untuk meningkatkan status sosial. Sehingga janji untuk diberi sawah sangat menarik mereka untuk bergabung dengan Gerakan MMC

untuk dapat hidup layak, mengakibatkan memuncaknya kriminalitas di daerah sekitar ondeneming, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Adanya pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan politik yaitu komunis, menyebabkan rakyat mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan haknya.

Keterlibatan orang komunis dalam masalah ini dibenarkan oleh Disbintal Angkatan Darat Bandung dalam suatu artikelnya, yang menyebutkan sebagai berikut :

*"Untuk kepentingan pertahanan guna menghadapi musuh, maka oleh pemerintah militer diperintahkan kepada rakyat daerah Musuk, Tjepaga untuk membuka tanah-tanah ondeneming, agar dapat dipekerjakan atau dijadikan kampung baru. Kesempatan itu dipergunakan oleh golongan kiri untuk merehabilitasi prestasi/pengaruh mereka (yang telah lanjut karena akibat Madiun-Affaire) di kalangan rakyat yang masih mudah terpengaruh."<sup>48</sup>*

Pernyataan yang diungkapkan diatas merupakan bukti bahwa Partai Komunis Indonesia mempunyai kepentingan dalam masalah tanah ini, sebab Partai Komunis di seluruh dunia berkeyakinan bahwa kelas pekerja (buruh industri, petani dan lain sebagainya) sebagai unsur masyarakat yang progresif dan revolusioner. Karena masyarakat di Indonesia mayoritas adalah masyarakat agraris, maka tidaklah mengherankan apabila ada usaha dari komunis untuk merangkul petani agar bergabung dengan komunis. Hal ini terbukti jelas ketika D.N Aidit muncul sebagai pimpinan PKI

---

<sup>48</sup> Disbintal Angkatan Darat Bandung, Sekitar Merapi-Merbabu Complek (Bandung: Dokumen Subdikdokjarah Mustak, tt), h.1

pada tahun 1951, ia menekankan perlunya aliansi buruh petani untuk revolusi. Berkaitan dengan hal ini, Aidit menyusun daftar panjang slogan berdasarkan penderitaan nyata petani, seperti "tanah untuk petani", "kepemilikan pribadi petani atas tanah" dan "peningkatan upah buruh pertanian" dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

#### B. Keadaan Politik Indonesia Tahun 1945-1949

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka untuk melengkapi syarat berdirinya negara perlulah dibentuk lembaga pemerintahan sebagai layaknya suatu negara yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 para pendiri negara berhasil memutuskan 2 hal pokok, yaitu menetapkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD yang baru saja ditetapkan.

Untuk menunjukkan bahwa pemerintahan yang berkuasa di Indonesia bukanlah bentukan Jepang dan juga untuk memenuhi Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 yang menyatakan, bahwa Presiden menjalankan kekuasaan non-eksekutifnya dengan bantuan sebuah Komite Nasional, maka pada tanggal 16 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan suatu maklumat yang dikenal dengan Maklumat Wakil Presiden No.X.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Karl J. Pelzer, op cit. h. 55-56

<sup>50</sup> Drs. G. Moedjanto, M.A., Indonesia Abad Ke 20: (I) (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 142

Dengan dikeluarkannya maklumat itu, RI menjadi suatu negara yang mengikuti pola sistem demokrasi Eropa. Sebagai kosekwensinya maka suara rakyat harus disalurkan melalui organisasi politik. Realisasi dari keinginan tersebut adalah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. <sup>51</sup>

Akibat dengan dikeluarkannya maklumat ini adalah mulai bermunculan partai politik di Indonesia, seperti Masyumi pada tanggal 7 November 1945, Partai Buruh Indonesia pada tanggal 8 November 1945, Parkindo tanggal 10 November 1945 dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Munculnya partai-partai politik di Indonesia dengan berdasar oleh berbagai macam idiologi itu, tidak hanya terpusat di kota besar seperti di Jakarta saja, melainkan tersebar di seluruh daerah. Hal semacam itu terjadi pula di daerah sekitar Merapi dan Merbabu.

Dengan mulainya bermunculan partai politik di Indonesia, maka persaingan antar partai politik itupun terjadi. Persaingan itu adalah saling berebut mencari massa atau pendukung, saling mencari pengaruh dan bahkan saling berusaha untuk berkuasa dengan menjatuhkan lawan politiknya. Karena Indonesia pada saat itu menganut paham liberalisme Barat, maka nilai-nilai liberalisme itu menyebabkan kehidupan politik kita berlangsung dengan persaingan bebas dari partai-partai politik.

---

<sup>51</sup> Ibid. h. 43

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit. h. 56

Suatu contoh yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa percaturan politik di Indonesia pada masa liberal adalah kacau, yaitu jatuh bangunnya kabinet yang memerintah di Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan tahun-tahun 1949. Kabinet pertama (Kabinet Presidensial) memerintah selama bulan Agustus sampai November, Kabinet Syahrir III berusia delapan setengah bulan, Kabinet Amir Sjarifudin I berusia empat bulan, Kabinet Amir Sjarifudin II berusia dua setengah bulan, Kabinet Hatta berusia delapan belas setengah bulan, tetapi tidak berlangsung lama, karena pada saat itu terjadi Agresi Militer II sehingga pemerintah RI dipegang oleh Pemerintah Darurat. Dengan demikian waktu empat setengah tahun, Republik Indonesia diperintah oleh sejumlah partai politik yang masing-masing partai politik memerintah dalam waktu yang relatif singkat.<sup>53</sup>

Gambaran keadaan yang demikian ini dinilai oleh para ahli sebagai gambaran ketidakstabilan politik di negara Indonesia. Lebih lanjut Arbi Sanit menyatakan :

*"... salah satu gambaran dari ketidakstabilan politik di Indonesia, yakni dilihat dari kesempatan yang tersedia bagi setiap kabinet untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi ..."*<sup>54</sup>

Bertolak dari pendapat Arbi Sanit tersebut, maka adanya

---

<sup>53</sup> Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985), h. 35-36

<sup>54</sup> Arbi Sanit, Sistim Politik di Indonesia : Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 1

pergantian kabinet yang memerintah di Indonesia dalam waktu yang relatif pendek tersebut, kabinet tidak dapat memajukan ataupun melaksanakan program kebinetnya, bahkan tidak dapat melaksanakan pembaharuan ekonomi, politik dan sebagainya. Partai-partai yang beroposisi terhadap pemerintah akan selalu berusaha memojokkan kebijaksanaan pemerintah dengan mengajukan mosi tidak percaya. Akibatnya kabinet yang memerintah akan jatuh, dan apabila partai yang memerintah itu jatuh, maka mereka akan jadi oposisi terhadap kabinet yang mengantikannya. Hal itu terjadi berulang-ulang selama masa demokrasi liberal di Indonesia. Suatu perkembangan yang sukar untuk dimengerti apabila melihat perkembangan politik masa itu, mengingat masa itu sangat merupakan masa yang menentukan bagi persatuan bangsa, mengingat pada masa itu bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali.

Salah satu faktor yang menyebabkan kuatnya kedudukan suatu partai politik pada masa itu, adalah mereka mempunyai suatu kekuatan bersenjata atau laskar yang bersenjata. Kekuatan rakyat yang bersenjata itu muncul atau didirikan oleh para pemuda karena terdorong untuk berjuang membela negara yang terancam oleh kembalinya pasukan asing. Namun mereka tidak suka bergabung dibawah pemerintah, melainkan lebih suka bergabung dengan partai politik yang sehaluan. Sebagai contoh Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Hisbullah yang berafiliasi dengan Masyumi dan sebagainya. Kekuatan pemuda yang militan itu,



bagi partai-partai politik merupakan suatu alat yang ampuh untuk mendukung persaingan politik.<sup>55</sup>

Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin dari Partai Sosialis Indonesia dan digantikan oleh Kabinet pimpinan Moh.Hatta, menyebabkan partai Amir menjadi partai oposisi yang menentang kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kabinet Hatta. Kebijaksanaan Hatta yang ditentang oleh Amir itu adalah program Rekontruksi dan Rasionalisasi di kalangan Angkatan Perang. Padahal, Amir Syarifudin telah mempunyai pengaruh di kalangan TNI Masyarakat, yang dibentuknya pada bulan Agustus 1947 dengan suatu pertimbangan politis, yaitu untuk memperkuat pengendalian partainya terhadap Angkatan Perang. Adapun yang menjadi pimpinan TNI Masyarakat adalah Ir.Sakirman, seorang tokoh komunis.<sup>56</sup>

Rasionalisasi yang dilakukan Hatta, ternyata sampai juga pada Divisi IV atau Senopati di Surakarta, yang di dalamnya pengaruh Pesindo dan kelompok-kelompok kiri lain yang merupakan sayap kiri Front Demokrasi Rakyat cukup kuat. Ketegangan bertambah dengan terjadinya tembakan-menembak antara kesatuan Siliwangi dan Pesindo. Pada mulanya hanya terjadi di Surakarta, kemudian merembet ke Blitar, dan bagian-bagian lain di Jawa Timur. Puncaknya adalah pemberontakan terang-terangan pasukan Pesindo dan sejumlah pemimpin Partai Komunis Indonesia yang disebut

---

<sup>55</sup> Drs. G. Moedjanto, M.A., op cit. h. 123-125. Lihat pula buku karangan Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI (Jakarta: LP3ES, 1982)

<sup>56</sup> Nugroho Notokusanto, op cit. h. 47

dengan Peristiwa Madiun.<sup>57</sup>

Pemberontakan PKI itu berhasil ditumpas dan banyak tokoh pemberontakan yang terbunuh, dihukum mati, lari atau tertangkap. Mereka yang tertangkap itu sebagian di antaranya ditawan di penjara Wirogunan Yogyakarta. Ketika pecah Clash ke II, banyak tahanan Wirogunan yang dikeluarkan, termasuk di antaranya tokoh-tokoh Madiun Affair, seperti Alimin, Setiadjud dan lain-lain. Mereka yang lepas itu lari bersembunyi, di antaranya ke daerah sekitar Merapi dan Merbabu.

Berdasarkan dari uraian tentang kehidupan politik di Indonesia sampai dengan tahun 1949 yang diwarnai dengan persaingan dan pemberontakan, maka dapatlah diketahui bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan stabilitas, khususnya di bidang politik. Sistem politik liberal yang diterapkan untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan bernegara ternyata disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri.

Kegagalan dalam kehidupan politik di negara Indonesia ini semakin menambah permasalahan-permasalahan yang ada dalam negara kita, seperti masalah ekonomi dan sosial yang hancur sebagai akibat perang kemerdekaan. Masalah-masalah yang demikian ini ternyata membawa korban, yaitu rakyat kecil. Rakyat kecil yang sejak jaman penjajahan merupakan golongan yang menderita semakin bertambah

---

<sup>57</sup> Cornelis van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Jakarta: Penerbit Grafiti Press, 1983), h. 327

menderita dengan ketidakpastian keadaan di negara Indonesia. Ketidakpastian keadaan inilah yang mendorong mereka mempunyai sifat tidak percaya atau apatis terhadap pemerintah, sehingga hal ini memudahkan mereka termanakan agitasi.

### **C. Keadaan Organisasi Militer Masa Rasionalisasi dan Rekonstruksi**

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu tidak terlepas dari peranan kekuatan bersenjata yang bersatu dengan rakyat. Organisasi militer di Indonesia pada awal masa kemerdekaan adalah sangat sederhana. Diawali dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat), yaitu suatu organisasi yang bertugas memelihara keamanan dan menolong korban perang di masing-masing daerah. Pembentukan BKR itu diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945, melalui pidato Presiden Soekarno. Dalam pidatonya, Sukarno mengajak anggota PETA, Heiho dan pemuda-pemuda untuk sementara bekerja dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai tentara kebangsaan bila datang saatnya<sup>58</sup>

Pada tanggal 5 Oktober organisasi BKR disempurnakan menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 10 Oktober 1945, Markas Besar TKR mengeluarkan maklumat yang berisi tentang anjuran pembentukan Laskar Rakyat sampai ke desa-desa, sebagai

<sup>58</sup> Nugroho Notosusanto, op cit. h. 37

pembantu TKR dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini pada akhirnya justru akan mempersulit pemerintah dalam membentuk kesatuan organisasi bersenjata dibawah satu komando karena akhirnya laskar-laskar rakyat tersebut cenderung menjadi bagian dari partai politik.<sup>59</sup>

Dengan dipindahkannya Ibukota RI ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946, maka Kementerian Pertahanan secara bertahap menyempurnakan angkatan perang. Pada tanggal 25 Januari 1946, Menteri Pertahanan mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.4/SD, yang berisi tentang penetapan perubahan dari TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).<sup>60</sup>

Disamping kesatuan tentara tersebut, Kementerian Pertahanan membentuk Biro Perjuangan dibawah pimpinan Mayor Djoko Sujono. Di Jawa Tengah terdapat tujuh biro perjuangan, yang tiga di antaranya berada di sekitar daerah Merapi dan Merbabu, yaitu Biro Perjuangan XXXII, meliputi Karisidenan Semarang dipimpin oleh Let.Kol. A. Rachman, Biro Perjuangan XXIV meliputi Karisidenan Surakarta dan dipimpin oleh Sukarno. Biro Perjuangan terakhir adalah Biro Perjuangan XXVI yang meliputi Karisidenan Kedu yang dipimpin oleh Let.Kol.Sardjito.<sup>61</sup>

Pada tanggal 3 Juni 1947, berdasarkan usulan Kabinet Amir Syarifudin, Presiden menetapkan suatu ketetapan

---

<sup>59</sup> Dokumen Semdam VII Diponegoro, Tentang Maklumat No. 5 Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 1945

<sup>60</sup> Semdam VII Diponegoro, Sejarah TNI KODAM VII Diponegoro (Semarang: Jajasan Penerbit Diponegoro, 1968), h. 37

<sup>61</sup> ibid. h. 226

TC.1001 dipimpin Lettu. Mardjoeki, dengan kekuatan lima seksi, yang masing-masing seksi mempunyai anggota 40 sampai 50 orang. TC.1001 ini mempunyai daerah operasi di daerah Kec.Somowono, Bawen, Djambu dan Ambarawa. TC. 1004 dipimpin oleh Moenadi Koescemo, yang mempunyai daerah operasi di sekitar Kec.Bodja dan Sukoredjo dengan kekuatan dua seksi. TC.1009 dipimpin Lettu.Poerwoko dan Lettu Irawan, dengan kekuatan 68 orang dan beroperasi di sekitar Ungaran.<sup>63</sup>

2. MPR (Markas Pertahanan Rakyat), yang bergerak di daerah Tuntang, Beringin dan Kedungjati. Organisasi gerilya rakyat ini dipimpin oleh Mulyono, Saerodji dan Rahmad. Keberadaan mereka diakui setelah pada masa Agresi Militer Belanda ke I, mereka berhasil mengadakan sabotase terhadap pusat tenaga listrik di Djelok, Tuntang.<sup>64</sup>

3. Pasukan Merbabu. Pasukan ini terdiri tiga bagian, yaitu pasukan Merbabu I yang dipimpin oleh Sam-suri, dengan wilayah di sekitar daerah Getasan, Pasukan Merbabu II, dipimpin oleh Sastro Sadjad dan Ruslan. Pasukan ini dikenal dengan nama Pasukan BATU (Barisan Tahan Uji), dan beroperasi didaerah Tengaran. Pasukan Merbabu III, dipimpin oleh Suntoro, dengan wilayah operasi di daerah

---

<sup>63</sup> Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 107-108

<sup>64</sup> Ibid. h. 109

Karanggede.<sup>65</sup>

Selain itu, masih banyak laskar-laskar yang ada di sekitar daerah Merapi-Merbabu, yang tidak tergabung dalam Divisi IV/Panembahan Senopati. Sebagai contoh dari laskar itu adalah Barisan Osoeng-Osoeng (BOO), yang merupakan aksi rakyat terhadap Belanda dengan jalan mengadakan kekacauan di daerah pendudukan Belanda melalui pembunuhan dan merampok apa saja yang menjadi milik Belanda atau kakitangannya. Aksi ini digunakan oleh anggota Gerakan MMC dalam mengadakan teror di kalangan penduduk.<sup>66</sup>

Adanya ketetapan Presiden tentang pembentukan TNI Reguler dan adanya TNI Masyarakat, sebagai wadah laskar rakyat, ternyata menimbulkan dualisme kekuatan bersenjata di Indonesia dan juga menimbulkan permasalahan yang sulit dipecahkan. Pada saat itu, jumlah kekuatan TNI Reguler adalah sebanyak 350.000 orang, sedangkan TNI Masyarakat sejumlah 47.000 orang.<sup>67</sup> Karena keadaan ekonomi di Indonesia pada saat itu sedang sulit, maka Hatta memandang perlu untuk mengadakan rasionalisasi dalam tubuh angkatan perang. Keadaan ekonomi yang makin kacau akibat perang belum mampu untuk membiayai jumlah tentara yang begitu banyak dan Hatta juga berusaha untuk menciptakan suatu angkatan perang yang berkualitas.

---

<sup>65</sup> Ibid. h. 109. Sastro Sadjad akhirnya dikenal sebagai tokoh Gerakan MMC Tahap Kelompok Korban Rasionalisasi

<sup>66</sup> M.S. Handjojo. op cit. h. 2

<sup>67</sup> Dinas Sejarah TNI AD. Sejarah Perkembangan TNI AD (1945-1973) (Semarang: t.p., 1982), h. 47

Program rasionalisasi yang dilakukan oleh Hatta itu untuk jelasnya akan terlihat dalam kutipan sebagai berikut:

*"...Untuk mengecilkan defisit anggaran belandja negara, harus dilakukan rasionalisasi. Buruh dilapangan yang tidak produktif harus disalurkan ke lapangan yang produktif, agar pendapatan negara bertambah. Terutama di lapangan AP harus dilakukan rasionalisasi dengan garis yang jelas, karena dalam AP terdapat penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Djika tidak dimulai dengan rasionalisasi, maka negara akan mengalami inflasi yang begitu parah. Sehingga menambah kelemahan negara. Untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapat lapangan pekerjaan baru untuk dapat hidup layak. Dalam taraf pertama akan dimobilisasikan sebanyak 260.000 orang. Diharapkan akan terdapat 57.000 orang pasukan tetap, jang akan diorganisir dan dipersenjatai dengan lengkap dan dilatih dengan baik."<sup>68</sup>*

Di Jawa Tengah, program rasionalisasi yang dilakukan oleh Hatta pada bulan Mei 1948 itu, mengakibatkan banyak anggota Divisi IV/Penembahan Senopati, yang terdiri dari badan-badan perjuangan di sekitar daerah Merapi dan Merbabu seperti Pasukan Merbabu, MPR dan PGR, terkena program ini sebab mereka tidak dapat dilebur dalam TNI Reguler, hal ini disebabkan karena mereka bukanlah dari tentara yang mendapatkan dasar pendidikan kemiliteran. Umumnya mereka merasa tidak puas dan tidak bersedia mentaati program ini.

Kelompok-kelompok yang tidak puas ini, kemudian bersama kelompok lain di Surakarta, seperti PSI dan

---

<sup>68</sup> Sk. Merdeka, tanggal 27 Mei 1948, tahun ke IV no. 289. Selanjutnya lihat pula George Mc T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca: New York Cornell University Press, 1968), h. 53

Psindo, mengadakan huru-hara pada tanggal 2 Juli 1948. Huru-hara ini diawali dengan terjadinya insiden militer, yang mengakibatkan terbunuhnya Panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang bernama Sutarto. Peristiwa ini kemudian disusul dengan peristiwa Srambatan pada tanggal 13 September 1948, dan sebagai puncaknya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948.<sup>69</sup> Pemberontakan itu akhirnya dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui suatu Gerakan Militer.

Sementara itu, perselisihan antara Indonesia dengan Belanda diakhiri melalui suatu perundingan yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Pada Bab III pasal 15, 16, 17, 18 dan 19, mengenai masalah Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, dicapai persetujuan, bahwa APRIS dibentuk dengan TNI sebagai intinya, ditambah bekas anggota KNIL dan kesatuan militer bentukan Belanda lainnya.<sup>70</sup>

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) menguatkan hasil keputusan KMB tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat No.4 tahun 1950, yang dalam pasal 1 disebutkan, bahwa yang dapat diterima menjadi anggota APRIS adalah warga negara RI bekas anggota APRI dan warga negara RIS bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun

---

<sup>69</sup> Sketmasa, Kegagalan Komunis di Indonesia (Jakarta: t.p., 1950), h. 8. Lihat pula buku terbitan Dinas Sejarah TNI AD, op cit. h. 56

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit h. 254



oleh atau dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan bekas Angkatan Laut Kerajaan Belanda.<sup>71</sup>

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah RIS itu sudah barang tentu menimbulkan kekecewaan dari orang-orang yang dimobilisasikan dari keanggotaan tentara. Mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil dengan dikeluarkannya mereka dari jajaran angkatan perang, yang bagi mereka merupakan pegangan untuk dapat hidup layak. Di lain pihak mereka melihat bahwa bekas musuh mereka, seperti bekas anggota KNIL, Polisi Negara dan kesatuan militer Belanda lainnya ketika masa clash II, bergabung dalam APRIS yang seharusnya menjadi hak mereka.

Kekecewaan itu juga melanda bekas-bekas laskar di daerah di sekitar Merapi dan Merbabu, seperti sisa-sisa PGR, Pasukan Merbabu, MPR dan kesatuan-kesatuan lain. Mereka kemudian nantinya akan membentuk suatu organisasi yang kenal sebagai PKR (Persatuan Korban Rasionalisasi), suatu badan yang menampung orang-orang yang merupakan tulang punggung gerakan MMC pada masa tahap ke dua atau masa Persatuan Korban Rasionalisasi.

#### **D. Infiltrasi eks. Pelaku Pemberontakan PKI Madiun.**

Sejak munculnya komunis di Indonesia, Jawa Tengah menjadi daerah barometer dan daerah yang pernah digunakan sebagai pusat gerakan. Jawa Tengah pula, khususnya Semarang, menjadi tempat kelahiran ISDV, yang merupakan cikal

<sup>71</sup> Ibid. h. 254

bakal Partai Komunis Indonesia. Tahap awal Gerakan MMC ini diawali oleh munculnya gerakan bawah tanah komunis, yang sering disebut sebagai Organisasi Tanpa Bentuk. Adapun hal ini akan nampak dari latar belakang peristiwa gerakan di daerah tersebut.

Pada awal tahun 1948, di Surakarta diadakan pertemuan tokoh-tokoh komunis, antara lain Alimin, Aidit, Darsono, Semaun dan Lukman. Pada pertemuan itu dikeluarkan beberapa keputusan, di antaranya adalah kesepakatan untuk menentang Pemerintah RI dan menunjuk Alimin sebagai pimpinan tertinggi PKI.<sup>72</sup>

Kekuatan PKI menjadi bertambah semakin kuat, setelah kedatangan Muso dari Uni Sovyet pada tanggal 11 Agustus 1948. Muso dengan cepat berhasil menggeser tokoh-tokoh tua, seperti Amir Syarifudin (FDR) dari kepemimpinan PKI. Muso pula yang memberi corak baru perjuangan komunis di Indonesia, yaitu lebih bersifat radikal. Di bawah Muso maka PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan Pemberontakan PKI Madiun. Namun Kepemimpinan Muso itu cepat berakhir, yaitu dengan gagalnya pemberontakan PKI itu.<sup>73</sup>

Seperti kita ketahui, pemberontakan PKI Madiun yang gagal telah membawa banyak korban di pihak komunis sen-

<sup>72</sup> Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, Rangkaian Pemberontakan Komunis (Jakarta: Yudha Gama Corp, 1963), h. 8

<sup>73</sup> Muso juga pernah terlibat dalam pemberontakan komunis pada tahun 1926 dan menjadi tokoh gerakan bawah tanah komunis di Jawa Tengah pada tahun 1935

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

49

diri. Tokoh seperti Muso tewas, Amir Syarifudin ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati dan tokoh-tokoh lain seperti Lukman, Aidit, Tan Ling Djie, Alimin, Semaun, Darsono dan Setiadjud tertangkap dan dimasukkan ke penjara Wirogunan. Demikian juga anggota lain yang kurang terkenal, banyak yang terbunuh, ditawan atau melarikan diri.<sup>74</sup>

Pada saat pecah agresi Militer Belanda ke-II pada tanggal 19 Desember 1948, banyak tokoh komunis yang terpaksa dilepaskan atau melarikan diri ke daerah Merapi dan Merbabu, seperti Alimin, Setiadjud, Ali Tirta dan Ibnu Parna. Di daerah itu, mereka mengadakan *uitbuiten social* atau pendekatan sosial dan menanamkan atau memperkuat pengaruhnya dengan jalan membentuk kader.<sup>75</sup>

Doktrin partai mengajarkan kepada anggota partai untuk menjadi orang atau kelompok yang ulet dalam perjuangan. Orang komunis tidak mengenal istilah kalah atau menang, yang ada adalah sukses atau gagal. Oleh karena itu, bila suatu usaha mengalami kegagalan, maka mereka akan berusaha mengulanginya pada kesempatan lain dengan pola yang berbeda sampai usaha itu berhasil.<sup>76</sup>

Di daerah sekitar Merapi dan Merbabu itu, para tokoh komunis yang melarikan diri ternyata diterima oleh

---

<sup>74</sup> Darmawan Condrolukito, Ledakan Fitnah Subversi G 30/S/PKI (Jakarta: PT. Matoa, 1965), h. 70-72

<sup>75</sup> Disbintal Angkatan Darat Bandung, op cit. h. 1

<sup>76</sup> Suhardiman, "Bicara Soal Basket PKI", Sk. Simponi tanggal 10 Juli 1968, h. 1

masyarakat di daerah itu. Hal ini tampaknya disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah kekuasaan eks. Divisi IV/Penembahan Senopati. Seperti kita ketahui, Divisi IV merupakan salah satu kekuatan bersenjata yang mendukung pemberontakan FKI Madiun. 77

Melalui gerakan bawah tanah, mereka mencari dan berusaha menarik orang-orang yang tersingkir dan orang-orang yang dikecewakan pemerintah ke dalam kelompok komunis. Untuk itu, simpatisan komunis mencari sasaran ke daerah-daerah dari perkotaan, yang meliputi pabrik-pabrik, pelabuhan, pasar bahkan instansi pemerintah, sampai daerah pegunungan. Kegiatan rekrutmen yang dilakukan di daerah Merapi dan Merbabu pada saat itu adalah sangat tepat, mengingat di daerah itu masyarakat sedang diliputi oleh rasa kecewa terhadap kebijaksanaan pemerintah, seperti pengambilan kembali tanah garapan sebagai akibat persetujuan KMB dan rasionalisasi tentara.

Seperti yang kita ketahui, bahwa komunis selalu meletakkan pemerintah sebagai pihak yang merugikan rakyat dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang diderita oleh rakyat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila simpati rakyat terhadap orang yang mau memperjuangkan kepentingannya menjadi semakin besar. Di lain pihak mulai tumbuh rasa benci rakyat terhadap pemerintah, yang dianggap telah merugikannya, sebagai contoh kita lihat masalah yang terjadi di daerah Boyolali-Kla-

---

77 LSIK, op cit. h. 35

ten, yaitu masalah pemilikan tanah bekas onderneming Belanda, yang diperebutkan antara petani dan pemerintah. Selain itu masalah yang terjadi di daerah Semarang, yaitu masalah rasionalisasi.

Akhirnya berhasil diorganisir para petani, perampok, bekas pejuang dan pengangguran dalam suatu bentuk organisasi bawah tanah. Tahap awal gerakan bawah tanah itu diwarnai dengan aksi teror, seperti pembunuhan, perampokan dan sebagainya, agar kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin merosot.

Berdasarkan pada latar belakang inilah kita dapat melihat bahwa Gerakan MMC yang muncul di Jawa Tengah adalah suatu proses yang panjang dari kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, yang diungkapkan dalam aksi-aksi kekerasan dan agitasi.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## B A B III

### JALANNYA GERAKAN MMC TAHAP KELOMPOK JAGO

#### A. Diskripsi Umum Wilayah Gerakan MMC

Sebagaimana suatu gerakan lokal, maka Gerakan MMC tidak terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah, melainkan hanya terbatas di daerah-daerah sekitar pegunungan Merapi dan Merbabu saja yaitu meliputi kabupaten Boyolali, Semarang, Salatiga dan Magelang.

Lokasi dan pengembangan wilayah gerakan yang digunakan oleh Gerakan MMC, biasanya tergantung pada pimpinan dan kelompok yang mendominasi dalam gerakan tersebut. Perlu diketahui, bahwa dalam Gerakan MMC terdapat dua tahap yang dibedakan oleh waktu, kepemimpinan, keanggotaan dan organisasinya.

Pada masa awal munculnya Gerakan MMC yang didominasi oleh kelompok Jago, daerah yang digunakan oleh kelompok ini adalah daerah kabupaten Boyolali dan Klaten.<sup>76</sup> Daerah operasinya di sekitar gunung Merapi, yang merupakan perbatasan antara dua kabupaten tersebut. Pada daerah kab. Klaten lokasinya terbatas di daerah sekitar hutan Tutupan, kec. Kemalang, Karanganyar dan Brintik. Sedangkan di kab. Boyolali daerah yang dipergunakan meliputi daerah

<sup>76</sup> Kabupaten Boyolali terletak di antara 110.22-110.50 Bujur Timur dan 7.36-7.71 Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi kab. Grobogan, sebelah selatan kab. Klaten dan Sukoharjo, sebelah Barat kab. Semarang dan Magelang, sebelah Timur Surakarta dan Karanganyar. Luas wilayah Boyolali adalah 10.4980.7420 ha. Selanjutnya lihat Kantor Statistik Pemda Boyolali, Statistik Kab. Daerah Tingkat II Boyolali Boyolali, 1974, h. 4

kec. Musuk, Cepogo, Ampel, Selo dan sebagian kecil Banyudono.<sup>77</sup>

Dipilihnya daerah tersebut sebagai daerah basis dan daerah operasi Gerakan MMC, ternyata sangat menguntungkan bagi perkembangan Gerakan MMC. Faktor itu disebabkan karena daerah-daerah tersebut telah mereka tempati sejak jaman pendudukan Belanda. Faktor lain adalah daerah di sekitar gunung Merapi itu terdapat hutan yang masih lebat, jurang-jurang yang dalam, lereng yang terjal dan jauh dari jangkauan pihak yang berwajib. Keadaan alam yang demikian ini sangat baik untuk bersembunyi dan mengadakan pencegahan terhadap patroli aparat keamanan. Satu hal penting yang banyak mendukung gerakan ini adalah daerah ini merupakan daerah perkebunan partikelir yang masih diperebutkan antara petani dengan pemerintah. Seperti yang telah disebut di depan, bahwa salah satu hasil dalam KMB adalah pengembalian perkebunan milik Belanda yang sudah diambil oleh rakyat. Akibat pengembalian tanah pertanian itu, rakyat yang sudah mendapatkan tanah menjadi kecewa dan mudah termakan agitasi. Itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa rakyat ada yang membantu Gerakan MMC.

---

<sup>77</sup> Kec. Musuk mempunyai ketinggian 700 meter dari permukaan air laut, dengan luas wilayah 63,36 km<sup>2</sup>. Kec. Ampel mempunyai ketinggian 1300 meter, dengan luas wilayah 90,391 km<sup>2</sup>. Kec. Selo mempunyai ketinggian 1500 meter, dengan luas 56.0774 km<sup>2</sup> dan kec. Cepogo berada di ketinggian 1450 meter, dengan luas wilayah 52.9979 Km<sup>2</sup>. Selanjutnya lihat Kantor Departemen Penerangan Boyolali, Data dan Peta Wilayah Kabupaten Boyolali Boyolali, 1972, h. 4-8

Wilayah operasional Gerakan MMC mengalami pengembangan ke arah utara, yaitu ke arah daerah gunung Merbabu. Pengembangan ini tampaknya untuk mengimbangi tekanan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan (baca: polisi dan tentara). Adanya tekanan dari aparat keamanan, maka Gerakan MMC mulai memasuki daerah Sumberedjo, Bandungan, Kenteng dan Candi yang termasuk daerah Salatiga, serta memasuki pula daerah Ngablak, Kedu dan Sawangan yang termasuk daerah kab. Magelang. Daerah ini dipilih oleh Gerakan MMC karena mempunyai situasi dan kondisi yang sama persis dengan daerah sebelumnya.<sup>78</sup>

Munculnya kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR) sebagai tulang punggung Gerakan MMC tahap kedua, mengakibatkan daerah operasi Gerakan MMC memusat di daerah utara, yaitu di daerah sekitar gunung Merbabu. Daerah yang dipilih sebagai basis adalah daerah kab. Semarang. Seperti halnya kelompok Jago, mereka juga tidak menggunakan seluruh wilayah kab. Semarang, melainkan daerah yang dianggap menguntungkan bagi kelangsungan gerakan. Daerah yang dipilih itu meliputi daerah Susukan, Tuntang, Getasan, Sumowono, Banyubiru, Karangjati, Ambarawa, sebagian Ungaran dan daerah Salatiga. Daerah Salatiga juga tidak seluruhnya berhasil dikuasai oleh Gerakan ini. Hanya di daerah-daerah seperti kec. Bringin, Kopeng dan Salatiga bagian barat saja yang berhasil dipengaruhi oleh Gerakan MMC. Sementara daerah Ambarawa yang berhasil

---

<sup>78</sup> Hardjodijono, Wawancara tanggal 20 Juni 1992



dikuasai adalah daerah sekitar Jambu, Dliman dan Rawa Pening.<sup>79</sup>

Setelah berhasil menghimpun kekuatan, maka Gerakan MMC mengadakan perluasan wilayah operasinya sampai daerah kab. Magelang, yang meliputi daerah Ngablak, Kedu dan sawangan. Ketiga daerah ini yang terletak di bagian barat gunung Merapi dan Merababu, dikenai sebagai daerah bekas onderneming tembakau.<sup>80</sup>

Demikian sekilas tentang gambaran wilayah operasi Gerakan MMC. Dari uraian di atas, dapat dilihat adanya persamaan type daerah yang digunakan oleh Gerakan MMC baik dari kelompok Jago maupun kelompok PKR. Persamaan tersebut adalah : Pertama, daerah Gerakan MMC memiliki kondisi dan letak geografis yang sama, yaitu di daerah dataran tinggi yang mempunyai hutan lebat, lereng-lereng terjal dan jurang yang dalam. Kondisi medan yang demikian ini sangat menguntungkan Gerakan MMC untuk dapat meyembunyikan diri dari kejaran aparat keamanan dan dapat memudahkan mereka untuk mengadakan pencegatan terhadap patroli keamanan. Kedua, daerah gerakan ini pada umumnya terletak di daerah terpencil, sehingga jauh dari pengawasan pemerintah. Ketiga, daerah yang dipilih sebagai basis, umumnya sedang dilanda rasa kecewa terhadap pemerintah. Seperti yang telah diketahui, daerah sekitar gunung Merapi dan Merbabu pada saat itu sedang dilanda

---

<sup>79</sup> J. Sarwono, Wawancara tanggal 1 Agustus 1992

<sup>80</sup> A.P. Soeripto, Wawancara tanggal 2 Agustus 1992

masalah yang sangat pelik. Daerah sekitar Merapi, seperti Boyolali dan Klaten terdapat permasalahan tanah bekas onderneming Belanda antara petani dengan pemerintah. Sedangkan daerah sekitar Merbabu terdapat masalah berupa rasa kecewa dari bekas anggota laskar rakyat yang terkena program rasionalisasi.

## B. Gerakan MMC Masa Kelompok Jago

### 1. Kepemimpinan

Dalam Gerakan MMC, terdapat suatu perbedaan dalam segi kepemimpinan antara mereka yang bergerak di daerah Boyolali-Klaten dengan yang bergerak di daerah Semarang. Di daerah Boyolali-Klaten kepemimpinan dipegang oleh kelompok Jago, sedangkan di Semarang kepemimpinan dipegang oleh kelompok Bekas Pejuang. Hal ini agaknya sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Kartini Kartono tentang kepemimpinan, yang dikatakannya sebagai berikut :

*"...pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan khusus dan kelebihan tertentu, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi tercapainya tujuan tertentu. Selain dari pada itu, pada umumnya seorang pemimpin memiliki beberapa sifat superior dalam arti melebihi kawan yang lainnya."<sup>31</sup>*

Diakuninya golongan Jagoan atau pendekar dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, tampaknya sudah membudaya dalam masyarakat tradisional Indonesia. Pada jaman dahulu, kalangan priyayi Jawa menganggap bahwa wahyu dan

<sup>31</sup> Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: CV.Rajawali, 1984), h. 14-16

pulung (semacam sinar yang mempunyai kekuatan magis) berperan penting dalam menentukan kharisma pemimpin. Di daerah pedesaan, sering dijumpai adanya seorang pemimpin memegang pengaruh atas dasar adanya kekuatan magis ataupun olah kanuragan.<sup>82</sup> Umumnya hal yang berkaitan dengan olah kanuragan banyak dipelajari oleh kaum Jagoan. Masyarakat pedesaan yang sederhana, umumnya menganggap kekebalan tubuh lebih jauh lebih penting dari pada wahyu atau pulung dan mereka dituntut untuk memiliki daya kekebalan tubuh yang dapat membuktikan bahwa mereka kebal terhadap peluru, senjata tajam bila ingin diakui dalam masyarakat. Adanya penguatan dari masyarakat terhadap kelebihan yang mereka miliki, membuat mereka dengan mudah dapat menduduki kursi kepemimpinan.<sup>83</sup> Sehingga didapatkan suatu definisi, bahwa yang dimaksud dengan Jago adalah seseorang yang mempunyai kekuatan lebih, yang dikarenakan magis atau kesaktian. Biasanya orang yang mempunyai kelebihan ini cenderung hidupnya penuh dengan tantangan.

Kepercayaan masyarakat terhadap para Jagoan menyebabkan kadang-kadang mereka menganggapnya sebagai pelindung. Mereka seringkali muncul sebagai pemimpin gerakan protes di pedesaan, khususnya dalam menghadapi masalah ketidakadilan dari pihak penguasa. Dalam kasus-kasus semacam ini, rakyat mengharap peranan para Jago untuk

---

<sup>82</sup> Zussane Keller, Penguasa dan Kelompok Elite (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 14-16

<sup>83</sup> Onghokham, Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 1

dapat mengurangi beban mereka.<sup>84</sup>

Kondisi yang semacam itu dapat kita hubungkan dengan kehadiran para Jago di sekitar daerah-daerah perkebunan di kecamatan Musuk, Boyolali yang meliputi daerah Sukorame, Malangbong dan Barostampir, yang seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 1950 mengalami kericuhan dalam masalah tanah. Sedemikian jauh tindakan rakyat yang mendukung Gerakan MMC tidak terlepas dari dukungan para Jago, seperti Darmopendot, Kampret, Ngusman Ali, Hardjo Bagong dan lain sebagainya.<sup>85</sup>

Hadirnya tokoh Suradi Bledog, seorang jago yang dipercaya mempunyai ajimat dan kesaktian kebal terhadap senjata, ternyata berhasil menyatukan para jagoan untuk bergabung dalam suatu gerombolan. Sejak Suradi lepas dari penjara Klaten, ia berhasil menyatukan dan menghimpun puluhan bahkan ratusan jagoan yang terdiri dari grayak, garong, rampok dan lain sebagainya, seperti yang diutarakan dalam Laporan Kepala Polisi Luar Klaten sebagai berikut :

*"...pada tiap-tiap 10 atau 15 hari sekali, diadakan rapat yang dipimpin oleh Suradi Bledog, dan dikunjungi oleh lebih kurang 100 orang grajak.."*<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> ibid. h. 10

<sup>85</sup> Dokumen Angkatan Darat Resimen Inf./Sub.Ter. 13 Div. Pangeran Diponegoro, Verslag Rapat Merapi-Merbabu Complex tanggal 25 Agustus 1952, h. 1

<sup>86</sup> Dokumen Semdan VII Diponegoro, Laporan Kepala Polisi Luar Kota Klaten Semarang, tanggal 27 Desember 1950

Dari uraian yang telah diutarakan oleh Kepala Polisi Luar kota Klaten tersebut, dapat diketahui bahwa kehadiran tokoh jago, yaitu Suradi Bledog sebagai seorang tokoh yang kharismatik, yang ditunggu-tunggu oleh kaum Jagoan maupun oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya.

## 2. Organisasi dan Daerah Operasi

Dengan terbentuknya Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), suatu bentuk organisasi sel komunis pada awal tahun limapuluhan, maka kelompok komunis berusaha mengagitasi kelompok-kelompok dan orang-orang yang tersingkir dan yang merasa kecewa terhadap pemerintah untuk dapat ditarik bergabung ke pihaknya. Melalui propaganda seperti menentang KMB dan penanaman modal asing, membasmi sisa feodal di desa-desa dan sebagainya. Dari propaganda tersebut, golongan komunis mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat di daerah sekitar gunung Merapi dan Merbabu.<sup>87</sup>

Gerakan MMC kelompok Jago ini tampaknya mendapat dukungan dari kekuatan asing yang sengaja menggerakkannya dengan mempunyai maksud tertentu. Hal ini jelas diungkapkan dalam laporan Kepala Polisi Luar Kota Klaten yang menyatakan sebagai berikut :

*"...Setiap kali datang ke sana, Belanda itu berpakaian preman dan semuanya bersenjatakan revolver. Adapun Belanda jang mengunjungi terdiri dari 3 orang*

<sup>87</sup> Prof. AZ. Abidin, SH. dan Prof. Dr. Baharudin Lopa, Bahaya Komunisme (Djakarta: Bulan Bintang, 1968), 149

*Belanda dan 2 orang Ambon. Belanda itu kalau datang naik Jeep letter H, tetapi nomernya tidak jelas, catnya warna hijau dan tiap kali datang ke sana, jeep itu diberhentikan di Paras/Tampir, selanjutnya Belanda tersebut berjalan kaki ke sana. Dalam setiap rapat orang Belanda itu tidak berhadapan langsung dengan gerombolan grajak, tetapi mengadakan perundingan sendiri dengan Suradi, yang hasilnya disiarkan Suradi kepada para anggota untuk dikerjakan. Diantara perintah yang diberikan adalah supaya para anggota mengambil lembu untuk dikirim ke Semarang. Kira2 tiga bulan yang lalu, Belanda tersebut telah mengirim pada Suradi sejumlah 23 pucuk karaben dan 2 sten gun."*<sup>88</sup>

Melalui laporan di atas, kita dapat mengetahui bahwa terdapat kerja sama antara Suradi dan Belanda dengan motif yang sama. Di satu pihak, Belanda berusaha memanfaatkan gerombolan agar pihak Belanda dapat mengelola kembali onderneming berdasarkan persetujuan KMB. Berkaitan dengan hal itu, adanya permintaan Belanda untuk merampas lembu milik petani sebagai ganti pemberian senjata, mempunyai tujuan jelas untuk mengacau kehidupan ekonomi petani. Sebagaimana kita ketahui, bahwa lembu bagi petani merupakan tenaga pengganti manusia dalam mengolah tanah. Hilangnya tenaga pengganti akan menyebabkan produktifitas petani akan merosot, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali bekerja pada pengusaha partikelir.

Bagi Gerakan MMC, kerja sama ini sangat menguntungkan mereka karena mereka dapat menambah kekuatan mereka dengan senjata yang diperolehnya melalui barter dengan Belanda. Semakin lengkap persenjataannya, maka lebih me-

<sup>88</sup> Dokumentasi Semdam VII Diponegoro, *op cit.* Lihat pula Sejarah Militer DAM VII/DIP., Sejarah TNI AD KODAM VII/ Diponegoro (Semarang: t.p., 1971), h. 32

mungkinkan Gerakan MMC untuk melakukan aksi terornya, menghadapi pihak aparat keamanan dan lain sebagainya.

Pihak komunis dapat menarik keuntungan dari situasi yang kacau, karena pihak komunis selalu berusaha untuk menciptakan suasana kacau menjadi semakin kacau. Bila dikaitkan dengan pengambilan sapi atau lembu milik masyarakat tani, jelas akan menimbulkan suasana ekonomi kacau, keresahan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat akan pemerintah. Dalam situasi yang demikian ini pengaruh komunis akan dapat tumbuh dengan subur melalui agitasi dan propaganda.

Adanya kesesuaian tujuan di antara kelompok Jago, Komunis dan Belanda, maka mereka kemudian bekerja sama dan terbentuklah suatu gerakan bawah tanah bersenjata di sekitar gunung Merapi. Di bawah pimpinan Suradi Bledog berhasil digorganisir kelompok-kelompok grayak, rampok dan sebagainya, seperti:

1. Gerombolan Ciptosardju, yang berpusat di Cepogo yang daerahnya meliputi seluruh daerah Merapi dan Merbabu.
2. Gerombolan Kudo, Joso dan Amat, yang bergerak secara mobil di daerah Boyolali dan Klaten.
3. Gerombolan Bejo, yang berkedudukan di Djatinom, kab Klaten.
4. Gerombolan Kertapaing, yang berkedudukan di ds. Kajumas, kec. Djatinom, kab. Klaten.
5. Gerombolan Sukarmin, yang bergerak di daerah

Banyudono sampai Ampel.

6. Gerombolan Tjipto, yang bergerak di sekitar hutan Surowono, kab. Boyolali.<sup>89</sup>

Sebagaimana organisasi bawah tanah atau organisasi sel, maka di antara mereka selalu ada hubungan antara satu dengan yang lainnya dan ada kalanya dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, sebagai contoh adalah gerombolan Tjiptosardju yang membawahi tiga kelompok kecil, seperti kelompok Sudjud Kridosardjono di Salatiga, Walujo Muksin di Ungaran dan Multajat di Magelang - Boyolali-Salatiga.<sup>90</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada Gerakan MMC kelompok Jago ini bentuk organisasinya masih merupakan bentuk organisasi gerakan yang sangat sederhana. Dikatakan sederhana karena gerakan ini dalam pengorganisasiannya belum mendasarkan pada tujuan yang hendak dituju, belum mempunyai aturan-aturan dasar atau yang lebih tepat belum mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal ini akan lebih jelas bila kita bandingkan dengan Gerakan MMC pada tahap Kelompok Korban Rasionalisasi, yang sudah menata organisasinya dengan lebih mapan.

Daerah yang dipilih sebagai daerah operasi adalah daerah yang terdapat di sekitar gunung Merapi, yang

<sup>89</sup> Disbintal Angkatan Darat, *op cit.* h. 4

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 5



meliputi daerah kab. Boyolali dan Klaten dengan pusat gerakan di daerah Musuk dan hutan Surowono. Selain itu, Gerakan MMC tahap Kelompok Jago juga menyebarkan pengaruhnya di daerah sekitar gunung Merbabu, yang meliputi daerah semarang dan Salatiga, sehingga terjalin hubungan antara Gerakan MMC kelompok Jago dengan anggota bekas Laskar Rakyat yang terkena program Rasionalisasi, yang nantinya akan membentuk Gerakan MMC tahap kedua.

### 3. Jalannya Gerakan MMC Kelompok Jago

Jauh sebelum muncul tokoh Suradi Bledog, gerombolan grayak di sekitar daerah Merapi sudah menunjukkan eksistensinya, khususnya dalam kegiatan mengadakan perampokan dan penggarongan di berbagai daerah sekitar pegunungan Merapi. Sebagai daerah gerakan mereka pilih daerah kawasan hutan dan pegunungan, seperti daerah hutan Tutupan, Surowono dan Kemalang, yang sudah mereka kuasai daerahnya sejak masa perang kemerdekaan. Bagi Gerombolan rampok, medan ini merupakan tempat yang ideal untuk menyembunyikan diri, pelarian dan menghadang patroli keamanan yang berusaha mengejar mereka.

Pada awal mulanya, sasaran gerakan mereka hanya ditujukan untuk mengadakan perampasan dan perampokan terhadap hewan piaraan penduduk, seperti sapi, kerbau, kambing dan kuda. Sebagai contoh adalah perampokan yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 1950, terhadap 67 rumah penduduk di dukuh Windhu Sebrang, Sranden dan Gratos kec. Musuk, kab. Boyolali, Dalam peristiwa perampokan itu

mereka mengambil 40 ekor sapi, 12 ekor kuda dan 12 ekor kambing, sementara itu mereka juga merusak barang-barang yang tidak dapat mereka bawa dan membakar 2 buah rumah penduduk.<sup>91</sup>

Sejak itu perampokan merajalela, sehingga membawa akibat muncul rasa ketakutan dari para pemilik ternak dan petani kalau suatu saat mereka akan menjadi sasaran perampokan. Adakalanya perampokan dilakukan secara berani dan terang-terangan pada suatu siang dengan mendatangi suatu perkampungan atau dusun ataupun desa. Mereka lalu memerintahkan penduduk untuk mengumpulkan hewan piaraan dan kemudian membawanya. Demi keselamatannya, maka penduduk terpaksa mentaati perintah mereka.<sup>92</sup>

Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Militer Wilayah Surakarta, akhirnya mengambil suatu keputusan setelah melihat adanya perampokan di kec. Musuk dengan mengadakan suatu operasi pembersihan di sekitar hutan Surowono. Dalam operasi yang dilakukan dibawah pimpinan Kapten Tjipto pada tanggal 1 sampai dengan 5 April 1950, telah berhasil menangkap 5 orang benggol grayak yang beroperasi di sekitar kec. Musuk.<sup>93</sup>

Penangkapan terhadap 5 orang benggol grayak itu, ternyata tidak menimbulkan jera di kalangan gerombolan

---

<sup>91</sup> Perampokan Besar di Boyolali, Suara Rakyat tanggal 21 Januari 1950

<sup>92</sup> Hardjodijono, Wawancara tanggal 20 Juni 1992

<sup>93</sup> Operasi terhadap Gerombolan Grajak; 5 Orang Benggol Tertangkap, Sk. Merdeka tanggal 7 April 1950

grayak. Sebaliknya mereka menjadi semakin berani melakukan aksinya dan mengadakan hasutan-hasutan, bahwa kedatangan polisi dan tentara adalah untuk merusak serta akan mengambil kembali tanah dan rumah penduduk di sekitar onderneming. Agitasi itu ternyata berhasil menarik simpati dan dukungan rakyat. Hal itu dapat dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang berlangsung berikutnya.

Penangkapan terhadap 5 benggol grayak itu mengakibatkan timbul protes dikalangan rakyat di kec. Musuk. Pada tanggal 6 April 1950, sekitar pukul 10.00 WIB, Asisten Wedono kec. Musuk Mantyo Pranoto dengan didampingi oleh 5 orang polisi, berusaha memberikan penerangan kepada rakyat. Akan tetapi sambutan rakyat terhadap penjelasan ini tampaknya sangat tidak bersahabat. Rakyat tidak percaya akan penjelasan pemerintah, bahkan mengadakan demonstrasi. Pada saat berdemonstrasi mereka mengacung-acungkan arit, klewang, parang dan senjata tajam lainnya dan mereka menuntut agar rumah dan tanah mereka tidak diambil dan 5 orang grayak yang ditangkap supaya dibebaskan.<sup>94</sup>

Pada saat suasana menjadi sangat kacau, polisi yang mengawal Mantyo Pranoto melepaskan tembakan untuk membubarkan massa yang berjumlah lebih kurang 1000 orang. Tembakan yang dilakukan polisi itu ternyata membawa akibat tewasnya seorang penduduk dan seorang lagi mende-

---

<sup>94</sup> Kepala Rampok menghasut rakyat, Sk. Merdeka tanggal 8 April 1950. Keterangan serupa diberikan oleh Hardjodijono, Wawancara tanggal 20 Juni 1992

rita luka berat. Ditengah kegaduhan itu, beberapa orang grayak yang menyamar di tengah-tengah massa, berhasil menculik Mantyo Pranoto dan dibawa lari ke desa Djemowo. Demi keselamatan jiwa Asisten Wedono itu, akhirnya dicapai kesepakatan untuk melepaskan kelima orang grayak yang ditawan sebagai ganti Asisten Wedono itu.<sup>95</sup> Dari kejadian itu, terbukti bahwa rakyat telah termakan hasutan dan berhasil diperalat oleh grayak. Tampaknya rakyat mau mendukung mereka itu dikarenakan adanya ancaman yang dilakukan oleh gerombolan yang tidak segan-segan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.

Peristiwa penyekapan Asisten Wedono Musuk yang dilakukan oleh gerombolan grayak menjadi bukti bahwa mereka juga berani melawan aparat pemerintah yang berusaha melawan mereka dan keberhasilan itu membuat mereka semakin berani mengadakan aksi-aksinya. Hal ini membuat aparat desa semakin terjepit. Di satu pihak mereka merasa terancam oleh gerombolan grayak, bila melaporkan pada aparat keamanan, terlebih-lebih gerombolan juga mempunyai jaringan mata-mata yang mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa. Tetapi dilain pihak ia juga mendapatkan tekanan dari aparat keamanan untuk memberikan informasi guna melaksanakan operasi pembersihan. Tidak jarang aparat desa memberikan suatu laporan palsu demi keamanan dirinya, sehingga menyulitkan dari aparat keamanan untuk mengadakan aksi-aksi pembersihan. Karena merasa

---

<sup>95</sup> Hardjodijono, Wawancara tanggal 20 Juni 1992

takut, maka beberapa lurah telah mengabungkan diri pada mereka. Adapun tugas lurah adalah memberi surat-surat ijin penjualan sapi hasil perampokan.<sup>96</sup>

Sikap apatis dari aparat desa di daerah Musuk, membuat gerombolan rampok semakin berani dalam menjalankan aksinya. Kegiatan perampokan tidak hanya ditujukan pada ternak saja, melainkan juga ditujukan pada uang dan perhiasan, sehingga rakyat semakin dicekam oleh perasaan takut.

Untuk memperkuat persenjataannya, maka gerombolan menyerang kantor-kantor polisi di daerah kab. Boyolali, seperti pada tanggal 18 Juli 1950, mereka menyerang kantor Polisi di kec. Ampel. Dalam penyerangan itu mereka berhasil membawa kabur beberapa pucuk senjata api dari kantor polisi Ampel.<sup>97</sup> Penyerangan terhadap kantor polisi itu menunjukkan suatu bukti bahwa mereka berani menentang aparat keamanan yang selama ini dianggapnya sebagai penghalang dari perjuangannya.

Selain menyerang penduduk dan aparat keamanan, gerombolan grayak juga mengadakan serangan terhadap golongan agama, yang dalam hal ini adalah golongan agama Islam. Pada tanggal 11 November 1950, di desa Putat, kec. Karanganyar, kab. Klaten, terjadi perampokan di rumah Darmosuwiryo, salah seorang tokoh Masyumi yang kaya dan mempunyai pengaruh yang luas di kalangan masyarakat.

---

<sup>96</sup> Disbintal Angkatan Darat Bandung, op cit. h. 3

<sup>97</sup> M.S. Handjojo, op cit. h. 4

Dalam perampokan ini Darmosuwiryo ditembak mati dan semua buku-buku yang bertuliskan Arab dibakar. Pada Tanggal 31 Desember 1950, terjadi perampokan di rumah Ali Maksum dan Muhamad Busro yang merupakan tokoh Masyumi di desa Sawahan, kec. Polanhardjo, kab. Klaten. Dalam perampokan ini mereka melukai Ali Maksum dan membakar semua kitab suci Al Qur'an. Pada Tanggal 16 Januari Mustadjab dari ds. Beku kec. Karanganom, kab. Klaten dirampok dan dalam perampokan itu gerombolan melempar-lemparkan kitab suci Al Qur'an sambil mengeluarkan kata-kata yang menghina agama. <sup>98</sup>

Kejadian ini menunjukkan suatu bukti, bahwa selain mengadakan suatu aksi perampokan mereka juga mengadakan permusuhan terhadap golongan agama Islam yang dianggapnya sebagai suatu lawan yang harus dihancurkan. Kalau kita hubungkan dengan ajaran komunis, maka akan tampak jelas sekali bukti bahwa mereka melaksanakan salah satu ajaran dari komunis. Komunis selalu menganggap bahwa agama merupakan candu masyarakat yang harus diberantas penyebabnya. <sup>99</sup>

Semenjak Suradi Bledag berhasil melarikan diri dari penjara Klaten pada pertengahan bulan Desember 1950 dan diangkat menjadi pemimpin gerombolan Jago, maka gerakan dari gerombolan Jago semakin meningkat seiring dengan

---

<sup>98</sup> Disbintai Angkatan Darat Bandung, op cit. h. 3

<sup>99</sup> Prof. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Baharudin Lopa, op cit., h. 145-150

meningkatnya bantuan yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang berdiri di belakangnya, yaitu Belanda dan Komunis.

Setelah berhasil menyusun kekuatan baru, Suradi Bledag kemudian memperluas daerah operasinya sampai ke Magelang dan Salatiga. Sejak itu kriminalitas di sekitar Merapi dan Merbabu meningkat secara pesat. Aksi mereka tidak terbatas pada perampokan, tetapi mulai mengadakan pendaulatan terhadap sejumlah aparat pemerintahan dan memungut pajak terhadap rakyat di daerah kec. Musuk, Cepogo, Modjosongo dan Klaten bagian barat.

Dalam rapat di Tjlungtung, kec. Musuk, dicapai suatu kesepakatan untuk mendirikan suatu pemerintahan sendiri yang meliputi daerah kec. Musuk, Cepogo, Modjosongo dan Klaten bagian barat.<sup>100</sup> Yang dimaksud dengan mendirikan suatu pemerintahan sendiri adalah mereka ingin membentuk suatu daerah yang dipimpin oleh mereka sendiri, atau minimal oleh orang-orang yang bersimpati dengan mereka.<sup>101</sup> Sejalan dengan rencana pendaulatan itu, maka mereka berusaha menghimpun massa dari golongan petani. Agitasi yang mereka lancarkan adalah dengan menyebarkan isu bahwa kehadiran TNI adalah untuk meminta kembali tanah yang telah mereka garap. Selain itu mereka juga memaksa lurah atau kepala desa untuk mau mengadakan kerja sama dengan mereka.

---

<sup>100</sup> Disbintal Angkatan Darat Bandung, *op cit.* h. 3

<sup>101</sup> Soebadi Hardjoloekito, *Wawancara* tanggal 26 Juli 1992

Saat itu gerombolan telah menyusun rencana untuk mendirikan pemerintahan sendiri yang meliputi kec. Cepogo di bawah pimpinan Tjiptosardju, kec. Musuk di bawah pimpinan Surosuwono, kec. Modjosongo di bawah pimpinan Sukarmin, kec. Polanhardjo di bawah pimpinan Kudo dan kec. Karangnongko di bawah pimpinan Bedjo. Sementara itu pucuk piminan dipegang oleh Suradi Bledog yang berkedudukan di Surowono, kec. Musuk, kab. Boyolali.<sup>102</sup>

Selain mengadakan pendaulatan di wilayah yang dikuasainya, mereka juga mengadakan pungutan pajak sebagai ganti uang jaga keamanan, yang jumlahnya ditentukan sebesar 10.00 sampai 50.00 sen. Hasil dari pungutan itu digunakan oleh Suradi untuk membeli senjata api.<sup>103</sup> Dengan demikian jelas bahwa penarikan pajak dengan dalih membeli senjata demi keamanan desa, ternyata digunakan untuk mempersenjatai pihak gerombolan untuk menunjang aksi pendaulatan dan perampokan. Sehubungan dengan rencana pendaulatan, maka Gerakan MMC semakin berani menunjukkan aksinya. Mereka tidak lagi menghindari dari kejaran patroli keamanan, tetapi justru berani menghadapinya dan hal itu terbukti dengan keberaniannya melakukan penghadangan terhadap patroli aparat keamanan.

Pada tanggal 27 Januari 1951, mereka menghadang patroli tentara yang terdiri dari satu regu dari Batalyon 417 beserta 2 orang CPM dan 30 orang anggota MB (Mobile

102 Disbintal Angkatan Darat Bandung, op cit. h. 4

103 Ibid. h. 3



Brigade, atau yang sekarang sering disebut Brigade Mobil dari kesatuan Polisi), yang pada saat itu sedang mengadakan patroli di daerah desa Surowono. Dalam pencegahan itu, patroli tentara terpaksa melarikan diri karena mendapat serangan dari rakyat yang bersenjatakan tongkat dan senjata tajam, bahkan beberapa di antaranya bersenjata api. Dalam serangan ini patroli mengalami kerugian sebuah sten gun dari tentara, sebuah senapan milik anggota MB dan seorang polisi mengalami luka-luka.<sup>104</sup>

Bersamaan dengan itu, markas MB di Karangnongko juga diserbu oleh gerombolan pengacau sehingga 24 orang tawanan yang ditawan di markas tersebut terlepas, 3 pucuk sten gun, 20 mouser dan sebuah pistol berhasil dirampas. Pada Tanggal 29 Januari 1951, dalam serbuan lagi ke markas MB di Karangnongko, seorang anggota MB berhasil diculik dan dibunuh oleh oleh pihak gerombolan. Sementara itu, kerugian di kalangan gerombolan adalah 16 orang tertembak mati dan 9 orang lainnya luka-luka dalam serbuan itu.<sup>105</sup>

Sebegitu kacaunya situasi di sekitar gunung Merapi dan sebagian Merbabu, sehingga selama bulan November 1950 di daerah kabupaten Boyolali terjadi kejahatan sebanyak 473 kali, bulan Desember 1950, terjadi 249 kali tindak kejahatan, pada bulan Januari 1951 meningkat menjadi 709 kali. Di daerah Klaten pada bulan Desember

104 Semdam VII Diponegoro, op cit. h.33

105 ibid. h. 33

1950 terjadi kejahatan sebanyak 379 kali, bulan Januari terjadi 381 kali dan bulan Pebruari sebanyak 148 kali.<sup>106</sup>

#### 4. Akhir Gerakan MMC Kelompok Jago

Adanya keresahan dan ketakutan yang melanda masyarakat sebagai akibat adanya perbuatan teror yang dilancarkan oleh gerombolan grayak, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melawan dan menghancurkan gerombolan ataupun gerakan yang mengadakan pengacauan keamanan dengan mempergunakan kekuatan bersenjata.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 September 1950 mengeluarkan Surat Perintah Siasat Komando Sub. III No. 0293/PS.44/SF. III/10-50, yang berisi perintah kepada TNI untuk mengadakan operasi pembersihan secara serentak. Diputuskan pula dalam surat perintah itu untuk memberi bantuan keamanan dalam setiap daerah sekitar Merapi-Merbabu berupa Militaire Bijstan atau bantuan personil militer, yang diambil dari dua Batalyon TNI yaitu Batalyon 418, di bawah pimpinan Kapten Sumarto yang ditempatkan di daerah kab. Boyolali. Kesatuan TNI yang lain adalah Batalyon 417, di bawah pimpinan Mayor Suharto yang ditempatkan di kab Klaten. Batalyon 417 ini dibagi menjadi 2 bagian yang membawahi daerah-daerah. Daerah A, meliputi daerah Klaten ke selatan sampai Prambanan, dibawah Komando Kompi III Suhirman dan daerah B, yang

<sup>106</sup> Daerah Merapi, Daerah Rawan Kejahatan, Sk. Kedaulatan Rakjat, tanggal 21 Februari 1951

meliputi daerah Kleten ke Utara sampai Kartosuro, dibawah pimpinan Komando Kompi Sugino.<sup>107</sup>

Meskipun operasi dilaksanakan oleh TNI secara menyeluruh, namun belum memberikan suatu hasil yang memuaskan. Hal ini tampaknya disebabkan oleh adanya sikap rakyat yang apatis, sikap para pamong desa yang mendua dan sering memberikan laporan palsu pada tentara karena merasa ketakutan akan ancaman gerombolan dan juga kemahiran anggota Gerakan MMC untuk menyembunyikan diri atau lari dari kejaran aparat keamanan.

Kurang berhasilnya operasi pembersihan yang dilancarkan TNI terhadap gerombolan pengacau keamanan MMC dan semakin meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh MMC, maka Panglima Divisi Diponegoro pada tanggal 10 Februari 1951 mengeluarkan Perintah Operasi terhadap daerah di sekitar gunung Merapi Merbabu yang diberi nama Operasi Merdeka Timur II. Tujuan dilakukannya operasi ini adalah pertama, menangkap gerombolan atau orang-orang yang terlibat dalam Gerakan MMC. Kedua adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.<sup>108</sup>

Daerah yang menjadi wilayah Operasi Merdeka Timur adalah, batas sebelah barat meliputi daerah Kendal dan Pekalongan. Batas sebelah Timur adalah Karisidenan Surakarta, Porwodadi, Sragen dan Madiun. Batas sebelah utara

---

<sup>107</sup> Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 31

<sup>108</sup> Sejarah Militer DAM VII/Dipnegoro, Sejarah TNI AD KODAM VII/ Diponegoro (Semarang: t.t., t.p.), h. 33

adalah laut Jawa dan batas sebelah selatan adalah Samudera Hindia. Adapun kesatuan-kesatuan yang diberi tugas dalam operasi ini ada delapan Batalyon dari kesatuan Brigade P,Q,H dan D, di bawah komando Let.Kol. Suadi Suromihardjo.<sup>109</sup>

Operasi Merdeka Timur II ternyata membawa akibat bagi Gerakan MMC, yaitu banyak anggota MMC yang tertangkap ataupun tertembak mati. Pada tanggal 15 Februari 1951 Operasi Merdeka Timur dibubarkan, karena dianggap telah berhasil menangkap dan menembak mati beberapa tokoh Gerakan MMC, seperti Darmo Pendot dan Hardjo Bagong. Sebagai gantinya dibentuklah Komando Operasi Merapi Merbabu, di bawah pimpinan Let. Kol. Suadi Suromihardjo dengan dibantu Mayor Salamun sebagai Kepala Stafnya. Adapun Komando Operasi Merapi Merbabu ini melibatkan kekuatan sebesar 9 Kompi Infantri, yang diambil dari kesatuan Brigade O sebanyak 3 Kompi, Brigade P sebanyak 4 Kompi dan dari Brigade Q sebanyak 2 Kompi dengan mendapatkan bantuan satu Detasemen kendaraan lapis baja dan Polisi Negara. Daerah operasi Komando Operasi Merapi Merbabu ini meliputi daerah Boyolali, Ampel, Modjosongo, Banyudono, Polanhardjo, Klaten, Ambarawa, Tengaran dan Salatiga.<sup>110</sup>

---

109 Ibid. h. 34

110 Sejarah Militer Tjabang 073 Komando Resort Makutoromo, Peristiwa Pengacauan Merapi Merbabu Complex (Salatiga: t.t., t.p.), h. 8

Operasi Merapi Merbabu yang dipimpin oleh Let. Kol. Suadi Suromihardjo ini melibatkan beberapa unsur yang terkait, karena dalam operasi ini disertai pula dengan adanya usaha penerangan dan pemberian bantuan sosial, sehingga operasi ini sering disebut juga dengan Aksi Segi Tiga, yaitu aksi sosial, penerangan dan militer. Kegiatan yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang dalam hal ini adalah TNI dan Polisi Negara adalah mengadakan pemberian bantuan makanan dan pakaian, mengadakan usaha-usaha penerangan, bahwa kehadiran mereka adalah bukan merusak ataupun mengambil tanah yang telah digarap petani melainkan untuk membebaskan rakyat dari gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh gerombolan Gerakan MMC.

Dalam mengadakan penerangan, TNI berusaha mengadakan suatu pendekatan secara komunikatif terhadap rakyat, sebagai contoh adalah selebaran yang dikeluarkan oleh Komandan Brigade P, Mayor Kusmanto, yang memuat himbauan sebagai berikut :

*"... Kulo atas mani Putjuk Fimpinan Kietentaraan ing Merapi Merbabu, mengetaken dumateng rakjat sadaja, supados mboten sami kelu dumateng obrolan utawi budjukanipun para pimpinan grajak utawi rampok, ingkang katingalipun sae kolowau, nanging sadjatosipun adamel rugi dumateng rakjat sadojo. Dumateng para grajak, rampok lan pimpinaipun, kulo suko pepenget supados enggal amasrahaken sendjata kanti dipun paringi pengapunten. Hing samangke tentu bade wonten saat mboten bade kaparingan pangapunten malih saking pemerintah" 111*

111 Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 35

Digunakannya bahasa jawa dalam selebaran yang dikeluarkan oleh Komandan Brigade P, mempunyai tujuan agar himbauan yang dikeluarkan pemerintah tadi dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh rakyat setempat, maupun dapat diterima mudah oleh para anggota Gerakan MMC untuk segera menyerahkan diri, sebelum diambil suatu tindakan yang tegas.

Usaha yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam Operasi Merapi Merbabu ternyata memberikan hasil yang sangat memuaskan. Operasi militer yang dilakukan secara intensif membawa akibat banyak tokoh dan anggota Gerakan MMC yang tertangkap, menyerah ataupun tertembak mati. Bahkan benggol Gerakan MMC yang dikatakan sebagai tokoh yang kebal terhadap peluru, yaitu Suradi Bledog, juga tewas tertembak. Tewasnya Suradi Bledog pada tanggal 1 April 1951 terjadi dalam suatu tembak-menembak antara gerombolan dengan TON II Batalyon 417 yang mengadakan operasi pembersihan di desa Brintik, kec. Malangjiwan, Kab. Klaten.<sup>112</sup>

Selain berhasil menewaskan tokoh utama Gerakan MMC, aparat keamanan juga berhasil menangkap 393 orang anggota grayak di sekitar daerah Kedu dan menyita tidak kurang 4 pucuk pistol, 1 sten gun, 18 granat tangan, 2 klewang, 1 sepeda motor, 1 pesawat telepon dan 3 ekor kuda. Selama bulan bulan Mei 1951, di kab. Boyolali dan Klaten telah

<sup>112</sup> Dinas Seajarah Militer KODAM VII/Diponegoro, Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya (Semarang: CV. Borobudur Megah, 1977), h. 564

ditangkap 359 orang anggota gerombolan dan 396 menyerahkan diri, sejumlah senjata api berhasil disita dan 175 lembu hasil rampokan.<sup>113</sup>

Tewasnya tokoh Suradi Bledog dan adanya tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan berupa pencegahan, pengejaran dan penangkapan terhadap anggota Gerakan MMC, membawa akibat turunnya moril anggota yang belum tertangkap. Mereka memilih lari dan bersembunyi dengan cara bertempat tinggal di daerah yang tampaknya tidak ada pos patroli, terutama di daerah-daerah yang aman dan di daerah itu mereka hidup pasif sehingga masyarakat yang lain tidak tahu bahwa ada pengacau yang bersembunyi di daerah mereka. Selain itu ada juga yang lari ke tempat-tempat ramai seperti kota atau daerah-daerah lain dan tinggal di daerah itu sebagai pedagang atau buruh biasa.<sup>114</sup>

Dengan berhasil ditewaskan dan ditangkápnnya tokoh-tokoh Gerakan MMC beserta sebagian anggotanya, maka untuk sementara Gerakan MMC dapat dihancurkan. Akan tetapi bukan berarti Gerakan MMC sudah berakhir, karena pada saat TNI sudah menghentikan operasinya di daerah Merapi dan Merbabu, maka Gerakan MMC mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kembali aksi terornya, terlebih-lebih mendapatkan dukungan secara moril dari kelompok komunis.

---

<sup>113</sup> Ibid. h. 566

<sup>114</sup> Sejarah TNI AD KODAM VII/Diponegoro, op cit. h. 35

Aksi teror yang dilakukan oleh Gerakan MMC kelompok Jago ini menyebabkan keadaan perekonomian rakyat menjadi kacau. Kekacauan ekonomi ini mengakibatkan timbul rasa takut, rasa cemas bahkan rasa ketidakpercayaan rakyat akan pemerintah. Suasana yang kacau ini memang sengaja diciptakan oleh pihak komunis dengan harapan rakyat bisa diagitasi, dibujuk atau dihasut untuk bergabung dengan pihaknya. Selain dalam situasi perekonomian yang kacau dan lemah, komunis juga mencari sasaran yang lain dengan memanfaatkan situasi sosial untuk mengadakan penggarapan, sehingga bisa mengadakan come back.

Kesempatan ini muncul di daerah sekitar gunung Merbabu, khususnya di sekitar Semarang yang sebagian masyarakatnya tengah menghadapi kekecewaan akibat kebijaksanaan pemerintah, yaitu program Rasionalisasi Angkatan Perang. Kelompok Komunis melalui OTB mengadakan pendekatan dan membina eks. laskar rakyat ini, sehingga mengakibatkan muncul kembali suatu gerakan baru di daerah sekitar Merapi-Merbabu, yang kemudian kita kenal sebagai Gerakan MMC tahap Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR).



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## B A B I V

### GERAKAN MMC TAHAP PERSATUAN KORBAN RASIONALISASI

Dengan berakhirnya Gerakan MMC tahap awal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1951, maka masyarakat dan militer umumnya berpendapat, bahwa gerakan tersebut tidak akan terulang kembali. Pendapat itu memang dapat diterima, karena dengan tertangkapnya beberapa pimpinan gerombolan dan matinya tokoh utama yang bernama Suradi Bledog, jelas akan membuat anak buahnya menjadi turun morilnya dan akan menghentikan aksi-aksinya.

Pada saat diadakannya pembersihan oleh aparat keamanan, masih banyak tokoh-tokoh yang berhasil melarikan diri dengan jalan bersembunyi. Di antara mereka ada pula yang mengadakan penyusupan di dalam masyarakat dengan hidup sebagai petani, buruh dan lain sebagainya, sehingga dengan cara itu mereka dapat mengadakan penyusunan kekuatan kembali.<sup>115</sup>

Dengan dikurangnya pengawasan terhadap daerah sekitar Merapi dan Merbabu memungkinkan sisa-sisa anggota Gerakan MMC dari Kelompok Jago dan dari pihak yang tengah mengalami kekecewaan untuk mengadakan penyusunan kekuatan dalam bentuk organisasi yang baru, yang dikenal dengan nama Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR).

---

<sup>115</sup> 25 Grajak Berhasil Melarikan Diri, SK Merdeka tanggal 27 Agustus 1951. Selanjutnya lihat pula : Surakarta Geger Kepati-pati, Sk. Pemandangan tanggal 15 September 1951. Bekas anggota Gerakan MMC diperkirakan dapat segera bergabung dengan kawan lain yang masih berada di sekitar daerah Merapi dan Merbabu

A. Kepemimpinan

Pada masa gerakan MMC tahap PKR ini, muncullah seorang tokoh yang bernama Umar Yunani, yang merupakan seorang bekas Perwira TNI Masyarakat di Salatiga dan menjadi ketua Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI) di daerah Bringin. Dengan dasar pendidikan di *Hollands Inlandse Kweekschool* (HIK), maka bekas perwira dan tokoh SARBUPRI itu merupakan seorang tokoh yang sangat berpengalaman.<sup>116</sup>

Berbeda dengan kepemimpinan yang terdapat dalam kelompok Jago pada Gerakan MMC tahap awal, yang mendasarkan kepemimpinan atas dasar olah kanuragan dan kesaktian diri, maka dalam kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi ini kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dalam memimpin organisasi, yang dilandasi dengan kepandaian dan pengalaman, khususnya dalam bidang militer dari pemimpin yang bersangkutan.

Berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, maka Umar Yunani memilih Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR) sebagai tempat untuk dikembangkan dan diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Sebelum menjabat sebagai pemimpin dalam PKR, Umar Yunani adalah pengurus dari

---

<sup>116</sup> Sejarah Militer Tjabang 073/Makutarama, *op cit.* h. 3. Lihat pula karangan Drs. G. Moedjanto, M.A., Indonesia Abad ke 20: (II) (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 31. Lebih lanjut lihat juga Dokumentasi Penguasa Perang Jawa Tengah dan Yogyakarta, Organisasi Yang Berlindung di Bawah PKI: No. 85/KOGAM/1968.

SARBUPRI, yang merupakan suatu organisasi yang bernaung di bawah PKI. Sehingga adalah mungkin kalau Umar Yunani ingin membawa kelompok PKR ini untuk bergabung dalam komunis. Pilihannya terhadap PKR ini tentunya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti anggota-anggota PKR adalah teman pada masa perjuangan revolusi fisik, dan kecuali itu, umumnya anggota PKR tengah dilanda perasaan kecewa terhadap pemerintah akibat program rasionalisasi.

Dasar pertimbangan tersebut adalah sangat tepat, mengingat dalam suasana kekecewaan terhadap pemerintah itu, maka para korban rasionalisasi dapat dengan mudah untuk diagitasi dan ditarik untuk bergabung dengan komunis. Cita-cita Umar Yunani untuk mengembangkan PKR menjadi kenyataan, setelah ia terpilih menjadi pimpinan merangkap hakim dalam organisasi PKR pada awal tahun 1950.<sup>117</sup>

## B. Organisasi dan Daerah Operasi

Membicarakan MMC tahap ke dua, berarti membicarakan Persatuan Korban Rasionalisasi, karena yang dikenal dengan Gerakan MMC tidak lain adalah PKR itu sendiri, yang dalam perkembangannya berhasil menarik kelompok lain untuk masuk ke dalamnya. Hal itu dikatakan dalam Sejarah Kodam VII Diponegoro sebagai berikut :

<sup>117</sup> Dokumen Semdam VII Diponegoro, Masalah Gerombolan Merapi Merbabu Complex (Semarang: t.p., 1961), h. 4

*"...sementara itu, apa yang dinamakan MMC yang paling berpengaruh adalah kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR)... PKR ini berhasil menarik gerombolan yang lain, kemudian membentuk suatu gerombolan bersenjata dan kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan MMC." 118*

Tumbuhnya Gerakan MMC tahap PKR ini, diawali dengan munculnya organisasi yang menamakan diri sebagai Persatuan Korban Rasionalisasi di desa Dlimas, kec. Banyubiru, kab. Semarang, pada pertengahan tahun 1951. Adapun susunan pengurus dalam PKR pada saat itu adalah sebagai berikut : pucuk pimpinan adalah Umar Yunani alias mbah Mardi alias Nusaputra, Amir Saputro sebagai kepala staf, Sastro sebagai keuangan, Djoeweni sebagai kepala penyediaan senjata, Digdo Santoso sebagai sekretaris, Darsono sebagai mobiele troepen dan dibantu oleh beberapa komandan sektor, seperti Sastro Sadjad menjabat sebagai Komandan Medan 9 Merapi-Merbabu, Soedjoed Kridosardjono sebagai Komandan Sector 6001, dengan daerah operasi di sekitar Kawedanan Amberawa dan Salatiga, Multayat sebagai Komandan Sector 9001, dengan daerah operasi meliputi daerah Salatiga-Bojolali-Magelang, Waluyo Muksin sebagai Komandan Sector 3001, dengan daerah operasi di sekitar kab. Semarang. 119

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan permusuhan diantara kelompok bersenjata di daerah sekitar Merbabu, maka pada bulan Januari 1952 Umar Yunani berusaha

118 Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 327

119 Dokumen Semdam VII Diponegoro, op cit. h.1

menarik kelompok lain agar mau bergabung dengan PKR yang dipimpinnya. Usaha tersebut tampaknya mendapatkan sambutan dari kelompok-kelompok lain, yang terbukti menyatakan kesanggupannya bergabung bersama di bawah pimpinan Umar Yunani. Kelompok-kelompok yang mengabungkan diri tersebut antara lain :

a. Gerombolan Saerodji, pimpinan Saerodji yang merupakan bekas Komandan Distrik Militer Banyubiru. Anggotanya terdiri dari para korban rasionalisasi tahun 1948 dan 1950, dengan daerah operasi sekitar kec. Jambu, Getasan dan Banyubiru. Persenjataan yang dimiliki terdiri dari beberapa pucuk stengun dan pistol.

b. Gerombolan Persatuan Gerilya Rakyat (PGR) 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Darsono dan Soeyoto, sedangkan anggotanya terdiri dari korban rasionalisasi tahun 1948, memiliki persenjataan 30 pucuk senjata api, dengan daerah operasi di sekitar kec. Kedungjati dan Tuntang.

c. Gerombolan Aminati yang dipimpin oleh Aminati, dengan anggota terdiri dari korban rasionalisasi tahun 1948. Mereka memilih daerah operasi di sekitar Kedungjati dan Bringin. Senjata yang dimilikinya tidaklah banyak.

d. Gerombolan Bakri, yang dipimpin oleh Bakri dengan anggota sejumlah 15 orang perampok, dengan daerah operasi sekitar Sumowono dan memiliki persenjataan beberapa buah pucuk pistol dan stengun.

e. Gerombolan Mardjo Djenggot, dipimpin oleh Mardjo Djenggot. Ia dikenal sebagai bekas Bintara TNI Masyarakat yang bergerak di daerah Bringin dan Salatiga.<sup>120</sup>

Dengan masuknya gerombolan-gerombolan tersebut, maka Gerakan MMC di bawah pimpinannya menjadi semakin bertambah kuat baik dalam hal personel, organisasi maupun senjata. Keadaan yang demikian ini mendorong Umar Yunani untuk mengadakan perubahan organisasinya sehingga menjadi suatu organisasi yang mempunyai struktur dengan disesuaikan dengan pengalamannya di bidang militer. Umar Yunani memberi nama daerah operasinya yang baru sebagai Medan Pancasila, yang terdiri dari :

- a. Sector Proklamasi, dengan daerah operasi meliputi Rowopening-Kopeng-Salatiga-Bawen-Pingit. Dipimpin oleh Waluyo Huksin.
- b. Sector 17, yang merupakan penjelmaan dari sector 6001 dengan daerah operasi meliputi Kopeng, Salatiga, Ambarawa dan sekitar Merbabu, dibawah pimpinan Multayat.
- c. Sector Agustus, dengan daerah operasi meliputi sebelah barat jalan Semarang-Bawen sampai Pingit, dibawah pimpinan Soedjoed Kridosardjono.
- d. Sector 45, merupakan penjelmaan dari sector 9001,

<sup>120</sup> Sejarah Militer Tjabang KOREM 073/Makutarama, op cit. h.

dengan daerah operasi meliputi sebelah timur jalan Semarang-Ampel, dengan dipimpin oleh Djarot.<sup>121</sup>

Organisasi Gerakan MMC tahap PKR ini bila dibandingkan dengan Gerakan MMC tahap kelompok Jago sangat berbeda jauh. Dalam Gerakan MMC tahap PKR ini mereka sudah menyusun organisasinya menjadi sedemikian lengkap, baik dalam pengadministrasiannya maupun dalam hirarki atau kepangkatan dalam tubuh Gerakan MMC, sebagai contoh dipakainya gigi emas sebagai tanda pangkat. Seorang anggota yang memakai 4 gigi emas, berarti ia berpangkat Mayor, 3 gigi emas berarti Kapten dan 2 gigi emas berarti Letnan.<sup>122</sup> Selain dari pada itu, dalam Gerakan MMC masa PKR ini ternyata melibatkan pula beberapa orang wanita yang bertugas untuk memikat musuh, memata-matai rumah yang akan dirampok atau menjual hasil rampokan yang berupa perhiasan dan barang lain.<sup>123</sup>

Dalam perkembangannya, Gerakan MMC yang dibentuk oleh Umar Yunani nantinya akan mengalami perpecahan antara kelompok pimpinan Multayat dan kelompok pimpinan Soedjoed Kridosardjono. Perpecahan itu membawa perubahan

---

<sup>121</sup> Ibid, h. 3

<sup>122</sup> Perampokan Besar di Magelang; Gerombolan MMC beraksi Lagi, Sk. Suara Merdeka, tanggal 30 Januari 1953

<sup>123</sup> Grajak MMC Tertangkap di Dekat RRI, Sk. Suara Merdeka tanggal 22 Oktober 1952

terhadap organisasi Gerakan MMC, karena Multayat memben-  
tuk Persatuan Korban Rasionalisasi Muda (PKR Muda), dengan  
daerah operasi di daerah kec. Selo kab. Boyolali dan  
daerah Kedu. Sedangkan Soedjoed Kridosardjono dan Umar  
Yunani akan membentuk Organisasi Putra Proklamasi Repub-  
lik Indonesia (OPPRI), dengan daerah operasi masih di  
daerah yang dikuasainya seperti sebelum adanya perpecahan  
diantara anggota PKR .<sup>124</sup>

### C. Jalannya Gerakan MMC Tahap PKR

Pada tahun 1951 pemerintah sedang disibukkan dengan  
adanya pemberontakan ex. Batalyon 426, maka perhatian  
terhadap daerah sekitar gunung Merapi Merbabu menjadi  
sedikit kendor, sehingga keamanan di sekitar daerah  
tersebut menjadi rawan kembali, terlebih-lebih adanya  
ketidakmampuan dari para pamong praja dan polisi negara  
dalam menghadapi gangguan Gerakan MMC, menyebabkan krimi-  
nalitas meningkat.<sup>125</sup>

Pada tanggal 21 Januari 1952, di dusun Windhu Se-  
brang, Grantos dan Sendang, kab. Boyolali terjadi peram-  
pokan terhadap 67 rumah penduduk, dengan hasil 40 ekor  
lembu, 12 ekor kerbau dan 8 ekor kambing berhasil dibawa  
perampok. Sebelum meninggalkan tempat, gerombolan sempat

---

<sup>124</sup> Dokumen Semdam VII Diponegoro. Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia (OPPRI) (Semarang: t.p., t.t.), h. 1

<sup>125</sup> Grajak Meningkat di Merapi lagi, Sk. Pedoman tanggal 11 Januari 1952



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87

membakar barang-barang dan rumah penduduk yang mencoba mengadakan perlawanan. Jumlah perampok diperkirakan mencapai 200 orang dan bersenjata api.<sup>126</sup>

Dari peristiwa di atas, dapat diketahui adanya persamaan motif kekacauan yang dilakukan oleh Gerakan MMC masa Kelompok Jago dengan Gerakan MMC masa PKR, yaitu menciptakan kekacauan, keresahan dan ketakutan di kalangan penduduk melalui aksi teror kekerasan.

Pada tanggal 2 Juli 1952, terjadi suatu perampokan di desa Grabag terhadap rumah Tukidjo. Dalam perampokan ini selain kerugian harta, juga membawa korban jiwa, yaitu Tukidjo karena ia memberikan perlawanan. Bersamaan dengan peristiwa itu, sejumlah 70 orang grayak mengadakan perampokan di rumah Kepala Stasiun kereta api Sidogede dan berhasil membawa kabur beberapa karung kopi, obat-obatan dan uang milik Kepala stasiun sebesar Rp. 280.00.<sup>127</sup>

Pada tanggal 4 Desember 1952, terjadi perampokan di dukuh Karangpawon, desa Tjandiredjo, kec. Tuntang. Perampokan dilakukan secara serentak, setiap rumah didatangi oleh 5 sampai 10 orang rampok bersenjata api, kemudian mereka merampas barang perhiasan, sapi dan uang milik

---

<sup>126</sup> Perampokan di Kabupaten Boyolali, Sk. Suara Merdeka tanggal 21 Januari 1952

<sup>127</sup> Aksi Gerombolan di Sekitar Magelang Meningkat, Sk. Suara Masyarakat tanggal 2 Juli 1952

penduduk.<sup>128</sup>

Tampaknya aksi-aksi yang dilakukan oleh Gerakan MMC dapat berjalan dengan lancar dan mereka tidak begitu takut menghadapi kejaran aparat keamanan, karena anggota TNI masih sibuk menghadapi pemberontakan ex. Batalyon 426, sehingga kekuatan untuk menghadapi kekuatan Gerakan MMC menjadi berkurang dan operasi tidak dapat dilakukan secara maksimal dan serentak.

Pada tanggal 21 Januari 1953, terjadi lagi perampokan yang disertai dengan pembantaian di rumah Asisten Wedana kec. Kemusu kab. Boyolali, Danu Atmodjo. Dalam kejadian itu, gerombolan grayak berjumlah sekitar 50 orang dengan berpakaian mirip pasukan MB dan polisi negara. Selesai mengambil harta benda, mereka kemudian membawa Danu Atmodjo dan pembantunya yang bernama Kardji ke halaman rumah lalu ditembak mati. Selain itu mereka juga membakar rumah asisten wedana itu sampai hagus. Mereka juga mengadakan perampokan dan pembunuhan terhadap Keluarga Hardjo Wijanto. Dalam perampokan ini gerombolan menembak Hardjo Wijanto dan ketiga anaknya, yaitu Kalidarwito (21 tahun), Giyah (18 tahun) dan Suteki (13 tahun). Dalam peristiwa ini Kalidarwito dan Giyah akhirnya meninggal dunia.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Perampokan Besar di Tuntang; Gerombolan Grajak Semakin Buas, Sk. Suara Merdeka tanggal 5 Desember 1952

<sup>129</sup> Drama Ngeri Menimpa Keluarga Hardho Wijanto, Sk. Suara Merdeka tanggal 23 Januari 1953

Dalam perampokan di daerah kec. Kemusu itu, terlihat adanya usaha dari pihak Gerakan MMC untuk mengadakan adu domba dan menghasut rakyat, bahwa Polisilah yang melakukan perampokan dan pembunuhan. Usaha itu jelas ingin menciptakan suatu benih kebencian rakyat terhadap aparat keamanan ataupun kebencian terhadap pemerintah. Dengan demikian Gerakan MMC semakin leluasa melakukan aksi-aksinya.

Sebelum meninggalkan daerah itu, gerombolan itu meninggalkan sebuah plakat, yang ditandatangani oleh seorang Komandan Gerakan MMC, yang berisi peringatan terhadap MB dan Polisi Negara supaya tidak mengadakan operasi pembersihan terhadap Gerakan MMC di sekitar daerah Merapi dan Merbabu. Selanjutnya mereka juga mengadakan pembakaran rumah seorang Komandan Polisi kec. Kemusu.<sup>130</sup>

Keberhasilan menciptakan kebencian rakyat terhadap aparat keamanan yang terbukti dengan meningkatnya dukungan rakyat terhadap Gerakan MMC, menjadikan Gerakan MMC semakin berani melawan operasi yang dilakukan MB dan Polisi Negara. Dalam suatu serangan terhadap pos-pos Polisi di Salatiga, Ampel, Delik, Klepu, Bringin, Jambu, Suruh dan Simo, mereka mengadakan perampasan senjata api, melepaskan tahanan-tahanan dan mengadakan pembakaran pos polisi. Bahkan dalam serangan di Delik, seorang anggota

<sup>130</sup> Arsip Sekretaris Negara, Tentang Laporan Residen Semarang No. BSR. 18/268/15 tanggal 4 Desember 1952

MB ditembak mati.<sup>131</sup>

Penyerangan terhadap pos-pos polisi yang telah disebutkan di atas, selain didasarkan atas adanya dendam terhadap polisi negara, yang sebagian besar anggotanya berasal dari anggota KNIL dan Polisi Federal pada masa penjajahan Belanda, juga mencari senjata api guna melancarkan usaha mereka. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam persetujuan KMB dicapai suatu kesepakatan, bahwa pemerintah RI menyetujui adanya pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), yang diambil dari TNI sebagai intinya dengan ditambah bekas anggota KNIL, kesatuan militer lain dan Polisi Federal. Sudah barang tentu kebijaksanaan ini menjadikan bekas anggota TNI Masyarakat dan Laskar Rakyat mengalami kekecewaan. Mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil, karena mereka terkena program rasionalisasi, sementara bekas musuhnya dalam revolusi fisik menduduki jabatan dalam TNI ataupun Polisi Negara. Mereka masih ingat ketika masa Clash II, banyak laskar yang disiksa dan dibunuh secara kejam oleh tentara Belanda.

Sebagai ungkapan rasa ketidakpuasannya terhadap kebijaksanaan pemerintah itulah yang mendorong mereka mengadakan suatu aksi yang diwujudkan melalui kekerasan, perampokan dan sebagainya. Ternyata tindakan perampokan yang dilakukan oleh gerombolan itu tidak hanya dilakukan

---

<sup>131</sup> Pos Polisi Disrang Gerombolan, Sk. Berita Buana tanggal 27 Januari 1953

oleh anggota gerombolan saja. Tidak sedikit anggota TNI yang tidak terkena rasionalisasi melakukan desersi atau meninggalkan tugas di kesatuannya, karena tertarik bergabung dengan anggota Gerakan MMC. Kenyataan tersebut disebabkan karena, pertama, keadaan ekonomi yang buruk saat itu, sehingga cenderung mengakibatkan orang mengambil jalan pintas. Berkaitan dengan jalan pintas, oknum-oknum TNI itu menyadari bahwa mereka tidak memiliki ketrampilan lain selain keberanian bertempur dan memegang senjata. Kedua, adalah karena banyak sanak saudara mereka yang tergabung atau menjadi simpatisan Gerakan MMC, sehingga mereka juga tertarik untuk bergabung. Ketiga, adalah adanya rasa kesetiakawanan terhadap kawan-kawan yang terkena rasionalisasi, terlebih sekarang yang menjadi kawan-kawannya adalah bekas musuhnya dalam revolusi fisik.<sup>132</sup>

Setelah TNI menyelesaikan Operasi Militer terhadap sisa-sisa pemberontakan ex. Batalyon 426, maka pada bulan Februari 1953, keamanan daerah sekitar Gunung Merapi dan Merbabu diserahkan pada tanggung jawab TNI. Hal ini dilakukan karena pihak Polisi Negara dan Pamong Praja merasa tidak sanggup menghadapi keganasan Gerakan MMC yang selalu menimbulkan keresahan, ketakutan dan kecauan.

<sup>132</sup> J. Sarwono, Wawancara tanggal 1 Agustus 1992. Selanjutnya beliau mengatakan kalau dalam kesatuannya banyak yang melakukan desersi atas dasar tiga alasan tersebut di atas, sebagai contoh beliau menyebut nama Saerodji. Lihat pula Sejarah TTNI AD KODAM VII Diponegoro, op cit. h. 37

Adanya operasi yang dilakukan oleh TNI, yang dinamakan sebagai Operasi Tri Tunggal, membawa akibat terjadi pembaharuan dalam tubuh Gerakan MMC. Dalam suatu rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1953 diputuskan pertama, setiap sektor wajib menyerahkan sumbangan wajib, yang ditentukan paling lambat pada tiap akhir bulan. Kedua, setiap sektor supaya dibentuk pos-pos penghubung dengan seorang kurir yang dapat dipercaya. Tiga, setiap sektor dilarang mengadakan hubungan dengan organisasi lain diluar Badan Penolong Korban Rasionalisasi (BPKR), sebelum mendapat ijin dari komandan medan. Empat, setiap anggota dilarang melakukan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lima, setiap anggota yang meninggalkan tempat untuk suatu kepentingan tertentu, diharuskan membawa surat jalan untuk diberikan kepada komandan sektor setempat, untuk kemudian diserahkan pada sektor yang memberi surat jalan tersebut.<sup>133</sup>

Berkaitan dengan keputusan itu, maka dibentuklah suatu Badan Kehakiman yang tersusun sebagai berikut: S. Wahidin sebagai ketua, S. Budiman, S. Krido, Sastro, D. Mardjo, S. Santoso, Raksano, Siswo, Aminoto dan Tjokro sebagai anggota. Badan kehakiman ini mempunyai tugas mengawasi, mengadili dan memberi sanksi setiap pelangga-

133 Dokumen SMAD. Keputusan Rapat Tanggal 20 Maret 1953 tanggal 20 Maret 1953

ran yang dilakukan oleh anggota Gerakan MMC.<sup>134</sup>

Meskipun Gerakan MMC tahap kelompok PKR ini merupakan suatu organisasi yang teratur, akan tetapi tampaknya mereka menghadapi suatu permasalahan di bidang organisasi. Hal ini disebabkan karena penerimaan anggota yang belum teratur, sebab belum ada peraturan yang baku dari adanya penerimaan anggota dan yang lebih parah lagi, adalah masih banyaknya pengurus yang buta huruf, sehingga di bidang administrasi masih kurang tenaga yang terdidik. Namun demikian, mereka masih giat mencari massa yang mendukung Gerakan MMC dengan melibatkan wanita-wanita, yang pura-pura meminjamkan modal pada pedagang kecil di pasar ataupun ke rumah-rumah penduduk, melancarkan agitasi yang menjelek-jelekan pemerintah.<sup>135</sup>

Meskipun ada larangan dari pimpinan pusat Gerakan MMC untuk tidak mengadakan perampokan dan aksi-aksi kekerasan yang lainnya demi menarik simpati dari penduduk, akan tetapi karena desakan kebutuhan ekonomi masih ada beberapa anggota yang melakukan perampokan dan aksi-aksi yang lain, tanpa sepengetahuan komandan medan. Hal ini terlihat jelas dalam laporan Komandan Sector 17 sebagai berikut :

*"...Dalam satu bulan ini, dua anak dari organisasi terbunuh, karena sedang tugas ditjoro (dijebak) orang terus tertangkap, kemudian dapat melarikan diri, karena keteledorannya sehingga dapat ditangkap*

134 Ibid

135 Dokumen SMAD, Peraturan-peraturan Khusus Dalam Wilayah Teritorium Comando Sector 17 Semarang tanggal 15 Mei 1953

kembali, mereka ada pengakuan jang dengan kenjataan (juridis) lantas dibunuh ketika diadjak operasi. Jang satunja karena ada operasi malam dengan kelal-aian kawannja dapat tertangkap tiga anggota, jang satu melarikan diri, karena melarikan diri jang satu ditembak mati jang satunja lagi diangkut, hingga kini belum ada kesimpulan jang djelas, ini terdapat di ketjamatan Pakis. Jang lain satu orang tertangkap ketika ada penggedoran jang diselenggarakan oleh kawan sector 17 (kawan Sangka. cs) jang karena sonder hubungan, djadi selaku Komandan ta' tahu menahu. "136

Dari laporan yang dikemukakan oleh Komandan Sector 17 ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Gerakan MMC mulai terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai taktik perjuangan. Disatu pihak ada yang menginginkan perjuangan dengan melaksanakan aksi teror, sementara di lain pihak ada yang menghendaki sejauh mungkin menghindarkan diri dari aksi teror, dengan maksud menarik simpati dari rakyat.

Perpecahan pendapat itu semakin menjadi jurang pemisah antara kelompok Gerakan MMC yang mendukung jalan perjuangan dengan menjauhkan diri dari kekerasan yang didukung oleh kelompok Umar Yunani dan Sujud Kridosardjono dengan kelompok yang mendukung aksi kekerasan, yaitu kelompok Multayat. Perpecahan itu pecah menjadi suatu insiden kekerasan antara dua kelompok tersebut yang diwujudkan dengan aksi pelucutan senjata terhadap kelompok Multayat. Semenjak itu Multayat melepaskan diri dari kelompok Umar Yunani.



Perpecahan itu mengakibatkan kekuatan Gerakan MMC menjadi mulai lemah, baik dalam bidang personel, persenjataan dan moril anggota Gerakan MMC itu sendiri. Mulai lemahnya Gerakan MMC mengakibatkan gerakan ini sedikit demi sedikit mulai didesak oleh operasi pembersihan.

#### **D. Akhir Gerakan MMC Tahap PKR.**

Gerakan MMC tahap Persatuan Korban Rasionalisasi ini akhirnya mengalami kemunduran-kemunduran yang nantinya memuncak dengan berhasil ditumpasnya gerakan ini oleh pemerintah. Secara umum berakhirnya Gerakan MMC tahap Persatuan Korban Rasionalisasi ini disebabkan oleh :

##### 1. Perpecahan Dalam Tubuh PKR.

Adanya tekanan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang diwujudkan dalam Operasi Tri Tunggal, menyebabkan Umar Yunani mengambil keputusan untuk sedapat mungkin menghindari tindakan kriminal dan kontak senjata dengan aparat keamanan demi tercapainya perjuangan baru, yaitu menarik simpati dari rakyat. Akan tetapi keputusan yang diambil oleh Umar Yunani ini mendapatkan tentangan dari kelompok Multayat, yang masih menghendaki digunakannya cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Menurut Multayat, cara kekerasan perlu dilakukan mengingat organisasi memerlukan senjata api dan biaya yang merupakan sarana vital dalam menghadapi tekanan pemerintah. Pendapat Multayat ini ternyata mendapatkan tentangan dari kelompok Sudjud Kridosardjono yang mendukung pendapat Umar Yunani.

Akibat dari adanya perselisihan pendapat ini, Multayat keluar dari kelompok Umar Yunani serta akan membentuk kekuatan sendiri.<sup>137</sup>

Sikap Multayat yang menyatakan keluar dan membentuk kelompok sendiri jelas membahayakan keutuhan organisasi PKR, sehingga Umar Yunani memutuskan untuk melucuti senjata kelompok Multayat. Dalam peristiwa perlucutan yang dilakukan kelompok Soedjoed terhadap kelompok Multayat itu, membawa akibat kelompok Multayat mengalami kerugian kehilangan tiga orang anak buahnya, yaitu Amir Saputro, Roso dan Soeroyo tertembak mati, empat orang ditawan dan tiga puluh orang menyerahkan diri. Selain itu kelompok Multayat juga kehilangan 7 pucuk Karaben dan sebuah stengun.<sup>138</sup>

Sejak peristiwa itu, maka secara resmi Gerakan MMC terpecah menjadi dua, yaitu Multayat membentuk kelompok baru yang diberi nama Persatuan Korban Rasionalisasi Muda (PKR Muda), yang beroperasi di wilayah kec. Selo, kab. Boyolali. Kelompok lain adalah kelompok yang dibentuk oleh Sudjud Kridosardjono, yaitu Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia (OPPRI), dengan susunan Umar Yunani alias Nusa Putra sebagai pimpinan, Sudjud Kridosardjono dan Sastro Sajad sebagai wakil pimpinan dan S.

---

<sup>137</sup> Dokumen Angkatan Perang Teritorium VII Diponegoro, Gerombolan MMC Pecah Menjadi Dua ; No. 7 Semarang April 1954

<sup>138</sup> Ibid

Giri sebagai penulis.<sup>139</sup> Perpecahan itu membawa akibat berkurangnya kekuatan Gerakan MMC, baik dalam bidang personel, persenjataan ataupun moril.

Perpecahan dengan kelompok Multayat itu mengakibatkan berkurangnya jumlah personel maupun wilayah operasional dari Gerakan MMC. Keadaan yang demikian itu, membuat Umar Yunani sering mengadakan perubahan wilayah operasional gerakannya yang disesuaikan dengan jumlah personilnya yang semakin berkurang akibat dari adanya perpecahan dan operasi pembersihan yang dilakukan aparat keamanan.

Dengan munculnya OPPRI sebagai wadah baru dalam Gerakan MMC menggantikan PKR, maka sejalan dengan itu Umar Yunani berusaha mengadakan perombakan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam adalah dengan mengadakan konsolidasi dan reorganisasi dengan menghilangkan semua anasir-anasir jahat yang mengarah pada digunakannya cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Ke luar adalah dengan menggiatkan untuk membentuk kader-kader yang mampu mengadakan infiltrasi kedalam masyarakat, Pamong Praja dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR).<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Dokumen Semdam Diponegoro, Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia Semarang, t.t., h. 1

<sup>140</sup> ibid. h. 3

Dari cara-cara perjuangan yang dilakukan oleh Umar Yunani itu, kita dapat melihat bahwa Umar Yunani berusaha mengalihkan perjuangan kelompoknya ke arah perjuangan politik dan tidak lagi mengadakan perjuangan dengan cara kekerasan. Kalau kita melihat pada bagian yang telah disebutkan di atas, bahwa sebelum Umar Yunani menjabat sebagai pemimpin PKR, ia adalah salah satu pengurus dari Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, yang dipercaya sebagai salah satu organisasi yang menginduk pada Partai Komunis Indonesia, maka besar kemungkinan kalau ada unsur-unsur politis yang menungganginya, yang dalam hal ini adalah Komunis. Selain dari pada itu, kita melihat juga, bahwa cara perjuangan infiltrasi adalah salah satu cara yang ditempuh oleh komunis dan menjadi doktrin komunis untuk mencapai tujuannya.

Perpecahan dengan kelompok Multayat, mengakibatkan Gerakan MMC mengalami pengurangan kekuatan personel maupun wilayah operasinya. Berkaitan dengan itu Umar Yunani mengadakan perombakan organisasi dan juga wilayah operasionalnya yang semakin lama menjurus semakin sempit, sebagai akibat berkurangnya kekuatan personelinnya akibat perpecahan ataupun karena OTT.

Setelah menyusun organisasi yang baru, maka Umar Yunani segera menerapkan langkah-langkah perjuangan yang telah ditetapkannya. Untuk itu semua anggota Gerakan MMC harus segera menyebar baik ke kota ataupun ke desa-desa menjalankan tugasnya mengadakan infiltrasi dan juga

melancarkan agitasi dan propaganda agar masyarakat mendukung gerakan mereka. <sup>141</sup>

Cara lain yang ditempuh oleh Gerakan MMC kelompok OPPRI adalah dengan jalan mengadakan pendekatan terhadap perangkat desa, seperti Camat, Lurah, Kebayan, dan sebagainya. Hal itu dipandang oleh Umar Yunani sangat perlu, karena apabila berhasil maka dengan sendirinya rakyat akan mengikuti apa yang dianjurkan oleh aparat desa. Atas dasar itulah maka anggota Gerakan MMC mengadakan infiltrasi terhadap Organisasi Pertahanan Rakyat. <sup>142</sup>

Larangan yang dikeluarkan oleh Umar Yunani untuk tidak melakukan aksi-aksi kekerasan dan teror dalam mencapai tujuannya, ternyata membawa akibat kerugian bagi kelangsungan Gerakan MMC sendiri, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Pertama adalah tidak semua anggota Gerakan MMC mematuhi larangan yang dikeluarkan oleh Umar Yunani itu. Masih banyak anggota yang melakukan aksi perampokan dan pencetakan yang disertai pembunuhan terhadap patroli polisi, sebagai contoh di Pakis tanggal 24 Maret 1954, yang mengakibatkan tiga anggota Polisi terbunuh. <sup>143</sup> Selain mengadakan pencetakan juga terjadi kasus perampokan di desa Kalibinger, kec. Somowono, Ambarawa pada tanggal 27 Juli 1954. Dalam Perampokan itu

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Dokumen Smdam VII Diponegoro, OPPRI, op cit. h. 7

<sup>143</sup> Patroli Polisi Ditjegt Gerombolan; Tiga Terbunuh, Sk Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1954

seorang anggota MMC bernama Saelan tewas dibunuh oleh rakyat dan OPR, karena mengadakan perlawanan bersenjata-kam arit dan kundu sewaktu dikejar. Dalam saku Saelan ditemukan kartu anggota Gerakan MMC, potret Sudjud dan uang sebesar Rp 45.00.<sup>144</sup> Dari kejadian-kejadian yang disebutkan di atas, merupakan suatu bukti bahwa masih banyak anggota yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama, yaitu mengadakan aksi teror dan kekerasan. Selain itu merupakan bukti pula bahwa beberapa anggota Gerakan MMC berusaha menentang kepemimpinan Umar Yunani dan itu dibuktikan dengan melanggar aturan yang ditetapkannya.

Kedua, dengan dipilihnya jalan infiltrasi dan bukan kekerasan, ternyata menyebabkan keuangan organisasi Gerakan MMC mengalami kesulitan. Kalau biasanya mereka memperoleh dana dari setiap aksi perampokan, maka sekarang mereka kekuarangan dana operasional. Untuk mengatasinya mereka mau tidak mau mengadakan kekerasan lagi dengan mengadakan pungutan pajak bulanan secara paksa sebesar Rp. 20.00 sampai Rp. 30.00, seperti yang dilakukan oleh anggota Gerakan MMC yang bernama Margo Bluwuk atas perintah dari Bambang Suwito selaku Komandan Sektor F. 27 Ri. Dalam kasus itu Margo Bluwuk mengadakan penarikan secara paksa pajak bulanan terhadap penduduk, namun dalam penarikan tersebut Margo Bluwuk berhasil ditangkap

---

144 Perampokan Lagi di Somowono, Sk. Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Juli 1954

oleh penduduk Gondangan, Ngablak.<sup>145</sup>

Ketiga, dipilihnya jalan non kekerasan mengakibatkan kelompok Umar Yunani pecah menjadi dua bagian, yaitu OPPRI dan PKR Muda. Perpecahan tersebut mengakibatkan wilayah operasi Gerakan MMC menjadi semakin sempit. Dengan wilayah yang semakin sempit, memudahkan aparat keamanan untuk mengadakan operasi pembersihan terhadap anggota Gerakan MMC. Hal ini berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh TNI dalam OTT.<sup>146</sup>

## 2. Tindakan Pemerintah dan Aparat Keamanan.

Setelah TNI menyelesaikan Operasi Militer terhadap pemberontakan eks. Batalyon 426, maka sejak bulan Februari keamanan daerah sekitar Merapi dan Merbabu diserahkan kembali dari Polisi Negara kepada TNI. Hal itu dilakukan karena pihak Polisi merasa tidak mampu menghadapi Gerakan MMC yang selalu menimbulkan suasana kekacauan.

TNI kemudian menyusun rencana operasi pembersihan yang kemudian dikenal dengan Operasi Tri Tunggal. Operasi ini melibatkan unsur-unsur TTNI, polisi Negara dan Pamong Praja, dengan mengikutsertakan unsur dari rakyat. Dalam pada itu, karena anggota Gerakan MMC mengadakan taktik gerilya, maka untuk menghadapinya TNI mengadakan suatu

<sup>145</sup> Anggota Gerombolan MMC ditangkap saat menarik Pajak, Sk. Susra Merdeka tanggal 21 Desember 1954

<sup>146</sup> A.P. Secripto, Wawancara tanggal 2 Agustus 1992. Penda-pat senada diungkapkan oleh Soebadi Hardjoloekito yang berpendapat bahwa tehnik OTT sama seperti tehnik Benteng Steelsel pada masa perang Diponegoro.

taktik anti gerilya.

Langkah awal yang ditempuh oleh TNI adalah dengan membangun pos-pos atau benteng-benteng di daerah-daerah yang rawan dari ancaman gerombolan MMC, seperti daerah Ambarawa, Bawen, Ungaran, Salatiga, Ampel, Boyolali, Teras, Simo, Kemusu, Banyudono dan sebagainya. Pos-pos tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Strategi tersebut mengingatkan kita pada cara Belanda untuk menghentikan perlawanan Pangeran Diponegoro. Taktik tersebut juga digunakan oleh TNI untuk mempersempit ruang lingkup dari Gerakan MMC.<sup>147</sup>

Langkah kedua adalah dengan mengadakan operasi militer terhadap daerah-daerah yang menjadi ruang lingkup dari pos-pos tersebut. Daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai, kemudian diserahkan pengamanannya kepada Polisi Negara, untuk kemudian menjadi tugas dari Pamong Praja untuk mengadakan penerangan ataupun penyuluhan kepada rakyat. Dengan cara demikian ini, OTT berhasil memisahkan rakyat dari gerombolan dengan jalan memberikan bantuan secukupnya dan penerangan sehingga gerombolan akhirnya kehilangan simpati dari rakyat.<sup>148</sup>

147 Kol. Sudarmo, Wawancara tanggal 19 September 1992

148 Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 15 November 1992. Dalam Operasi Tri Tunggal, unsur yang terkait sebenarnya ada lima, yaitu TTNI, Polisi Negara, Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.



Adanya OTT yang diberlakukan sebagai suatu hasil keputusan bersama Muspida Boyolali, Salatiga, Semarang, Magelang dan Surakarta pada tanggal 17 Januari 1953, membuat Gerakan MMC untuk sementara menghentikan aksinya. Hal ini disebabkan karena dalam persenjataan, perlengkapan dan kecakapan personil TNI lebih kuat dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Gerakan MMC. Berkaitan dengan kenyataan itu, maka Umar Yunani kemudian menempuh cara perjuangan lain yaitu dengan mengadakan infiltrasi dan agitasi.

Keberhasilan cara perjuangan Umar Yunani untuk mendapatkan simpati dari rakyat, menjadikan pemerintah semakin menggiatkan OTT pada awal tahun 1955. Tindakan pembersihan lebih diintensifkan lagi, sehingga menimbulkan keberanian rakyat dan Pamong Praja dalam menghadapi gerombolan.

Sampai dengan awal bulan Februari 1955, OTT berhasil menangkap dan menembak mati beberapa pimpinan Gerakan MMC, seperti Saelan, Rusito, Margo Bluwuk, Margono dan lain-lain. Banyaknya tokoh Gerakan MMC yang tertangkap dan terbunuh, mengakibatkan Umar Yunani, selaku puucuk pimpinan Gerakan MMC, mengadakan perubahan yang selalu mengarah pada semakin sempitnya wilayah gerakan. Akibatnya mendapat tekanan secara terus-menerus, akhirnya terbetik suatu berita bahwa Umar Yunani dan pembantu-pembantunya akan menyerahkan diri kepada TNI. Tentu saja kesediaan ini mendapatkan sambutan dari pemerintah.

Kesediaan penyerahan ini dinyatakan ketika Umar Yunani mengadakan audiensi kepada Presiden Sukarno yang ketika itu mengadakan kunjungan di Semarang. Pada hari Senin, tanggal 20 Desember 1954, Umar Yunani disertai seorang ajudannya menemui Presiden di rumah kediaman Gubernur Wongsonagoro di Watugedhe 8 Semarang. Dalam peristiwa itu, Umar Yunani menyatakan kesanggupannya untuk menyerah bersama dengan segenap anggotanya.<sup>149</sup> Akan tetapi janji Umar Yunani untuk mengadakan penyerahan diri tersebut tidak pernah dilaksanakannya.

Melihat keadaan yang demikian, maka Panglima Divisi IV Diponegoro, Kolonel Moch. Bachrun, pada tanggal 6 Februari 1955, mengeluarkan seruan kepada anggota OPPRI dan PKR Muda untuk segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, dengan batas waktu penyerahan adalah tanggal 28 Februari 1955. Selain mengeluarkan seruan kepada anggota Gerakan MMC, Kol. Bachrun juga mengeluarkan instruksi kepada seluruh alat negara yang sedang mengadakan operasi pembersihan agar mau menerima penyerahan anggota gerakan secara baik-baik.<sup>150</sup>

Sebagai pedoman kerja bagi alat adalah : pertama, masing-masing instansi supaya saling tukar-menukar daftar nama anggota Gerakan MMC dan setiap Bupati yang dibantu

---

<sup>149</sup> MMC Sedia Menyerah dengan Seluruh Anggotanya dan Seluruh Persenjataannya. Sk. Suara Merdeka tanggal 27 Desember 1954

<sup>150</sup> Dokumen Angkatan Darat Terr. IV Diponegoro, Seruan dan Instruksi No. B. 1/Instt/IV/55 tanggal 6 Februari 1955

Jaksa, Hakim, Polisi dan Tentara bertanggung jawab atas penerimaan anggota Gerakan MMC. Kedua, adalah pada setiap kecamatan supaya dibentuk Badan Penjarangan Pertama (BPP), yang bertugas memeriksa orang-orang yang dicurigai tersangkut Gerakan MMC dan kemudian menyerahkan mereka ke kabupaten untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan.<sup>151</sup>

Nampaknya instruksi dari Kol. Bachrun ini tidak secara cepat diterima oleh para anggota Gerakan MMC, mengingat anggota tersebut mengambil tempat persembunyian di daerah gunung dan hutan. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya kontak senjata antara anggota Gerakan MMC dengan TNI, sebagai contoh peristiwa yang terjadi tanggal 6 Februari 1955. Pada peristiwa itu, terjadi tembakan-menembak antara TNI dari Batalyon 439 dengan 25 anggota gerombolan di kawasan hutan Tutupan. Dalam peristiwa tersebut 2 anggota Gerakan MMC tewas.<sup>152</sup>

Adanya kontinuitas operasi pembersihan dan instruksi untuk menyerah pada yang berwajib, mengakibatkan terjadi perpecahan dikalangan anggota Gerakan MMC. Ada dua kelompok yang berbeda pendapat, di satu pihak menghendaki menyerahkan diri kepada TNI, yang didukung oleh Umar Yunani dan di lain pihak adalah kelompok yang tidak mau menyerahkan diri yang didukung oleh kelompok garis keras

---

<sup>151</sup> Dokumen Dewan Keamanan Nasional, Pedoman Bekerja tanggal 2 Februari 1955

<sup>152</sup> Instruksi Panglima Divisi IV Diponegoro pada Gerombolan, Sk. Suara Merdeka tanggal 11 Februari 1955

seperti kelompok Multayat.<sup>153</sup>

Semenjak dikeluarkannya seruan itu, maka antara tanggal 6 sampai 28 Februari 1955, telah sebanyak 1911 orang yang menyerahkan diri pada pemerintah. Dari sejumlah itu tidak semuanya ditawan, sebab kebanyakan mereka ikut gerombolan karena hanya ikut-ikutan membantu karena takut dibunuh.<sup>154</sup>

Melihat jumlah anggota simpatisan Gerakan MMC yang sangat banyak itu dan tidak semuanya terlibat secara langsung dalam aksi teror, maka Kol. Bachrun memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan secara intensif melalui BPP. Mereka yang berdasar *vraagputten* (pertanyaan dasar) ternyata tidak menunjukkan bukti terdapatnya kesalahan kriminal, akan diberikan surat jalan dan dikembalikan ke dalam masyarakat. Bagi mereka yang terlibat tindak pidana kriminal, supaya segera dikirim ke kabupaten untuk segera diperiksa oleh panitia screening, untuk segera diproses melalui pengadilan.<sup>155</sup>

Mengingat banyaknya orang yang menyerahkan diri pada aparat keamanan dan kebanyakan mereka yang menyerah itu adalah rakyat yang ikut terlibat karena takut ancaman dari gerombolan, maka tidak ada pilihan lain dari Kol. Bachrun selain mengadakan operasi pembersihan bagi mereka

<sup>153</sup> 555 Orang MMC Telah Menyerah ? Penyerahan tidak dengan senjata- Multayat Memang Mencegah Penyerahan, Sk Suara Merdeka tanggal 2 Maret 1955

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Dokumen Dewan Keamanan Nasional, op cit.

yang tidak menghiraukan seruan. Untuk itu operasi pembersihan dengan melibatkan seluruh jajaran militer di tingkat KDM (Komando Distrik Militer) di wilayah sekitar Merpai Merbabu dengan ditambah kesatuan dari Divisi VII Diponegoro, dilaksanakan di daerah operasi Gerakan MMC yang meliputi hutan-hutan, gua-gua dan jurang-jurang di daerah Merapi-Merbabu. Dalam operasi ini dilibatkan pula rakyat sebagai penunjuk jalan dari kesatuan TNI yang memasuki daerah mereka. Akibat dari adanya operasi pembersihan ini banyak tokoh Gerakan MMC yang terbunuh. Sebagai contoh adalah peristiwa pembersihan yang dilakukan pada bulan Mei 1955 di daerah Ambarawa yang mengakibatkan tokoh-tokoh seperti Sudjud Kridosardjono, Digdo Sadli, Mardjo Djenggot, Amat Kijar, S. Ripto dan Darsono tewas tertembak, sedangkan Umar Yunani dan Sastro Sadjad berhasil melarikan diri.<sup>156</sup> Matinya tokoh-tokoh penting itu mengakibatkan Gerakan MMC menjadi kacau dan tidak mampu melanjutkan gerakan lagi.

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa untuk daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai dan dibersihkan TNI dari pengaruh Gerakan MMC, maka untuk selanjutnya menjadi tugas Pamong Praja untuk mengadakan penerangan dan pembinaan terhadap penduduk. Dalam pembinaan itu, rakyat dianjurkan untuk tidak takut pada anggota Gerakan MMC. Kalau ada anggota yang kebetulan datang supaya dilaporkan atau dikeroyok oleh orang sedesa dan kalau

<sup>156</sup> Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 565

melawan supaya dibunuh.<sup>157</sup>

Tindakan lain yang ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan memperhatikan keadaan rakyat. Sebagai contoh adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati Boyolali, yaitu M.S. Handjojo, yang bilamana ada korban jatuh dari rakyat sebagai korban keganasan Gerakan MMC adalah dengan memberikan santunan sebesar Rp. 500.00. Selain itu adalah mengadakan peninjauan dan kalau perlu bermalam di daerah sarang Gerakan MMC. Tindakan lain adalah dengan mewajibkan kepada aparat daerah, serendah-rendahnya Camat, untuk selalu menghadiri pemakaman korban keganasan Gerakan MMC dan yang terakhir adalah mengaktifkan kembali OPR.<sup>158</sup>

Tindakan yang dilakukan itu kalau kita analisa merupakan suatu tindakan untuk menangkis adanya isu-isu yang dilontarkan oleh Gerakan MMC ataupun OTB. Seperti yang kita ketahui, bahwa mereka menyebarkan isu-isu atau propaganda yang mendiskreditkan pemerintah yang tidak mau memperhatikan nasib rakyat. Dengan tindakan itu, diharapkan rakyat sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Gerakan MMC adalah tidak benar, sehingga mereka akan ikut terlibat menentang Gerakan MMC, dan itu memang terwujud dengan ikut berperannya rakyat dalam menumpas Gerakan MMC.

---

<sup>157</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 15 November 1992

<sup>158</sup> M.S. Handjojo, op cit. h. 3-4

### 3. Keberanian Rakyat Dalam Melawan Gerakan MMC.

Salah satu unsur yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan menumpas anggota Gerakan MMC adalah ikut sertanya rakyat dalam menghadapi setiap ancaman yang mengancam dirinya sendiri. Tindakan aparat keamanan dalam mengadakan operasi pembersihan terhadap anggota Gerakan MMC, akan menjadi tidak berguna apabila rakyat apatis dan tidak mau bekerjasama membantu memecahkan masalahnya sendiri.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah aparat keamanan dan pamong praja adalah mengadakan penerangan kepada rakyat tentang perlunya rakyat berani menghadapi ancaman yang datang dari gerombolan. Selain itu, pada masing-masing pemerintah daerah telah diaktifkan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR. ; sekarang Hansip). Terpadunya aparat keamanan dan pemerintah daerah yang memberikan perhatian besar, menjadikan rakyat bangkit keberaniannya untuk melawan anggota Gerakan MMC.

Tindakan yang sering dilakukan rakyat berkaitan dengan perlawanan terhadap anggota Gerakan MMC adalah dengan memberikan informasi tentang tempat persembunyian anggota Gerakan MMC kepada aparat keamanan. Tindakan yang lain adalah mengadakan penangkapan sendiri terhadap anggota Gerakan MMC yang tengah beroperasi di daerahnya dengan cara mengeroyoknya secara beramai-ramai, sehingga tidak jarang anggota Gerakan MMC yang tertangkap itu ada

yang tawas karena menjadi pelampiasan dedam rakyat.<sup>159</sup>

Keberanian rakyat dan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR), dalam menghadapi ancaman gerombolan terungkap daam salah satu sumber yang menyatakan :

*"... di desa<sup>2</sup> daerah ketjamatan Ngablak dan Pakis , Magelang, kini oleh pemuda-pemuda OPR telah dilantjarkan gerakan menentang MMC dengan "menjiapkan" bila mereka berani masuk ke desa untuk "menarik Pajak maupun jaminan" <sup>160</sup>*

Akibat dari keberanian rakyat, maka pada tanggal 13 Desember 1954, pukul 06.00, telah terjadi suatu perkelahian seru antara Rusito, seorang tokoh penting Gerakan MMC, melawan anggota OPR dengan dibantu semua rakyat desa Ngabean, kec. Pakis. Akibat perkelahian itu Rusito terbunuh.<sup>161</sup>

Selain berhasil membunuh Rusito, masih banyak lagi tokoh-tokoh Gerakan MMC yang tertangkap dan terbunuh karena keberanian rakyat, seperti Margo Bluwuk, yang tertangkap sewaktu menarik pajak di desa Gendangan Wetan, Sastro Sadjat yang tertangkap di daerah kec. Ampel. Suradi Lontong, Margono, Saelan dan sebagainya.

<sup>159</sup> A.P. Soeripto, Wawancara tanggal 2 Agustus 1992. Penda-pat ini dibenarkan oleh Soebadi Hardjoloekito dan Soedarmo, yang intinya mengatakan bahwa rakyat mengungkapkan rasa dendamnya dengan menghakimi sendiri anggota Gerakan MMC yang ditangkap.

<sup>160</sup> Aksi Terhadap MMC, OPR Semakin Aktif Bengan Bantuan Rakyat-Margo Bluwuk Tertangkap dan Suradi Lontong Menyerah-862 Orang Menyerahkan diri pada TNI, Sk. Suara Merdeka tanggal 15 Desember 1954

<sup>161</sup> ibid.



Keberanian rakyat yang bekerja sama dengan OPR dalam menghadapi ancaman yang dilakukan oleh anggota Gerakan MMC, menyebabkan ada rasa ketakutan dari anggota gerakan untuk masuk ke desa. Menurut pengakuan Margo Bluwuk, mereka kuatir kalau masuk desa akan "disiapkan" oleh rakyat.<sup>162</sup>

Pada tanggal 2 Juni 1955, terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan aparat keamanan, pemerintah, rakyat dan bahkan bagi anggota Gerakan MMC sendiri, yaitu peristiwa terbunuhnya tokoh nomor satu Gerakan MMC, Umar Yunani. Ia terbunuh di Karanggede, kab Boyolali oleh rakyat yang menangkapnya. Peristiwa itu banyak diungkap dalam beberapa sumber, diantaranya adalah oleh M.S. Handjojo, yang menyatakan sebagai berikut :

*"...Pada tanggal 2 Djuni 1955. Umar Junani jang dikenal sebagai putjuk pimpinan MMC datang di Karanggede. Karena gerak-geriknja sangat menjurigan, maka OPR setempat berusaha mengikutinja. Namun tiba2 Umar Junani melepaskan tembakan dan mengenai seorang anggota OPR. Ternjata peluru ini hanja berupa kertas, jang diartikan bahwa pistol jang dibawa Umar Junani tidaklah berisi peluru. Umar Junani jang dilihat seorang diri lalu dikepung dan akhirnya dapat ditangkap. Setelah ditangkap, kaki dan tangannja diikatkan pada sebatang bambu, kemudian setjara bersama-sama dipikul seperti babi menuju ke kantor Polisi Karanggede. Selama perjalanan, Umar Junani dibentur-benturkan pada gundukan batu, sehingga setelah sampai di kantor Polisi, Umar Junani sudah tidak bernjawa. Dari Karanggede, majatnja dibawa ke Bojolali untuk diperiksa kebenarannja. Setelah diperiksa oleh suatu tim khusus, disimpulkan bahwa majat tersebut memang Umar Junani jang dikenal*

*sebagai petunjuk pimpinan MMC.*"<sup>163</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas, merupakan suatu bukti bahwa rakyat mengungkapkan rasa dendamnya terhadap anggota atau bahkan pimpinan Gerakan MMC dengan mengadakan penghakiman sendiri terhadap mereka yang tertangkap. Dengan terbunuhnya pimpinan Gerakan MMC itu, maka kegiatan gerombolan di daerah sekitar Merapi Merbabu mulai menyusut dan akhirnya hilang.

## E. Akibat Gerakan MMC

Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu ciri khas Gerakan MMC adalah melakukan aksi-aksi kekerasan dan teror, seperti perampokan, pembunuhan, agitasi dan penghadangan aparat keamanan untuk mendapatkan senjata, sehingga mengakibatkan suasana kacau dan ketakutan baik bagi rakyat maupun pamong praja. Aksi-aksi yang dilakukan itu ternyata membawa akibat di bidang sosial, ekonomi maupun politik.

### 1. Sosial Ekonomi.

Perampokan yang dilakukan oleh Gerakan MMC terhadap rakyat kecil atau petani dengan sasaran mengambil secara paksa ternak seperti Kerbau, Sapi, kuda, kambing dan sebagainya ataupun kekayaan penduduk lainnya, seperti

<sup>163</sup> M.S. Handjojo, *op cit.* h. 5. Baca pula "Pemimpin Tertingginya Dipukul Seperti Babi" Sk. Berita Buana tanggal 27 Januari 1977. Selanjutnya pernyataan itu didukung oleh Sardi-man, Wawancara tanggal 19 September 1992

uang, perhiasan dan lain-lain, membawa akibat tingkat produksi mengalami kemerosotan. Perlu diingat bahwa dengan diambilnya ternak yang berfungsi menggantikan tenaga kerja manusia, maka membawa akibat petani harus mengerjakan lahan pertaniannya dengan tenaga manusia.

Dengan merosotnya tingkat produksi rakyat, maka secara langsung membawa pengaruh pula terhadap tingkat kehidupan ekonomi. Selain itu adanya aksi-aksi perampokan dan pencurian terhadap kekayaan pribadi lainnya, akan menjadikan penduduk yang semula kaya menjadi miskin dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Kejadian tersebut akan menjadikan suatu bukti keberhasilan aksi Gerakan MMC dalam menciptakan suasana kacau menjadi semakin kacau, khususnya di bidang sosial ekonomi.<sup>164</sup>

Tindakan yang telah dilakukan oleh Gerakan MMC melalui aksi-aksi perampokan, secara tidak langsung telah menguntungkan komunis. Perlu diingat, bahwa dalam suasana ekonomi yang kacau dan terjadinya jurang perbedaan ekonomi yang cukup besar antara golongan kecil dengan golongan besar (yang dalam hal ini adalah penguasa), merupakan sarana yang ideal untuk menumbuhkan paham komunis. Kemiskinan yang terjadi itu memudahkan rakyat termakan propaganda yang dilancarkan oleh golongan kiri, yaitu semboyan "sama rata sama rasa".

---

<sup>164</sup> A.H. Nasution, Pemberontakan PKI 1948 (bandung: Angkasa, 1976), h. 3 - 15. Selanjutnya dikatakan bahwa PKI harus menanamkan pengaruh di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan.

## 2. Bidang Politik.

Keberhasilan Gerakan MMC dalam melaksanakan aksi terornya dan kegagalan aparat keamanan mengatasi ancaman yang dilakukan oleh gerombolan, mengakibatkan timbul rasa apatis dan ketidakpercayaan dalam sebagian masyarakat. Seringkali mereka bersikap masa bodoh terhadap setiap usaha yang dilakukan pemerintah. Situasi yang demikianlah yang dikehendaki oleh golongan kiri, karena dalam situasi yang demikian inilah mereka dapat termakan agitasi dan pengaruh gerakan MMC.

Perampokan yang dilakukan oleh anggota Gerakan MMC selain mengadakan teror dalam masyarakat, ternyata mempunyai tujuan politis, yaitu pertama adalah mencari sumber dana untuk kehidupan anggotanya dan membiayai gerakan mereka.<sup>165</sup>

Seperti yang telah diutarakan diatas, bahwa selain mengadakan perampokan mereka juga mengadakan pembunuhan, khususnya terhadap pamong desa dan aparat keamanan. Ternyata aksi pembunuhan itu memang direncanakan oleh Gerakan MMC dengan mempunyai maksud, pertama, adalah mengadakan teror mental baik kepada rakyat, aparat keamanan dan pamong desa, bahwa dimanapun juga anggota MMC berani melawan mereka. Kedua, adalah sebagai suatu cara untuk mengganti pamong desa, khususnya yang tidak sepaham dengan mereka, untuk kemudian diganti dengan pamong

---

<sup>165</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 15 November 1992

desa yang sudah dipersiapkan mereka sendiri yang nyata-nyata loyal kepada mereka.<sup>166</sup>

Usaha Gerakan MMC untuk menarik simpati dari perangkat desa dan masyarakatnya di beberapa tempat ternyata berhasil dengan memuaskan. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya kejadian yang dilaporkan sebagai berikut :

*"...setelah berturut-turut diadakan penangkapan terhadap orang2 yang didakwa mengadakan hubungan dengan pihak2 gerombolan, maka dapat diterangkan dari seorang kabajan (tawanan) yang membuka tabir dari seorang yang ternyata memimpin/mengemudikan organisasi musuh (lurah Pakis). Dengan adanya penangkapan kabajan tersebut, maka reaktie penduduk mengadakan demonstrasi yang menuntut dikembalikannya kabajan tersebut. Moment demonstrasi dapat digunakan untuk mengadakan penangkapan terhadap pimpinan demonstrasi tersebut, yang ternyata bahwa demonstrasi itu atas perintah lurah desa yang didampingi top figur MMC yang bernama Darmo Kreten."<sup>167</sup>*

Peristiwa yang terjadi di desa pakis itu merupakan bukti keberhasilan Gerakan MMC dalam mengagitasi dan menarik perangkat desa dan penduduk sehingga mereka dapat diarahkan sesuai dengan kemauan mereka.

Diubahnya cara perjuangan Gerakan MMC oleh Umar Yunani menjadi perjuangan infiltrasi, maka akan memperlihatkan bahwa Gerakan MMC mulai menuju ke arah perjuangan yang berlandaskan politik yang condong ke kiri. Hal ini bila kita hubungkan dengan pemimpinnya seperti Umar Yunani yang merupakan tokoh SARBUPRI, Sastro Sadjad yang merupakan anggota PPDI (Persatuan Pamong Desa Indonesia), yang merupakan suatu bentuk organisasi yang

---

166 Ibid.

167 Dokumen Semdam VII Diponegoro, op cit. h. 7

condong ke komunis, maka paling tidak Gerakan MMC mempunyai hubungan dengan golongan kiri.<sup>168</sup>

Ironisnya, sebagian rakyat mendukung mereka karena anggota Gerakan MMC dari Persatuan Korban Rasionalisasi adalah bekas pejuang yang tergabung dalam laskar-laskar rakyat yang selama revolusi fisik banyak membantu rakyat. Pada masa revolusi fisik (1945-1949), masyarakat di sekitar gunung Merapi dan Merbabu selalu bersama-sama dengan pejuang mempertahankan kemerdekaan. Di satu pihak para pejuang selalu melindungi rakyat dari serangan musuh dan di pihak lain masyarakat selalu membantu para pejuang dalam penyediaan materi.

Situasi kacau yang diciptakan oleh Gerakan MMC ternyata sangat menguntungkan PKI, terutama dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955. Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan sebagai berikut :

*"...Dalam menghadapi Pemilihan Umum, para anggota gerombolan mendukung penuh ideologi kiri dalam andjurannya yang ditunjukkan kepada rakyat yang menjadi pengaruhnya supaya rakyat suka memilih orang-orang yang bersymbol palu arit dan patjul padi. Para pengikut gerombolan yang telah tertangkap, ternyata sebagian besar terdiri dari pengikut dan petjinta/tjalon anggota PKI, diantaranya seorang yang bernama Hardjo Sutirto. Ini berhubungan erat dengan tokoh sector F.27 RI, Sutomo seorang anggota BTI. Tsb 1 dan 2 telah tertangkap oleh kita, sedang tersebut 2 telah tertjatat namanya dalam seruan S.C.P.K.I. Magelang, pada tanggal 12/6-54, selaku*

---

<sup>168</sup> Soebadi Hardjoloekito, Wawancara tanggal 9 September 1992. Dikatakan bahwa Sastro Sadjad sebelumnya adalah seorang pamong desa (bayan) dari desa Candisari, kec. Ampel, kab. Boyolali. Pada waktu diperiksa, secara implisit ia mengakui adanya hubungan kelompoknya dengan golongan kiri.

*Panitia Actie Pemilihan Umum Ketj. Pakis.*<sup>169</sup>

Jadi jelas bahwa kecuali menciptakan situasi yang kacau, Gerakan MMC juga berusaha membawa atau mengarahkan para pendukungnya agar bersedia mendukung PKI dalam pemilu tahun 1955, dan itu dibuktikan dengan kemenangan mutlak pihak PKI dalam tahun 1955 di daerah sekitar Merapi-Merbabu.

Pemilu tahun 1955 menjadikan daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah sekitar Merapi-Merbabu, menjadi daerah basis PKI. Pemilu tingkat daerah tahun 1958, mengakibatkan terpilihnya anggota PKI menjadi Bupati atau Walikota, seperti di Boyolali, Semarang, Salatiga, Magelang dan Surakarta, juga menjabat sebagai anggota DPRD yang sebagian besar dari anggota PKI. Suatu bukti bahwa daerah Merapi-Merbabu merupakan suatu daerah yang dipersiapkan PKI adalah dalam Pemberontakan PKI (G.30.S./PKI) yang mengalami kegagalan, maka banyak tokoh-tokoh PKI baik pusat, seperti D.N. Aidit, maupun tokoh daerah Jawa Tengah, seperti eks. Kolonel Suhirman, eks. Kolonel Mardjono dan eks. Mayor Soekirno yang bersembunyi di daerah sekitar Gunung Merapi-Merbabu.<sup>170</sup>

Berdasarkan pada kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh Gerakan MMC kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi dari perjuangan dengan cara kekerasan

<sup>169</sup> Dokumen Semdam VII Diponegoro, *op cit.* h. 6

<sup>170</sup> M.S. Handjojo, *op cit.* h. 7-8

untuk menciptakan suasana kacau, khususnya di bidang ekonomi dan cara agitasi atau propaganda yang mendiskreditkan pemerintah yang tidak becus memperhatikan rakyat, sampai akhirnya pada tahun 1965 daerah sekitar gunung Merapi Merbabu menjadi basis kekuatan pemberontakan komunis, maka dapat kita lihat adanya suatu hubungan yang tidak tampak antara Gerakan MMC ini dengan komunis.





# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## B A B V

### K E S I M P U L A N

Sejarah telah mencatat, bahwa pada tahun 1950 - 1955 telah terjadi suatu peristiwa kekerasan, teror dan agitasi yang dilakukan oleh suatu gerakan massa yang dikenal sebagai Gerakan Merapi Merbabu Komplek. Gerakan ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses yang sangat panjang.

Ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka semenjak itu bangsa Indonesia memasuki suatu masa untuk mengatur dirinya sendiri dan lepas dari tangan penjajahan. Banyak harapan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk hidup sebagai suatu rakyat yang merdeka, khususnya adalah keinginan untuk hidup yang layak, akan tetapi keinginan tersebut adalah sulit untuk dipenuhi, mengingat pada masa itu bangsa kita sedang menghadapi banyak permasalahan.

Salah satu masalah yang muncul adalah adanya petentangan yang disebabkan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Belum dewasanya sikap mental bangsa Indonesia dalam berpolitik mengakibatkan terjadinya suatu persaingan yang tidak sehat untuk tampil sebagai penguasa yang berpengaruh dan mendominasi pemerintahan, demi kepentingan golongannya. Suasana yang demikian ini membawa pengaruh pada pemerintahan yang mau tidak mau harus mengkonsentrasikan dirinya agar tidak mendapatkan ronggongan dari golongan yang menjadi lawan.

Silih bergantinya kabinet yang berkuasa mengakibatkan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak segera terpecahkan, sehingga timbul ketidakpercayaan dan kekecewaan dari rakyat yang menganggap pemerintah tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Rasa kecewa itu menjadi semakin berkembang dengan adanya pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Sebagai ungkapan rasa ketidakpuasan rakyat akan kebijaksanaan pemerintah itulah, maka mulai bermunculan gerakan protes atau pemberontakan.

Salah satu bukti dari ungkapan ketidakpuasan itu, adalah munculnya suatu gerakan yang dikenal dengan Gerakan Merapi Merbabu Complex yang terjadi di daerah Jawa Tengah, tepatnya di sekitar gunung Merapi Merbabu, yang terjadi pada tahun 1950 - 1955. Pada waktu itu, masyarakat yang tinggal di daerah itu tengah menghadapi suatu rasa tidak puas dan sakit hati terhadap kebijaksanaan yang diambil pemerintah. Masalah pokok yang menimbulkan rasa ketidakpuasan itu adalah adanya hasil persetujuan KMB, yang mengakibatkan rakyat harus kehilangan tanah garapannya, serta adanya program rasionalisasi terhadap laskar yang ada di daerah tersebut.

Keadaan yang demikian dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak Komunis, yang pada tahun 1948 gagal mengadakan perebutan kekuasaan di Madiun. Sisa-sisa anggota komunis yang berhasil lari atau sengaja dilepaskan oleh pemerintah karena alasan politis, banyak yang berkumpul di daerah sekitar Merapi dan Merbabu untuk menyusun kekuatan

kembali bergabung dengan orang-orang yang tengah mengalami kekecewaan terhadap pemerintah. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rahasia, maka akhirnya mereka dapat membentuk suatu organisasi ilegal yang sering juga disebut gerakan bawah tanah .

Faktor alam tampaknya mendukung kelompok kelompok yang bergerak di sekitar gunung Merapi-Merbabu, karena dengan kondisi alam yang diwarnai oleh hutan yang lebat, jurang yang dalam serta jauh dari pengawasan alat negara, semakin memperkokoh Gerakan ini untuk melakukan aksinya ataupun untuk sembunyi.

Dengan terbentuknya suatu organisasi ilegal yang bergerak di bawah tanah ini, maka organisasi ini segera menyebar dalam kehidupan masyarakat. Adapun tugas mereka adalah menyebarkan agitasi di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi rasa kecewa dan sakit hati terhadap pemerintah, untuk bergabung dalam kelompok mereka. Usaha itu tampaknya membawa hasil, terbukti dengan munculnya suatu kelompok bersenjata di daerah sekitar Merapi dan Merbabu yang sengaja menciptakan teror. kekacauan dan ketakutan di daerah tersebut. Kelompok itulah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan MMC.

Pada awal mulanya, berhasil terbentuk golongan Jago, yang terdiri dari rampok, garong dan sebagainya, dibawah pimpinan seorang tokoh bernama Suradi Bledag. Gerombolan Suradi berhasil menciptakan suatu gelombang teror melalui perampokan, penculikan dan pembunuhan terhadap masyarakat setempat. Keberhasilan kelompok

Suradi ini ternyata tidak terlepas dari adanya peranan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di daerah sekitar Merapi Merbabu, dengan memberikan bantuan persenjataan. Kelompok ini akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah melalui TNI, bahkan Suradi Bledog sendiri tertembak mati pada tahun 1951.

Hancurnya kelompok Jago tidak berarti keamanan daerah ini kembali normal, karena muncul kelompok lain pengganti Kelompok Jago, yaitu kelompok bekas pejuang yang terkena program rasionalisasi. Munculnya kelompok bekas pejuang yang menamakan dirinya Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR) dibawah pimpinan Umar Yunani kembali menciptakan teror dalam masyarakat. Sama halnya dengan kelompok Jago, maka PKR juga mengadakan serangkaian aksi perampokan, penculikan dan pembunuhan terhadap penduduk, anggota pamong praja dan aparat pemerintah.

Apabila kita perhatikan dan kita kaitkan dari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gerakan MMC berupa teror, agitasi dan permusuhan, maka dapat kita lihat adanya suatu tendensi politis dari tindakan tersebut. Kita tentu ingat tentang suatu strategi yang digunakan oleh kelompok komunis, yaitu dengan menciptakan suatu situasi yang kacau di bidang ekonomi, sosial ataupun politik. Dalam situasi yang kacau komunis akan dapat tumbuh dengan subur. Dengan demikian, yang dilakukan oleh Gerakan MMC secara tidak langsung adalah merupakan rangkaian usaha dalam menciptakan masyarakat komunis di sekitar daerah Merapi Merbabu. Oleh karena kebanyakan

pendukung dari Gerakan MMC tersebut adalah orang-orang yang kecewa atau tidak puas atas kebijaksanaan pemerintah, maka gerakan itu dapat dikatakan pula sebagai gerakan "ketidakpuasan".

Aksi-aksi yang dilakukan Gerakan MMC merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional, maka pemerintah tidak tinggal diam dengan adanya aksi-aksi ini. Melalui aparat keamanan (TNI, Polisi Negara, OPR dan lain sebagainya), pemerintah mengadakan operasi pembersihan, baik yang dilakukan militer ataupun sipil, seperti Operasi Merdeka Timur (OMT), Operasi Tri Tunggal (OTT).

Tewas dan tertangkapnya tokoh-tokoh utama dalam Gerakan MMC, seperti Suradi Bledog, Darmo pendot dan lain lain dari kelompok Jago, ataupun tokoh-tokoh seperti Umar Yunani, Sudjud Kridosardjono, Waluyo Muksin, Margo Bluwuk, Suradi Lontong dan lain lain, menyebabkan kelompok MMC tidak mampu lagi melanjutkan gerakannya.

Dengan berakhirnya gerakan yang dilakukan oleh MMC pada awal tahun 1957, adalah merupakan suatu bukti keberhasilan yang diambil oleh pemerintah dalam usaha menciptakan suatu kondisi yang aman dalam masyarakat. Akan tetapi di lain pihak, bagi Gerakan MMC, tindakan yang mereka lakukan telah berhasil menciptakan suatu suasana yang kacau, sehingga rakyat mudah untuk dipengaruhi untuk membeci pemerintah, dan sikap yang demikian ini yang sengaja dikembangkan oleh PKI.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## D A F T A R P U S T A K A

### 1. Buku-buku :

- Abdulah, Taufik  
1979 Sejarah Lokal di Indonesia,  
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Abenstein, William - Esdwin Fogelman  
1987 Isme-Isme Dewasa Ini  
(Jakarta : Penerbit Airlangga)
- Abidin, AZ. dan Baharudin Lopa  
1968 Bahaya Komunisme  
(Jakarta: Bulan Bintang)
- Adisusilo, Sutardjo  
1989 "Marxisme dan Dampaknya Terhadap Eropa, Ma-  
kalah Seminar Kopertis Wilayah V
- Bonaro dan Hari  
1958 Apa yag Harus Kita Ketahui Mengenai Komunis-  
me  
(Djakarta: Penerbit Endang)
- Boerhan dan Soebekti  
1965 Fakta dan Latar Belakang Gerakan 30 Septem-  
ber  
(Jakarta: Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahu-  
an dan Kebudayaan Kosgoro)
- Boeke, J. H.  
1983 Pra Kapitalisme di Asia  
(Jakarta: Sinar Harapan)
- Brackman, Arnold C.  
1963 Indonesia Communism a History  
(New York: Frederick A. PPreger Publisher)
- Budihardjo, Miriam  
1986 Dasar-Dasar Ilmu Politik  
(Jakarta: PT. Gramedia)
- Condrolukito, Darmawan  
1965 Ledakan Fitnah Subversif G.30.S/PKI  
(Jakarta: PT> Mahkota)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1986 30 Tahun Indonesia Merdeka  
(Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
1987 Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945  
1949) di Daerah Istemewa Yogyakarta  
(Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan doku-  
mentasi Kebudayaan DIY dan DEPDIBUD)
- Dinas Pembinaan Mental AD Bandung  
tt Sekitar Merapi Merbabu Complek  
(Bandung: Dok. Bagian Arsip Subdisdokjarah  
Mustak)
- Dinas Sejarah TNI AD  
1982 Sejarah TNI KODAM VII Diponegoro  
(Semarang: Yayasan Penerbit Diponegoro)

- Dinas Sejarah Militer KODAM VII Diponegoro  
 1977 Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya  
 (Semarang: CV. Borobudur)
- Frederick, William H.  
 1986 Gelora Api Revolusi: Pendudukan Jepang  
 (Jakarta: PT. Gramedia)
- Gani Ismail, Soelistyati  
 1984 Pengantar Ilmu Politik  
 (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Handjojo, M.S.  
 1977 Kisah Lahirnya Gerombolan Merapi Merbabu Komplek  
 (Salatiga: tp)
- Hindley, Donald  
 1964 The Communist Party of Indonesia 1951-1963  
 (Los Angeles: University of California Press)
- Kahin, George McT.  
 1966 Nationalism and Revolutions in Indonesia  
 (Ithaca: New York Cornell University Press)
- Kantor Statistik Pemda Boyolali  
 1974 Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali  
 (Boyolali: tp)
- Kantor Departemen Penerangan Boyolali  
 1972 Data dan Peta Wilayah Kab. Boyolali  
 (Boyolali: tp)
- Kartodirdjo, Sartono  
 1974 Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial  
 (Jakarta: LP3ES)
- Kartodirdjo, Sartono  
 1981 Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Perspektivisme Struktural  
 (Jakarta: LP3ES)
- Kartono, Kartini  
 1984 Pemeimpin dan Kepemimpinan  
 (Jakarta: CV. Rajawali)
- Keller, Suzanne  
 1984 Penguasa dan Kelompok Elite  
 (Jakarta: LP3ES)
- Koentjaraningrat  
 1981 Kebudayaan Mentakitas dan Pembangunan  
 (Jakarta: T. Gramedia)
- Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan  
 1983 Pemberontakan Komunis di Indonesia  
 (Jakarta: Yudha Gama Corp)
- Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan  
 1983 Rangkaian Pemberontakan Komunis  
 (Jakarta: Yudha Gama Corp)
- Malaka, Tan  
 1949 GERPOLEK (Gerakan Politik Ekonomi)  
 (Yogyakarta: Pustaka Murba)
- Moedjanto, G.  
 1988 Indonesia Abad XX : (I)  
 (Yogyakarta: Kanisius)

- Nagazumi, Akira  
1988 Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang  
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Nasution, A.H.  
1963 Menuju Tentara Rakyat  
(Jakarta: Yayasan Penerbit Minang)
- Nasution, A.H.  
1976 Pemberontakan PKI 1948  
(Bandung: Angkasa)
- Notosusanto, Nugroho  
1985 Pejuang dan Prajurit; Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI  
(Jakarta: Penerbit Sinar Harapan)
- Onghokham  
1980 Rakyat dan Negara  
(Jakarta: LPP3ES)
- Onghokham  
1982 Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia  
(Jakarta: LPP3ES)
- Paloma, Margaret M.  
1984 Sosiologi Kontemporer  
(Jakarta: Rajawali)
- Pelzer, Karl J.  
1991 Sengketa Agraria Penguasa Perkebunan Melawan Petani  
(Jakarta: Penerbit Sinar Harapan)
- Sanit, Arbi  
1982 Sistem Politik di Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik Pembangunan  
(Jakarta: CV. Rajawali)
- Sejarah Militer DAM VII/Diponegoro  
1971 Sejarah TNI AD KODAM VII/Diponegoro  
(Semarang: CV. Borobudur)
- Sejarah Militer Tjabang 073 Komando Resort Makutoromo  
1976 Peristiwa Pengacauan Merapi Merbabuu Complex  
(Salatiga: tp)
- Semdam VII Diponegoro  
1968 Sejarah TNI KODAM VII Diponegoro  
(Semarang: Jajasan Penerbit Diponegoro)
- Soekanto, MS.  
1955 Meninjau Hukum Adat Indonesia  
(Jakarta: Soeroengan)
- Soekanto, Soedjono  
1982 Teori Sosiologi Dalam Pribadi Masyarakat  
(Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sudarmanto, J.B.  
1987 Agama dan Idiologi  
(Jakarta: Penerbit Kanisius)
- Sundhausen, Ulf  
1982 Politik Militer Indonesia 1945 - 1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI  
(Jakarta: LP3ES)
- Suryo, Joko  
1985 Gerakan Petani: Prisma No. 11  
(Jakarta: LP3ES)



- Susanto, Phil Astrid S.  
1983 Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial  
(Jakarta: Bina Cipta)
- Sutarto, B  
tt Monografi Daerah Jawa Tengah  
(Jakarta; Ditjen Dedikbud)
- Djik, Cornelis van  
1983 Daruul Islam; Sebuah Pemberontakan  
(Jakarta: Penerbit Grafiti Press)

2. Dokumen-dokumen :

- Dokumen Smdam VII Diponegoro  
Peraturan Darurat No IV Komando PPS II Rayon III  
Boyolali tanggal 29 April 1950
- Dokumen Smdam VII Diponegoro  
Yentang Maklumat No 5, tanggal 26 Oktober 1945
- Dokumen Smdam VII Diponegoro  
Penetapan Presidenn Republik Indoesia, tanggal  
3 Juni 1947
- Dokumen AD Resimen Inf/Sub. Terr 13 P. Diponegoro  
Verslag Rapat Merapi Merbabu Complek, tanggal 25  
Agustus 1952
- Dokumen Smdam VII Diponegoro  
Laporan Kepala Polisi Luar Kota Klaten, tanggal  
27 Desember 1950
- Dokumentasi Penguasa Perang Jawa Twngah dan Yogyakarta  
Organisasi Yang Berlindung di Bawah PKI No. 85/KOGAM  
1966, tanggal 3 Mei 1966
- Dokumen Smdam VII Doiponegoro  
Organisasi Putra Proklamasi Republik Indonesia  
(OPPRI), Semarang tt.
- Arsip Sekretaris Negara  
Tentang Laporan Residen Semarang No. BSR.18/268/15,  
tanggal 4 Desember 1952
- Dokumen Sejarah Militer AD  
Keputusan Rapat tanggal 20 Maret 1953, tanggal 20  
Maret 1953.
- Dokumen Sejarah Militer AD  
Peraturan-Peraturan Khusus Dalam Wilayah Teritorium  
Comando Sector 17, Semarang tanggal 15 Mei 1953.
- Dokumen Angkatan Perang Teritorium VII Diponegoro  
Gerombolan MMC Pecah Menjadi Dua ; No. 7  
Semarang, April 1954
- Dokumen AD Terrr.IV Diponegoro  
Seruan dan Instruksi o. B 1/Instr/IV/55, tanggal  
6 Februari 1955.
- Dokumen Dewan Keamanan Nasional  
Pedoman Bbekerja, tanggal 2 Februari 1955.

3. Sumber dari Surat Kabar

Herbert Feith

"Tahun 1950-aan Negara Masih Terlalu Lemah", BERNAS,  
tanggal 17 Februari 1992

Suhardiman

"Bicara Soal Basket PKI", Sk. Simponi, tanggal  
tanggal 10 Juli 1988.

"Perampokan Besar di Boyolali"

Suara Rakjat, tanggal 21 Januari 1950.

"Operasi terhadap Gerombolan Grajak; 5 orang benggol ter-  
tangkap di Musuk"

Sk. Merdeka, tanggal 7 April 1950.

"Daerah Merapi - Merbabu; Suatu Daerah Rawan Kejahatan"

Sk. Kedaulatan Rakyat, tanggal 21 Februruari 191951.

"Kepala Rampok Menghasut Rakjat"

Sk. Suara Merdeka, tanggal 6 April 1950

"25 Grajak berhasil mealarikan diri"

Sk. Merdeka, 27 Agustus 1951.

"Surakarta Geger Kepati-pati"

Sk. Pemendangan, tanggal 15 September 1951.

"Perampokan Besar di Magelang; Gerombolan MMC Beraksi  
lagi"

Sk. Suara Merdeka, tanggal 30 Januari 1953.

"Grajak MMC Tertangkap di Dekat RRI"

SK. Suara Merdeka, tanggal 22 Oktober 1952.

"Grajak Meningkatkan di Merapi-Merbabu"

Skj. Pedoman, tanggal 11 Januari 1952.

"Aksi Gerombolan di Sekitar Magelang Meningkatkan"

sk SSuara Maaasyarakat, tanggal 2 Jul 1952

"Perampokan Besar di Tuntang ; Gerombolan Grajak Semakin  
Buas"

SK. Suara Merdeka, tanggal 5 Desember 1952.

"Drama Ngeri Menimpa Keluarga Hardo Wijanto"

Sk. Suara Merdeka, tanggal 23 Januari 19953.

"Pos Polisi Diserang Gerombolan"

Sk. Berita Buana, tanggal 27 Januari 1953.

"Patroli Polisi Ditjegt Gerombolan; Tiga Polisi Tewas"

Sk. Suara Merdeka, tanggal 26 Maret 1954.

"Perampokan Lagi di Sumowono"

Sk. Kedaulatan Rakyat, 27 Juli 1954.

"Anggota Gerombolan MMC Ditangkap Saat Menarik Pajak"

Sk. Suara Merdeka, 21 Desember 1954.

"MC Sedia Menyerah Dengan Seluruh Anggotanya dan Seluruh  
Persenjataannya"

SK. Suara Merdeka, tanggal 27 Desem,ber 1954.

"Instruksi Panglima Div. IV Diponegoro Pada Gerombolan"

Sk. Suara MNERdeka, tanggal 11Februari 1955.

"555 Orang Grajak Telah Menyerah ? Penyerahan tidak  
dengan senjata- Multayat memang mencegah penyerahan"

Sk.. Suara Merdeka, tanggal 2 Maret 1955.

"Aksi Terhadap MMC, OPR Semakin Aktif Dengan Bantuan Rakjat - Margo Bluwuk tertangkap dan Sukardi Lontong Menyerahkan pada TNI"

Sk. Suara Merdeka, tanggal 15 Desember 1954.

"Pemimpin Tertingginya Dipikul Seperti Babi"

Sk. Berita Buana, tanggal 27 Januari 1977.

"kegagalan Komunis di Indonesia"

Sketmasa, Jakarta, tp



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR INFORMAN

- N a m a : Soebadi Hardjoloekito
- L a h i r : 15 Oktober 1924
- A l a m a t : Jl. Merbabu 92 Boyolali
- Wawancara : - Tanggal 11 Februari 1992  
- Tanggal 26 Juli 1992  
- Tanggal 15 November 1992
- Keterangan : - Tahun 1954 menjabat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Boyolali.  
- Tahun 1955 banyak terlibat dalam memberikan penerangan pada penduduk di daerah sekitar Merapi Merbabu berkaitan dengan OTT.  
- Tahun 1968 menjadi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batang, Jawa Tengah.  
- Tahun 1971 menjadi anggota DPRRI dari Fraksi Karya Pembangunan.  
- Tahun 1977 menjadi Jaksa kembali di Kejaksaan Negeri Boyolali sampai tahun 1983 memasuki pensiun.
- N a m a : Letnan Kolonel (Purn) Soedarmo
- L a h i r : Surakarta, 25 Juni 1923
- A l a m a t : Jl. Merapi no. 56 Widaran, Boyolali.
- Wawancara : Tanggal 19 September 1992
- Keterangan : - Tahun 1945 - 1950 masuk menjadi anggota BKR-TKR-TRI di Boyolali.  
- Tahun 1952 Menjabat sebagai komandan

Batalyon 445 di Salatiga.

- Tahun 1961-1963 menjabat sebagai Ketua Badan Kerja sama Militer Jawa Tengah.

N a m a : Hardjodijono  
L a h i r : Boyolali, tahun 1925  
A l a m a t : Jl. Kenanga no. 2 Boyolali  
Wawancara : 20 Juni 1992  
Keterangan : - Tahun 1950 menjabat sebagai polisi kelas II di kec. Musuk, kab Boyolali.  
- Tahun 1951 menjadi perantara antara gerombolan MMC dengan pemerintah, ketika Ass. Wedana Mantyo Pranoto diculik. Berkat jasanya, maka Mantyo dapat dibebaskan dengan tebusan 5 orang grayak  
- Tahun 1951 ikut aktif membantu mengakhiri operasi pembersihan.

N a m a : Kapten (Purn) Sardiman  
L a h i r : Boyolali, 17 April 1927  
A l a m a t : Widaran, Rt.05 Rw. 10 Boyolali  
Wawancara : Tanggal 19 September 1992  
Keterangan : - Tahun 1950 menjabat sebagai KODM di Karanggede. Dalam peristiwa pengero-  
yokan terhadap Umar Yunani, beliau ikut mengawal dan menyerahkan Umar Yunani ke kab. Boyolali.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

132

N a m a : A.P. Soeripto  
L a h i r : Pusung, kab. Boyolali, tanggal 8 Maret  
1929  
A l a m a t : Kampung Temenggungan Ambarawa  
Wawancara : tanggal 2 Agustus 1992  
Keterangan : - Tahun 1941 menjadi agen Polisi kelas  
II di Boyolali  
- Tahun 1948 dipindahkan ke Ambarawa  
sebagai agen polisi  
-Tahun 1950-1955 aktif terlibat dalam  
operasi terhadap Gerombolan MMC, se-  
hingga mendapat penghargaan no.5/PNRI/  
OND/1957

N a m a : J. Sarwono  
L a h i r : Semarang, 21 November 1929  
A l a m a t : Sanggrahan no 147 Ambarawa  
Wawancara : Tanggal 1 Agustus 1992  
Keterangan : - Tahun 1948 bergabung menjadi anggota  
TKR Semarang  
- 1950 dipindahkan di KODM Boyolali  
- 1954 dipindahkan di Salatiga di KOREM  
073 Makutoromo  
- 1954 - 1955 iikut terlibat dalam ope-  
rasi pembersihan gerombolan MMC.  
- 1976 menjabat di Sub dokdisjahrah mil  
KODAM VII Diponegoro

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN I

### Komando Distrik Militer Boyolali Selatan

#### Petundjuk Tentang Penjerahan Tanah-Tanah Bekas Perusahaan dan Pemberikannya Kepada Petani

B A B I

#### Tindakan Pemerintah

##### Tingkatan Pertama

1. Pemerintah Militer sebagai wakil pemerintah pusat menjerahkan tanah bekas milik perusahaan kepada desa sebagai badan pemerintah dari Republik yang terendah. Penjerahannya dilakukan dalam konferensi dinas Pemerintahan Militer Kaonderan yang dikunjungi oleh Lurah<sup>2</sup> dan wakil Dewan Desa.
2. Lurah<sup>2</sup> desa dan wakil<sup>2</sup> Dewan desa mengumumkan tindakan Pemerintah Militer di atas dalam rapat desa di desanya masing<sup>2</sup>. Rapat desa tersebut harus mendapat perkunjungan seluruh penduduk termasuk orang<sup>2</sup> petani menengah, kentjeng, pengindung, templek, buruh perusahaan negeri dll. Dengan penjerahan itu, maka pemerintah militer mengharapkan supaya desa (seluruh penduduk desa) mempertahankan daerah dan kekajaan yang baru diterima itu (tanaman baku yang masih ada di kebun dll)

##### Tingkatan kedua

#### Pembentukan Panitia Urusan Tanah Bekas Perusahaan

1. Rapat desa tersebut di atas membentuk sebuah panitia urusan tanah bekas perusahaan (selanjutnya disebut panitia tanah)

yang diberi tugas oleh hal<sup>2</sup> di bawah ini:

- a. Mengatur tanah bekas perusahaan/perkebunan tersebut yang diserahkan kepada desanya hingga diketahui.
  - Luasnya tanah yang ada tanaman baku.
  - Luasnya tanah yang tanaman bakunya sudah ditingkar di djaman Djepang.
  - Luasnya tanah yang tanaman bakunya dibumi hanguskan sesudah tanggal 19 Desember 1949.
  - Luasnya tanah yang tjengkar (djelek untuk ditanami)



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### 2. Mendaftarkan nama2

- Pengindung Templek (orang jang tidak mempunjai tanah dan rumah)
- Pengindhung.
- Petani setengah kentjeng.
- Petani gundul.
- Petani kentjeng.
- Buruh perusahaan jang tidak/belum mempunjai tanah sa-  
nggan.

### 3. Mengadjukan daftar nama orang2 jang akan diadjukan da- lam rapat desa, dikemudiannja diusulkan untuk:

- Diberi kerdjaan tanah (garapan tanah).
- Tanah untuk perumahan terutama bagi pengindung.
- Luasnja tanah jang akan dibagikan.
- Letaknja tanah jang akan diberi kerdjakan itu atau  
jang akan dipakai pekarangan desa itu.

### Tingkatan ketiga

#### Penjerahan resmi kepada petani

1. Pada hari dan tanggal jang telah ditentukan oleh rapat desa terdahulu, panitya tanah mengadakan rapat desa lagi jang harus mendapat perkundjungan setiap penduduk dewasa (umur delapan belas tahun keatas), baik jang akan diberi maupun tidak akan mendapat bagian, dan menjerahkan hasil dari pekerdjaan panitya. Seluruh rakyat berhak mengeluarkan pendapatnja dan mengatakan keberatannja, begitu pula persetudjuannja, sehingga bukan lagi panityalah jang menundjuk orang2 jang perlu diberi kerdjaan tanah, tetapi rapat seluruh rakjat desa itu. Demikian pula per-  
djandjian atau peraturan desa mengenai tanah perusahaan/  
perkebunan adalah dibuat oleh rakjat itu sendiri. Sela-  
djutnja rapat itu pula jang menentukan besarnja penjerahan sebagai hasil bumi kepada desa, seperti:

a. Daripada tanah jang subur.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Daripada tanah jang kering.
- c. ,, ,, ,, ada tanaman baku teh.
- d. ,, ,, ,, ada tanaman baku kopi.
- e. ,, ,, ,, ada bekas tanaman baku seratan.

Kemungkinan rakjat desa menghendaki pembebasan pembagian (penjetoran sebagian dari hasil tanah, kalau dipandang terlalu memberatkan pihak penggarap.

### Tingkatan keempat

#### Penaruhan tanda2 batas bagian.

Pada waktu jang ditentukan panitya tanah diikuti oleh penduduk terkemuka di tiap2 dukuh, bersama orang jang berkepentingan menaruh tanda2 batas bagian tanah jang akan dikerdjakan itu. Setelah itu, kepada dukuh diserahkan supaya diumumkan tanah2 bagian jang sudah diberi batas itu, supaya tidak menimbulkan iri hati.

### Tingkatan kelima

#### Pendaftaran Legger 0 (Onderneming)

Oleh panitya tanah setelah selesai penjerahan tanah di-buatnja sebuah daftar nama2 orang jang diberi tanah garapan, jang memuat: tanggal, nama, laus tanah, letak dukuh, nomer urut, tanaman baku jang ada dan sebagainya. Jang kita sebut daftar legger 0 (Onderneming). Dengan ini, maka selesailah tugas panitya tanah diatas.

Dikeluarkan di : Tempat.

Tanggal : 7 April 1949.

Djam : 10. 00.

Komandan Distrik Militer

Boyolali Selatan

ap. Komandan Kepala Stap

ttd

(LETN. SOETRISNO)\*

---

\* Sumber: Semdam VII Diponegoro, Semarang.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN II

### DAERAH ISTIMEWA Jogjakarta Lasjkar Rakjat Pembentukan Lasjkar Rakjat.

MAKLUMAT No. : 5.

1. Mengingat tingkatan perjuangan bangsa Indonesia untuk menyalut tetap tegaknya Negara Republik Indonesia dari dunia Internasional, sebagai usaha untuk menjapai perdamaian dunia, maka kami berdua Seri Paduka Ingkang Sinuwun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Seri Paduka Kangdjeng Gusti Pangrera Adipati Arjo Paku Alam VIII, Kepala Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia, semafakat dengan Komite Nasional bangsa Indonesia dalam daerah kami berdua supaya dengan segera dilip kampung-desa membentuk Lasjkar Rakjat sebagai pembantu Keamanan Rakjat.
2. Maksud pembentukan Lasjkar Rakjat ini :
  - a. membantu mempertahankan kemerdekaannya negara Republik Indonesia pada umumnya, daerah Istimewa Jogjakarta pada khususnya.
  - b. mempertahankan daerah kampung-desa terhadap musuh.
  - d. membantu kepada segala kepentingan rakjat yang membutuhkan tenaga banjak yang teratur.
3. a. Yang harus masuk menjadi Lasjkar Rakjat ialah semua penduduk bangsa Indonesia, laki2 yang masih kuat badannya dan belum menjadi anggota Tentara Keamanan Rakjat.
  - b. Dalam pembentukan Lasjkar Rakjat ini penduduk laki2 yang berumur kurang dari 15 tahun dipisahkan dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
  - c. Sepenap Kepala barisan dilip Kapuwon atau Kemantren Pangreh Pradja merupakan Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat untuk merundingkan dan mengatur segala kepentingan bersama Penewu atau Manteri Pangreh Pradja, Wakil K.N.I. dan Wakil T.K.R. turut duduk dalam Dewan Pimpinan itu.
  - d. Pemilihan Barisan dipilih oleh dan dari antara anggota-anggota Lasjkar Rakjat; Pemilihan Pembina harus merdeka; Pangreh Pradja, K.N.I., Luah Desa dan pegawai-pegawai lainnya tidak boleh turut campur mempengaruhi pemilihan itu.
4. Blaja Lasjkar Rakjat ditukopi dari Kas Rukun Kampung/Rukun Desa. Untuk keperluan ini Rukun Kampung/Rukun Desa diperbolehkan menajadi djalan Istimewa untuk mengumpulkan uang dan bahan-bahan, akan tetapi senantiasa dengan mengingat kekuatan ekonomi rakjat.
5. a. Lasjkar Rakjat hendaknya bersenjata dengan segala matje a senjata yang dapat diadakan sendiri (termasuk djuga senjata api).
  - b. Semua latihan militer diserahkan kepada anggota T.K.R. di masing-masing daerah.
  - c. Djikalau ada tanda mobilisasi semua anggota Lasjkar Rakjat harus tunduk kepada perintah pimpinan T.K.R. di daerahnya masing-masing.
6. a. Dalam menjalankan pimpinan maka Kepala Barisan harus senantiasa berhubungan dengan Kepala Rukun Kampung/Rukun Desa dan Pangreh Pradja.
  - b. Semua Pegawai Republik Indonesia di daerah Istimewa Jogjakarta harus bekerja aktif dalam Lasjkar Rakjat di Kampung/desanya masing-masing.
  - c. Usaha-usaha Lasjkar Rakjat supaya selalu diatur hingga tidak mengganggu mata pentjaharlan masing2 anggota.
7. Kepala Daerah Pangreh Pradja dan Ketua Rukun Kampung/Rukun Desa menjadi pelindung dan turut bertanggung djawab atas segala perihal yang berhubungan dengan Lasjkar Rakjat.
8. Instansi2 lain-lainnya tentang pembentukan Lasjkar Rakjat ini akan segera menjusul.
9. Maklumat ini berlaku semendjak diumumkan.

Jogjakarta, 20 Dulkalda, Ehe 187.

atau 26-10-1945

HAMENGKU BUWONO IX

PAKU ALAM VIII

MOH SALEH, S.P.

\* Sumber: Dinas Sedjarah Kodam VII/Diponegoro, 1960, Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu, Jajasan Penerbit Diponegoro, Semarang, hal. 256.

LAMPIRAN III

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

- MENGENGAT : Putusan Panitia pembentukan organisasi Tentara Nasional Indonesia.
- MENIMBANG : Bahwa pada saat ini telah tiba waktunya untuk melaksanakan berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
- MENETAPAN : 1. Mulai tanggal : 3 Juni 1947 kami sahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
2. Segenap Anggota Angkatan Perang dan segenap anggota Laskar yang bersendjata, baik yang sudah atau yang tidak tergabung dalam Biro Perjuangan saat ini dimasukkan serentak kedalam Tentara Nasional Indonesia.
3. Pimpinan Tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia dipegang oleh : Pujuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari :
1. Kepala : Panglima Besar, Angkatan Perang.
  2. Anggota : Letnan Djenderal Urip Sumohardjo.
  3. Anggota : Laksamana Muda Natsir.
  4. Anggota : Komodor Muda S. Surjadarma.
  5. Anggota : Ir. Sakirman.
  6. Anggota : Djokosujono.
4. Pujuk Pimpinan Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajibannya yang mengenal sifat dan organisasi Tentara Nasional Indonesia, selama proses penjemputan tentara nasional Indonesia sedang berdjalan.
5. Semua satuan Angkatan Perang dan satuan2 laskar yang dimulai dari tanggal penetapan ini menjilma menjadi satuan Tentara Nasional Indonesia, diwajibkan taat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pujuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia.

Dikeluarkan di : Jogjakarta.  
Pada tanggal : 3 Juni 1947.

Diumumkan :  
Pada tanggal 3 Juni 1947  
Sekretaris Negara  
A.G. PRINGGODIGDO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG  
SOEKARNO. \*

Menteri Pertahanan.  
AMIR SIARIFUDIN

\* Dinas Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968,  
Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu, Jayasan Penerbit Di-  
ponegoro, Semarang, hal. 272.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN IV

ANGKATAN DARAT  
RESIMEN INF. 13/SUB TERR.13  
DIV. PANGERAN DIPONEGORO

### SEKSI I

Nomor : 775/PL/I/RI.13/52  
Tanggal : 25 Agustus 1952.  
Dari : Kep. Sie. I RI. 13  
Perihal : Verslag rapat gerombolan MM. Complek.  
Sifat : Penting.  
Lampiran : EV:2/B helai.

Kepada  
Jlh. Komd. Ron. Inf. 13/SI.13.  
Kep. Sie I T.T.1V.  
di

### T e m p a t

Pada tanggal 23 April 1952 djam....malam fihak gerombolan grajak/M/M.Complek telah mengadakan rapat di desa Gendulan Ketj. Musuk Kab. Bojolali jang dihadliri oleh 45 orang, antaranja:

1. Darmopedot dari Gendulan Ketj. Musuk.
2. Ngusman Ali " Djawa Timur.
3. Wiryo Supar " ds Tegalmuljo Ketj. Kemalang.
4. Kampret " " " " "
5. Narikun " " " " "
6. Amir(Wakidin) " " Deles " "
7. Parno(Sukir) " " Dompok " "
8. Pawirodijono " " Tegalmuljo " "
9. Ngadiman " " Karangkendal " "
10. Wagiman " " " " "
11. Takil " " " " "
12. Paimin " " " " "
13. Ronokarso " " Tegalmuljo " "
14. Sapan " " Bumiredjo " "
15. Seun(Mudji) " " Ngrantjab " "
16. Minto(Timin) " " " " "

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17. Kartosukir	dari ds.	Suwono	Ketj	Kemalang.
18. Suwondo	"	"	"	"
19. Tjitro(Njoto)	"	"	"	"
20. Mardjo Bagong	"	"	"	"
21. Pawirosidul	"	Bangbener	"	"
22. Marsono	"	Sudimoro	"	Musuk.
23. Darmoslamet	"	Djamprongan	"	"
24. Djojo(Dikun)	"	Djuwono	"	"
25. Reso Sukarno	"	Tempel	"	Kemalang.
26. Atmoredjo	"	Nglampir	"	Ujatinom.
27. Joso (Sardi)	"	Djurangporong	"	"
28. Reno	"	Tjeporan	"	Gantiwarno.

dll jang belum djelas namanja.

Dalam rapat tersebut mereka merundingkan soal2

1. Pembagian daerah operasi
2. Pembentukan pengurus baru.

Pimpinan operasi itu diserahkan kepada:

1. Darmopedot, meliputi daerah2 Ketj. Tjankringan dan Pa nisrenngo.
2. Reno, meliputi daerah Karangnongko Klaten.
3. Joso al Sardi, meliputi Dompal, Kemalang, Logede.

Adapun susunan pengurus baru dari gerombolan grajak itu terdiri dari:

1. Sdr. Reno = Ketua.
2. " Joso = Mk. Ketua.
3. " Darmo = Pembantu.
4. " Danu = "
5. " Djokasmo = "

Menurut keterangan, pada waktu rapat tersebut diadakan, pengundjung-pengundjung rapat itu antaranja ada jang membawa sendjata2 berupa:

4 buah bren.

Beberapa stengun dan pistol

20 buah senapan.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Samapi dimana perkembangan dan activiteit gerombolan2 gra-  
jak itu hingga hingga kini masih belum djelas.

Demikian untuk sekedar mendapat perhati-  
an.

KEPALA SEKSI 1

ttd

S. Meontardjo. Lts.\*

Inf/16673

Tembusan :

1. Sie. I Bn. 410.
2. Sie. Res. Inf. 13.
3. A r c h i e f.

---

\* Sumber: Angkatan Darat Resimen Inf. 13/Sub. Terr. 13.  
Div. Pangeran Diponegoro, 25 Agustus 1952, Semarang.

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

KOMANDO GANJANG MALAYSIA

.. TURUNAN -

LAMPIRAN V

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGlima TERtinggi Angkatan  
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/PANGlima Besar  
KOMANDO GANJANG MALAYSIA  
No. 05/KOGAM/1966**

KAMI, PRESIDEN/PANGlima TERtinggi Angkatan BERSENDJATA  
REPUBLIK INDONESIA/PANGlima Besar  
KOMANDO GANJANG MALAYSIA.

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan ketertiban, keseragaman dan  
berhasilnya penumpasan gerakan kontra revolusi "G-  
30-S"/PKI sehingga tepat dapat terkena sasarannya,  
perlu ditentukan organisasi-2 yang diwajibkan se-  
azas/bernaung/berlindung dibawah ex Partai Komunis  
Indonesia (PKI), sebagai pelaksanaan lebih lanjut  
dari Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkat-  
an Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar  
Revolusi/Mandataris MPRS No.1/3/1966 ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.40 Ta-  
hun 1966 ;  
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar  
Revolusi/Mandataris MPRS No.1/3/1966 ;  
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar  
Revolusi/Mandataris MPRS No.3/3/1966 ;  
4. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan  
Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar  
Komando Ganjang Malaysia No.Inst-09/KOGAM/5/66 ;

**KEPUTUSAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan organisasi-2 seperti tersebut dalam lam-  
piran Surat Keputusan ini, sebagai organisasi-2 yg  
seazas/berlindung/bernaung dibawah ex Partai Komu-  
nis Indonesia (PKI).  
KEDUA : Daftar organisasi terlampir bila perlu setiap saat  
dapat ditambah.  
KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tgl.  
13 Maret 1966.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 31 - Mei - 1966

**AM. PRESIDEN/PANGlima TERtinggi Angkatan BERSENDJATA  
REPUBLIK INDONESIA/PANGlima Besar  
KOMANDO GANJANG MALAYSIA**

KERTILA SEPAK

SOL. ARFI

LEMBAGA DESERDAL TEL.

SALINAN SESUAI DG ASELINJA  
Wk. SEKRETARIS UMUM KOGAM,  
TJAP/TTD  
NIZAM ZACHMAN  
KOMODOR LAUT.

UNTUK SALINAN:

BHAGASA TERANG DAERAH

AN SEKRETARIS  
KAUR TU

AN SEKRETARIS  
LEMBAGA DESERDAL TEL. 134869



TYP. : NGR. S.  
COLL. :



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

INDONESIA MALAYSIA

SALINAN DARI SALINAN:

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRASIDEN/ANGGILMATERTINGGI  
ANGKATAN BERSEKUTUWA REPUBLIK INDONESIA/ANGGILMATA  
BESAR NEGARA MALAYSIA

NO. 85 / KOGAM / 1966.

A. BAGIAN ORGANISASI PRI DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI KEDAERAH IALAH:

1. C.C.P.K.I. (Comite Central) Pusat.
2. C.D.B.P.K.I. (Comite Daerah Besar) Daswati I.
3. C.K.P.K.I. (Comite Kota) Kotapradja.
4. C.S.P.K.I. (Comite Seksi) Daswati II.
5. C.S.S.P.K.I. (Comite Sub Seksi) Ketjamatan Daswati III.
6. C.R.P.K.I. (Comite Resort) Desa.

B. ORGANISASI JANG BEAZAS/BERLINDUNG/BERHAUNG DIDAWAH P.K.I. :

1. B.T.I. (Barisan Tani Indonesia).
2. S.O.D.S.I. (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) :
  - 1). SARUPRI (Serikat Buruh Perkebunan R.I.).
  - 2). SERKA (Serikat Buruh Kereta Api).
  - 3). SD POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi).
  - 4). SDEG (Serikat Buruh Listrik dan Gas).
  - 5). SANBUNSI (Serikat Buruh Kebotanan Seluruh Indonesia).
  - 6). SEBHESTI (Serikat Buruh Beras & Tapioka Seluruh Indonesia)
  - 7). SERKE (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor).
  - 8). SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah).
  - 9). SDPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum).
  - 10). SDKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan).
  - 11). SD KEPENDJARAAN (Serikat Buruh Kependjaraan).
  - 12). SD RRI/TV (Serikat Buruh RRI/TV).
  - 13). SEBERDU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan).
  - 14). SBIHT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran).
  - 15). SEHM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman).
  - 16). SERK (Serikat Buruh Kulit dan Karet).
  - 17). SD TEKSTIL (Serikat Buruh Tekstil).
  - 18). SERBAUD (Serikat Buruh Udara).
  - 19). SERDUM (Serikat Buruh Minjak).
  - 20). SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Perairan).
  - 21). SDG (Serikat Buruh Gula).
  - 22). SSK (Serikat Buruh Kesehatan).
  - 23). SKK (Serikat Buruh Kebewanan).
  - 24). SDP (Serikat Buruh Peggadain - SODSI).
  - 25). SBI (Serikat Buruh Imigrasi).
  - 26). SDB (Serikat Buruh Demo).
  - 27). SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia).
  - 28). SBIM (Serikat Buruh Industri Metal).
  - 29). SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia).
  - 30). SEPI (Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia).
  - 31). SBPT (Serikat Buruh Dea dan Tjukai).
  - 32). SBPK (Serikat Buruh Pabrik Kina).
  - 33). SELR (Serikat Buruh Lampu dan Radio).
  - 34). SBTH (Serikat Buruh Taman Hewan).
  - 35). SDIIM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman).
  - 36). SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet).
  - 37). SBGSH (Serikat Buruh Perusahaan Garam dan Soda Negara).
  - 38). SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan & Angkutan).
  - 39). SBPK-PADALARANG (Serikat Buruh Pabrik Kertas Padalarang).
  - 40). SD DAMA (Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan).
  - 41). SD PERTANI (Serikat Buruh PI PERTANI).
  - 42). SD GOODYEAR (Serikat Buruh Goodyear).

43).....

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2 -

- 43). SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian).
  - 44). SB PERKAPURAN (Serikat Buruh Perkapuran).
  - 45). SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan).
  - 46). SB PERINDUSTRIAN (Serikat Buruh Perindustrian).
  - 47). SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil dan Pakaian).
  - 48). SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan Nelayan).
  - 49). SANBUPIS (Serikat Buruh Film dan Senidrama).
  - 50). SANDUMIKSI (Serikat Buruh Minjak Kelapa Seluruh Indonesia).
  - 51). PPB (Persatuan Pengendara Betja).
  - 52). PPT (Persatuan Pekerdja Toko).
  - 53). PGTI (Persatuan Guru Teknik Indonesia).
  - 54). PERDUM (Persatuan Buruh Minjak).
  - 55). FERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia).
  - 56). SS PENDIDIKAN (Serikat Sekerdja Pendidikan).
  - 57). RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdjasa Serikat Buruh/Serikat Sekerdja Pegawai Negeri).
  - 58). SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi).
  - 59). SIBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan Sensus).
  - 60). SJPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor).
  - 61). KSOBM (Keraja Sama Organisasi Buruh Minjak).
  - 62). GSDI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia).
3. PEMUDA RAKJAT.
4. CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia).
  5. GERANI (Gerakan Wanita Indonesia).
  6. LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakjat).
  7. H.S.I. (Himpunan Sardjana Indonesia).
  8. PGRI NON VAK CENTRAL (Persatuan Guru Republik Indonesia).
  9. BAKEMRI (Badan Permusjawaratan Kewargonegaraan Indonesia) termasuk didalamnya :
- 1). PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia).
  - 2). PFI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia).
  - 3). Universitas Res Publica.
10. IPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia pimpinan NODDY SOMUANG).
  11. KOMUNIS-MUDA.
  12. HARAPAN-MUDA.
  13. INDONESIA-MUDA.
  14. PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia).
  15. API POSTEL (Angkatan Pemuda Indonesia Pos, Telegraf dan Telepon).
  16. BDM (Barisan Berani Mati).
  17. AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia).
  18. TAMAN KAHAK2 "MELATI".
  19. PANTI-PENGETAHUAN-RAKJAT.
  20. BALAI PENGETAHUAN-RAKJAT.
  21. MIBAR PENGETAHUAN-RAKJAT.
  22. ICHSAHUL-MUSLIMIN.
  23. IPI (Lembaga-Pendidikan-Nasional)
- 1). AISA - Akademi Ilmu Sosial "Ali-Aroham".
  - 2). UNIVERSITAS "BACHTARUDDIN".
  - 3). UNIVERSITAS PERTANIAN "EGOM".
  - 4). INST. PENDIDIKAN "HARJONO".
  - 5). IKIP "KULJANG".
  - 6). UNIVERSITAS RAKJAT.
  - 7). UNIVERSITAS-KEBENIHAN-RAKJAT.
  - 8). AKADEMI JURNALISTIK "DR-RIVA".
  - 9). AKADEMI-SENJI-"KORSEL SIMANDJUNTAK".
  - 10). IKIP "DR. WIJITO HANGUNRUSUHO".
  - 11). UNIVERSITAS-ROTARADJA-SOLO.
  - 12). LESRI (Lembaga Seni dan Budaya R.I.).
  - 13). AKADEMI TEKSTIL - SOTEXI.
  - 14). MAGUNA (Madjelis Gabungan Usaha Nasional).
  - 15). SEKOLAH LANJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN NASIONAL.
  - 16). SEKOLAH DASAR "MELATI".
  - 17). UNIVERSITAS RAKJAT INDOLESIA.
  - 18). AKADEMI TEKNIK "IR ANAND".
  - 19). AKADEMI SASTRA "PERBATAN".

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 3 -

- 20). AKADEMI ILMU EKONOMI "DR. RATULIANGI".
- 21). AKADEMI ILMU SEDJAHAN "ROHGGOLARSITO".
- 22). AKADEMI DJURNALISTIK "R. SUFRATMAN".
- 23). AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK "YARUNA PATRI"  
(MALANG).
- 24). G.E.R.P.I. (VETERAN).
- 25). A.P.P.I. (ANGGATAN PEMUDA PEMBANGUNAN INDONESIA).
- 26). P.F.D.I. (PERSATUAN KALONG DESA INDONESIA).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Mei 1966.

AN. PRESIDEN/TANGGALIMATERTINGGI ANGGKATAN  
BERSAMAJATA REPUBLIK INDONESIA/TANG-  
GALIA BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA

KEPALA STAF

TTD

SOEHARTO  
LETNAN DJEMBERAL T.H.I.

SALINAN SESUAI DENGAN ASELINJA  
MR. SEKRETARIS UMUM KOGAM,

TJAP / TTD

NIZAM ZACIMAN  
KOMODOR LAUT.

UNTUK SALINAN:

PENGUASA PERANG DAERAH  
An SEKRETARIS  
KA UR TU



MALOROJO SUFRATTO  
LETNAN DJEMBERAL T.H.I. 130863

TYP. : MGN.S.  
COLL. :

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN VI

### Masalah:

Gerombolan Merapi Merbabu Complex, disingkat MMC

### Organisasi:

Dalam pertengahan tahun 1951 (keterangan seorang tahanan MMC) terbentuklah suatu organisasi yang bernama Persatuan Korban Rasionalisasi disingkat PKR yang berkedudukan di Dlimas daerah Banjubiru, Ambarawa. Sebagai cdt. Sect. adalah Soejoed Kridosardjono.

#### SUSUNAN PKR SAAT ITU

Medan 9 MM

Komandan, Sastro Sadjad. (yang berkedudukan di Merbabu)

Sector 3001	Sector....(?)	Sector....(?)
Kmd. S. Kridosardjono.	Kmd. Moeltayat.	Kmd. Mardjo.
Kp. Staf - Amir. S.	(Anggauta pengurus	(Anggauta pe-
Kuangan - Sastro.	tidak mengerti)	ngurus tidak
Persedjt - Djoeweni		mengerti)
Secret - Digdosantoso.		

#### Mobiele Troepen

Komandan - Darsono.  
Wakil Kmd. - Sri Walujo  
Kekuatan - 1 seksi lebih dan bersendjata.

Jang Menerima:

SMAO/MENIF 13.

ttd

(J.O. Dari)

Serma Infantri\*

\* Suber: Dokumen SMAO/Menif 13, 1961, Semarang.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN VII

Arsip Sekretaris Negara, No. 119 Tahun 1953.

### I. Semarang: Laporan tgl. 22 Djanuari 1953

Dari kantor Kabupaten Semarang diterima pelaporan mengenai khusus gangguan keamanan sebagai berikut:

Pada tgl. 22/1-1953 djam 06. 15 pagi bis Adam H.8033 datang dari Semarang menudju ke Magelang, sesampainja di desa Ngrawen Ketj. Bawen Kaw. Ambarawa, telah dibegal oleh 6 orang berpakaian matjam<sup>2</sup> dan bersendjata karabejn serta pistol. Kerugian dari pembegalan tersebut Rp. 650, 75,- adapun penganlajaan tidak dilakukan.

### II. Surakarta.

Dari kantor Karesidenan Surakarta diterima pelaporan demikian: Daerah Kabupaten Bojolali. Pada tanggal 21-1-1953 dj. 17. 30 Ketjamatan Kemusu, Kaw. Wonosegoro dan Kabupaten Bojolali, telah diserbu oleh gerombolan bersendjata jang Djumlah dan persendjataanja tidak diketahui, akibat serangan tadi, ialah:

- a. Tjamat Kemusu (Danupranoto) dan kebonja terbunuh.
- b. Angg. Polisi Negara (Doetoprando) terbunuh.
- c. Seorang pegawai pasar terbunuh.
- d. Seorang penduduk mendapat luka berat, sedang seorang anaknja mati.

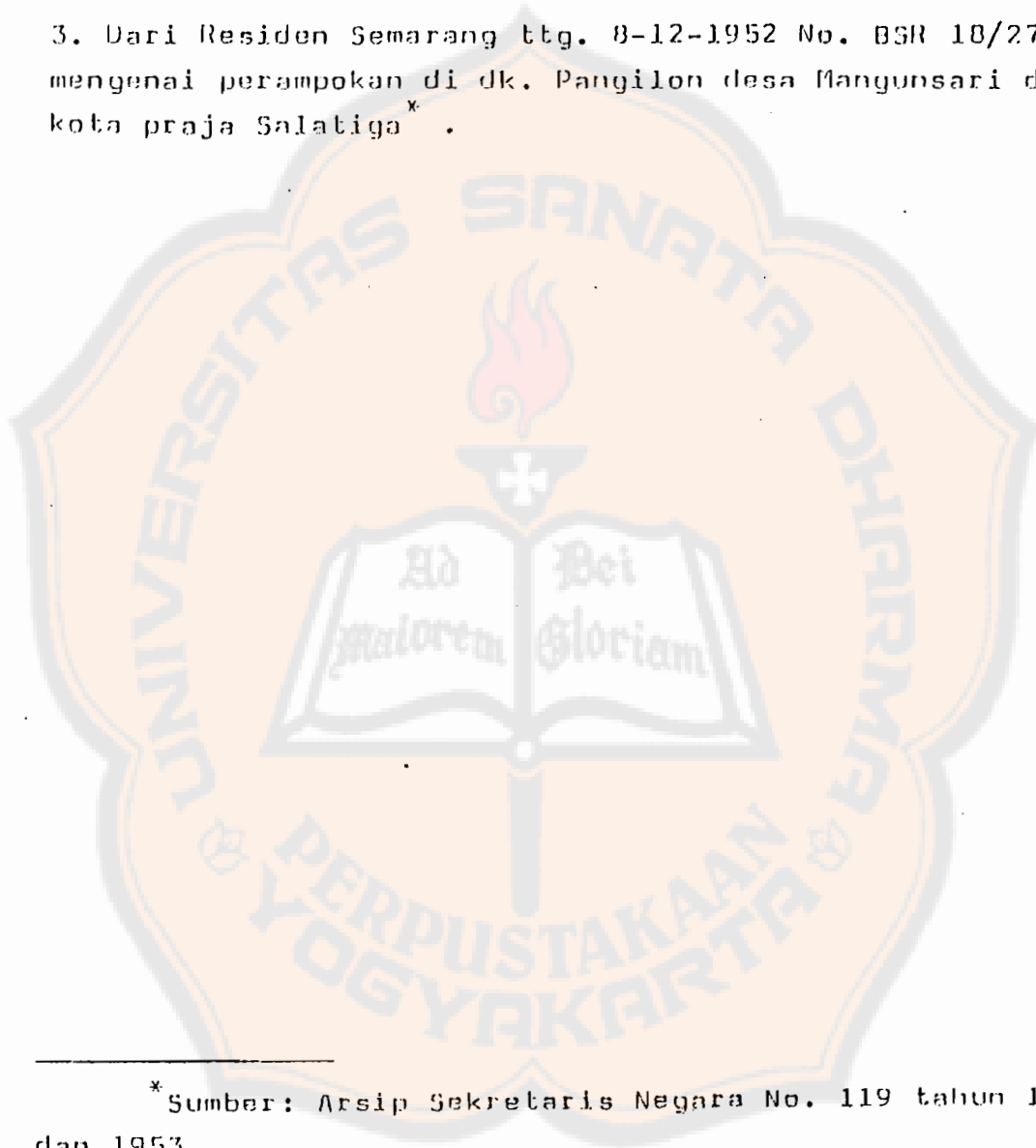
Rumah-rumahnja a-b-c-d dan dari Soedarto Commdt. BODM sesudah dirampas barang-barangnja lalu dibakar oleh pengatjau.

Untuk memperlengkapi pelaporan disertakan turunan<sup>2</sup> pelaporan tulis jang diterima dari daerah dan lain instansi. Karesidenan Semarang

1. Dari Residen Semarang ttg. 4-12-1952 No. BSR. 18/268/15 mengenai perampokan di dk. kr. Pawon desa Tjandiredjo. Ketjamatan Tuntang dan Kaw. Salatiga.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Dari Residen Semarang ttg. 6-12-1952 No. BSR 10/270/5 mengenai perampokan di dk. Lewono ds. Bedji Ketj. Klepu dan Kaw. Ambarawa.
3. Dari Residen Semarang ttg. 8-12-1952 No. BSR 10/270/6 mengenai perampokan di dk. Pangilon desa Mangunsari dalam kota praja Salatiga\* .



---

\* Sumber: Arsip Sekretaris Negara No. 119 tahun 1952 dan 1953.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN VIII

Pers Korb Rasion  
Territ Dan Commando  
Sector 171001  
(Sultan Bintoro)

Keputusan Rapat  
Tgl. 20 Maret 1953

Dibawah ini adalah tjalatan keputusan rapat Medan Pantjasila, jang dihadliri oleh semua sector Comandan.

### I. Rentjana Djangka Pendek

#### I. Dalam lapangan organisasi

##### a. Tentang Staf Medan.

Menjusun staf medan kembali supaja dapat memenuhi sjarat2 sebagai badan susunan organisasi jang tertinggi dan memilih kawan Amir Saputro sebagai Kepala Staf Medan (bekas Kepala Staf Medan Sector Agustus)

##### Keuangan Medan

Mewadjibkan pada semua Sector untuk memberikan sumbangan guna mengisi keuangan medan, ditentukan harus sudah sampai selambat-lambatnja tanggal 10 tiap2 bulan.

##### b. Tentang Staf Sector

Menjusun staf sector setjara praktis, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut.

##### c. Tentang Pertemuan Antara Medan Dengan Sector2

Ditentukan tiap2 bulan, tiap tanggal 1 bertempat di staf medan. Diketjualikan bila keadaan terdapat istimewa, maka medan berkewadjiban untuk mengundang setiap sector2.

##### d. Tentang perhubungan

Medan dan sector2 semua diwadjibkan membentuk pos2 perhubungan, dan menentukan adanja snel kurier untuk melancarkan perhubungan. Pada semua sector tidak diperkenankan mengadakan hubungan dengan organisasi2 sendiri (diluar BKR) instansi dll. jang akan membawa

organisasi; sebelum mendapat idjin dari medan.

e. Pendidikan/Penerangan.

Memperbanjak usaha2 dalam lapangan pendidikan, penerangan dalam kalangan anggauta.

f. Tentang Badan Jang Bertanggungjawab Mendjaga Peraturan.

Untuk mendjaga agar peraturan tidak begitu sadja dapat dilanggar oleh para anggauta serta untuk mengatasi perbuatan2 jang dapat dikatakan sonder hukum, maka ditentukan adanja badan kehakiman organisasi dengan anggauta ialah:

1. Kwn. S. Wahidin Ketua Hakim
2. Kwn. S. Budiman anggauta hakim (CDT. Medan)
3. Kwn. S. Krido ,, ,, (CDT. S. Proklamasi)
4. Kwn. S. Sastro M ,, ,, (CDT. S. 17)
5. Kwn. S. Mardjo ,, ,, (CDT. S. 45)
6. Kwn. S. Santoso ,, ,, (CDT. S. Agustus)
7. Kwn. S. Raksono ,, ,, (CDT. S. STC. III)

g. Lain2 Keputusan

Tentang bepergian dan istirahat semua anggauta diwajibkan:

1. Membawa surat djalan dengan disertai keterangan jang djelas tentang batas waktu.
2. Dimana tempat beristirahat dan bermalam diharuskan berhubungan dengan badan organisasi setempat.
3. Mengembalikan surat2 (djalan/perintah) pada badan organisasi jang memberinja.

II. Dalam Lapangan Kepradjuritan

Menentukan diri organisasi dalam siasat gerilja dengan djalan:

1. Memperbanjak usaha pendidikan/latihan2 untuk mempertinggi nilai bertempur geveecht, verdig.
2. Menempatkan anggauta mobiele troep ke desa2.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### III. Tentang financieel dan keuangan.

Memperhemat anggaran belandja organisasi dengan maksud meringankan suber keuangan dan perlengkapan jang lepas dari permintaan dari pada rakjat.

### IV. Tentang Sikap Menghadapi Operasi

Menentukan dan mendjalankan setjara tegas istilah de-  
vensief strategis, dengan wujud konkreetnja:

- Menghilangkan sifat demonstratief (beruniform dll)
- Penyebaran Mobiele Troep ke dasa2.
- Melarang keras perlawanan pada pihak operasi.
- Menitik beratkan pekerdjaan dalam organisasi ke dalam dan dalam kalangan rakjat.

### V. Tentang Pekerdjaan Dalam Kalangan Rakyat

Bertindak dengan tegas kepada siapapun djuga jang terbukti bertindak mengatjau keamanan rakjat. Dan mengaktifeer pekerdjaan dalam hal pengawasan /pendidikan kepada anggauta dan orang luar, atau pihak musuh jang sengaja membikin kekacauan.

Kedatangan Umar Yunani dalam organisasi itu, ia diserahi mendjadi organisator jang kemudian diangkat mendjadi kepala staf medan dan merangkap sebagai hakim. Pada tahun 1952 diadakan rapat di Merbabu jang dihadiri oleh para komandan dan dalam rapat itu diputuskan, antara lain:

1. Umar Yunani - putjuk pimpinan.
2. Kridosardjono - komd medan.
3. Moeltayat - Komd medan.

Ditempat tgl. 1 Mei 1953.

Pers Korb Rasion

Terri dan Comanndo

Sector 171001

Comandant:

ttd

(Tjokromurti)

Kep. Staf

---

\* Sumber: Semdam VII Diponegoro, Semarang.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LAMPIRAN IX

### Peraturan Khusus Dalam Territorium Comando 1001 Sector 17 Selama 1 Bulan Mulai Tanggal 25 Mei s/d 25 Juni

#### I. Tentang Organisasi

1. Keanggotaan: Belum teratur, penerimaan anggota saat ini tutup pintupun karena belum adanya peraturan dasar yang tertentu dan ini Atas organisasi.
2. Susunan : Belum teratur karena kekurangannya tenaga yang bewust masih dalam pertjobaan/sederhana.
3. Perhubungan : Dari STC ke TC lantjar, kepada sector sering terdjadi kesulitan karena belum adanya snel curier yang tertentu, sector sering mengabaikan akan pentingnja curier.
4. Controle : Belum dapat dikerdjakan, karena tertekan oleh keadaan dan kesulitan untuk saling mengontrol.
5. Pertemuan : Dalam tiap2 Minggu sekali TC mengadakan rapat anggota descusi2 dengan anggota STC dan TC Trup Dekkeng STC dalam 15 hari sekali rapat dengan CKD.
6. Pendidikan : Belum mampu mengadakan, karena belum adanya tenaga yang actief mendidik, hanya secara discusie dan membaca/batjaan dari brosur yang didapatkan.

#### II. Administrasi

Dalam keadaan belum sempurna (glatuk) karena kurangnya tenaga yang bevudg dalam lapangan administrasi jadi masih non administrasi.

1. Pemasukan : Ta' ada djalannja yang prisipeel untuk mendapatkan kesulitan, hanya secara minta donatur, bilamana atasan memberi pandangan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jang concreet.

2. Pengeluaran : Tertentu untuk mengurus anggota dengan vrandwoodelyk pengurangan anggaran be-landja anggota jang sekurang-kurangnya.

### III. Tentang Operasi

1. Tjara kerdja: Dmsengel kampung, dengan secara pasief pura2 latihan/berburu pikat (plithengan) dan mengadakan aplanage tenaga wanita dengan beralasan solidieritet modal/pengangkutan barang dagangan. Dan menggunakan operasi malam.
2. Sifatnja : Ramah tamah dan melalui pos2 (memikat hati dengan djalan penerangan/sebagai pasang djaring2 supaya menjerahkan anggota organisasi.
3. Kerugian : Dalam 1 bulan 2 (dua) anak dari organisasi terbunuh, karena sedang tugas ditjoro orang terus tertangkap dapat melarikan diri dari pos polisi, karena keteledoranja hingga dapat tertangkap lagi, mereka ada pengakuan jang dengan kenjataan lantas dibunuh ketika dia diadjak operasi. Jang satunja karena ada operasi malam dengan kelalaiannja dapat ditangkap 3 anggota, jang satu melarikan diri, karena jang lari jang satu dilembak mati jang satunja diangkut, hingga kini belum ada kesimpulan jang djelas, ini terdapat di daerah Pakis (STC 1001). Jang lainnja 1 orang tertangkap ketika ada penggedoran jang diselenggarakan oleh kawan sector 17, jang zonder ada perhubungan jadi selaku cdt. TC ta' tahu menahu.

### Sikap Kita Dalam Menghadapi Operasi.

Menempatkan atau penjebaran anggota ke

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

desa untuk mendjelma ra'jat petani dsb. Menghilangkan sifat demonstratief. Ikut serta mendjaga keamanan masjarakat, mengenai pengawasan element Suroto dan mengactiveer perhubungan menjesuaikan teori devensief: strategish.

### Pelapuran Selesai

Tindasan Terkirim Kepada  
Jth. In. cdt. Sector 17  
Jth. In. Medan Pantjasila  
Jth. In. SIC, Wil. TC. 1001  
Archief.

Dibikin ditempat tanggal  
26 Juni 1953. Persatuan  
Korban Rasionalisasi. Terr.  
dan Comandø Sector. 17.  
1001!

Comandant II

ttd

Siswo--Aminoto \*  
cmt. TC.171001

---

\* Sumber: SMAU/Menif. 13, tanggal 6 Djuli 1961, Semarang.

LAMPIRAN X

# S E R U A N

KEPADA : ANGGUTA<sup>2</sup> GEROMBOLAN M.M.C.  
baik dari O.P.P.R.I. maupun P.K.R.-MUDA.

1. Telah kami maklumi keinginan saudara untuk menjerahkan diri dengan sendiata jang ada pada saudara kepada Pemerintah.
2. Kami menjabut dengan gembira keinginan saudara itu, karena saudara telah menginsjali bahwa kehidupan saudara hingga saat ini tidak menguntungkan Negara dan diri saudara sendiri.
3. Untuk menjabut hasrat saudara jang sulji murni itu telah kami instruksikan kepada semua alat Negara di sekeliling saudara supaya menerima dan memperlakukan saudara dengan baik sebagai manusia.
4. Datanglah berdujun-dujun kepada Post Tentara atau Polisi jang terdekat.
5. Untuk menghindari kesalah-lahaman, perlu memberi tahukan lebih dahulu kepada Post jang terdekat tentang maksud kedatangan saudara dengan memaket surat atau koerier.
6. Kesempatan ini kami berikan mulai tanggal 7 Februari 1955 diam 00 00 sampai lg. 28 Februari 1955 diam 24.00.

S e l e s u i

Dikeluarkan di: Stalkwartier Terr. IV.  
Pada tanggal : 16 Februari 1955.  
Pada diam : 24.00

TERR. IV/DIVISI DIPONEGORO  
P A N G L I M A



( MOCH. BACHRUN )  
Kolonel Inf. Hrp. 10R2B

DIKELUARKAN OLEH PENAD. TERR. IV

LAMPIRAN XI

ANGKATAN DARAT  
TERR. IV/DIVISI DIPONEGORO

INSTRUKSI

No. B. 1/Instr./IV/55.

KEPADA : Semua alat<sup>2</sup> Negara jang sedang  
bertugas dalam Operasi Tritunggal

Berhubung dengan adanya hasil penjerahan dengan senjata dikalangan anggota dan pimpinan gerombolan M.M.C., baik dari golongan O.P.P.R.I. maupun dari golongan P.K.R. Muda, maka dengan ini kami instruksikan supaya :

1. Menerima penjerahan anggota M.M.C. tersebut.
2. Penjerahan mereka hanya dapat diterima dengan tidak bersyarat.
3. Perlakukan mereka dengan baik sebagai manusia dan hindarilah tindakan yang bersifat melukai hati mereka.
4. Kemudian teruskanlah mereka pada pejabat khusus jang telah kami tunjuk untuk mengurus selanjutnya, melalui Panitia Screening.
5. Batas waktu penjerahan sampai tanggal 28 Pebruari 1955.
6. Laksanakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di: Stalkwartier Terr. IV.  
Pada tanggal : 6 Pebruari 1955.  
Pada djm : 24.00.

TERR. IV/DIVISI DIPONEGORO  
PANGlima



(MOCH. BACHRUN)  
Kolonel Inf. Hrp. 1082B

LAMPIRAN XII

DEWAN KEAMANAN NASIONAL  
KORDINATOR KEAMANAN DAERAH  
DJAWA TENGAH

---

PEDUMAN BEKERDJA

I. Djumlah Gerombolan MMC

Gerombolan MMC terdiri dari OPPRI, dibawah pimpinan Umar Yunani dan PKR. Muda dibawah pimpinan Multayat, semuanya ditaksir 2000 orang termasuk anggota kern. Djumlah sendjata ditaksir 150 putjuk.

II. Tugas Para Pejabat di Daerah

- a. Alat negara di daerah Kar. Semarang, Kedu dan Surakarta membuat blacklist kern anggota2 gerombolan MMC dan menukar blacklist itu satu sama lain, sehingga dapat diketahui seluruhnya oleh para pejabat.
- b. Masing2 Bupati jang bersangkutan dengan daerah MMC bertanggung jawab atas tugas pelaksanaan penerimaan anggota2 MMC jang menjerahkan diri pada pemerintah.
- c. Untuk dapat melaksanakan tugasnya bupati dibantu oleh polisi, tentara dan Djaksa.

III Tjara Pelaksanaan

1. Di ketjamatan jang bersangkutan dengan daerah MMC dibentuk Badan Pendjaringan Pertama (BPP).
2. Badan ini terdiri dari BODM, sebagai ketua, Tjamat dan polisi sebagai anggota.
3. Tiap2 anggota jang menjerah baik kepada polisi maupun tentara, sesudah diambil sendjatanja, kemudian diteruskan ke BPP.
4. Mereka jang padanja terdapat kesalahan2 kriminal dan mereka jang tidak mau kembali ke kampung halaman, dikirim ke Kabupaten jang bersangkutan.
5. Di tiap2 Kabupaten, jang bersangkutan di daerah MMC dibentuk panitia screening jang terdiri:

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Djaksa sebagai Ketua.
2. P.D.M
3. C.P.M
4. Polisi dan pamong pradja sebagai anggota.
7. Panitia screneing memeriksa anggota tersebut untuk selanjutnya diadjudkan kepada pengadilan, apabila mereka tidak terdapat kesalahan2 kriminal, tetapi masih perlu ditahan sementara, maka mereka itu dimasukkan tawanan S.O.

Demikianlah supaja pedoman ini dikerdjakan dengan kebidjaksanaan dan penuh rasa tanggung Djawab.

Tanggal 2 Pebruari 1955.

KOORDINATOR KEAMANAN DAERAH  
DJAWA - TENGAH  
Ketua

(MOCH. B A C H R U N)\*

Kolonel Inf. Nrp. 10828

---

\* Sumber: Sedjarah Militer Kodam VII Diponegoro, Semarang.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SATUAN PELAJARAN

MATA PELAJARAN	: S E J A R A H
POKOK BAHASAN	: PERGOLAKAN DI DAERAH JAWA TENGAH
SUB POKOK BAHASAN	: GERAKAN MERAPI MERBABU COMPLEX
K E L A S	: III (Program A1, A2, A3)
SEMESTER	: 6 (Enam)
W A K T U	: 4 X 45 menit

---

### Tujuan Instruksional Umum

Siswa memahami pentingnya perjuangan menegakkan keutuhan kedaulatan dan persatuan negara Indonesia melalui pengamatan dan pemaahaman.

### Tujuan Instruksional Khusus

#### Pertemuan I

- Siswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya Gerakan Merapi Merbabu Complex di Jawa Tengah.
- Siswa dapat menyebutkan daerah-daerah yang menjadi lokasi Gerakan Merapi Merbabu Complex.
- Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri umum daerah yang menjadi lokasi Gerakan Merapi Merbabu Complex.

#### Pertemuan II

- Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pemimpin Gerakan Masa Kelompok Jago.
- Siswa dapat menyebutkan daerah operasi dari Gerakan Merapi Merbabu Complex Masa Kelompok Jago.
- Siswa dapat menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Gerakan Merapi Merbabu Complex

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Masa Kelompok Jago.

- Siswa dapat menyebutkan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menumpas Gerakan Merapi Merbabu Complex Masa Kelompok Jago.

### Pertemuan III

- Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam Gerakan Merapi Merbabu Complex Masa Kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR).
- Siswa dapat menyebutkan daerah operasi dari Gerakan Merapi Merbabu Complex Masa Kelompok PKR.
- Siswa dapat menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Merapi Merbabu Masa Kelompok PKR.
- Siswa dapat menyebutkan sebab-sebab berakhirnya Gerakan Merapi-Merbabu Complex Masa Kelompok PKR.

### Pertemuan IV

- Siswa dapat membandingkan Gerakan Merapi Merbabu Complex antara Masa Kelompok Jago dengan Kelompok PKR.
- Siswa dapat menjelaskan akibat dari adanya Gerakan Merapi Merbabu Complex pada kehidupan sosial masyarakat di sekitar lokasi gunung Merapi Merbabu.
- Siswa dapat menjelaskan akibat di bidang politik dari adanya Gerakan Merapi Merbabu Complex.

### **Materi Pelajaran**

1. Latar belakang munculnya Gerakan Merapi Merbabu Complex meliputi :
  - a. Sosial ekonomi.

masalah kemiskinan yang berlangsung dari jaman penjajahan dan pemilikan atas bekas tanah perkebunan atau onderneming yang diperebutkan antara petani dan pemerintah setelah perjanjian KMB, telah menanamkan kebencian rakyat terhadap pemerintah.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### b. Keadaan Politik Indonesia tahun 1945-1949.

Pertentangan dari partai-partai politik yang berkembang dengan mendapatkan dukungan suatu kekuatan bersenjata merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat dari politik liberal yang diterapkan di Indonesia. Ketidakstabilan pemerintahan di Indonesia mendorong semakin bertambahnya kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.

### c. Keadaan Organisasi Militer masa Rasionalisasi.

Salah satu program pemerintah yang mendorong semakin kekecewaan rakyat adalah program Rasionalisasi dalam tubuh Angkatan Perang tahun 1948 dan 1950. Dalam rasionalisasi ini banyak rakyat yang kehilangan pekerjaannya dan banyak pula yang merasa dikecewakan, mengingat ternyata pemerintah mengambil bekas tentara Belanda sebagai tentara dalam APRIS.

### d. Infiltrasi Komunis.

Keadaan masyarakat yang tengah diliputi kekecewaan terhadap pemerintah memudahkan masuknya pengaruh Komunis dalam masyarakat. Hal ini semakin jelas terlihat dengan datangnya bekas pelaku pemberontakan PKI Madiun.

2. Daerah Gerakan MMC di Jawa Tengah meliputi daerah : Boyolali, Klaten, Magelang, Kabupaten Semarang, Salatiga dan Surakarta. Sedangkan daerah basis gerakan biasanya mengambil tempat di daerah pegunungan dengan kondisi tempat yang berhutan lebat, banyak guanya, berjurang yang curam serta jauh dari pengawasan aparat negara.

3. Gerakan MMC tahap Kelompok Jago.

a tokoh yang berperanan adalah Suradi Bledog, Darmo Pendot, Kampret dan lain sebagainya.

b daerah operasi Kelompok Jago ini di sekitar gunung Merapi, yaitu daerah Boyolali dan Klaten dalam perkembangannya mereka bergeser ke arah

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

utara, yaitu daerah gunung Merbabu.

c Tindakan yang dilakukan adalah :

i. Mengadakan teror kepada masyarakat berupa

- perampokan
- pembunuhan
- mengadakan intimidasi terhadap rakyat

ii. Mengadakan perlawanan terhadap pemerintah melalui aksi-aksi :

- pendaulatan suatu wilayah
- penghadangan terhadap patroli keamanan
- menyerbu kantor-kantor polisi

d Akhir kelompok Jago ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan operasi militer, yaitu Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Let. Kol. Suadi.

Akibat dari adanya operasi tersebut, banyak tokoh dari Kelompok Jago yang terbunuh.

4. Setelah kelompok jago dapat ditumpas, di daerah Semarang-Salatiga muncul lagi suatu gerakan pengacau keamanan yang menamakan dirinya Gerakan MMC Kelompok Persatuan Korban Rasionalisasi.

a. Tokoh yang berperanan dalam kelompok ini adalah : Umar Yunani, Sastro Sadjad, Sujud Kridosardjono, Multayat dan lain-lain.

b. Kelompok ini mengambil wilayah operasi di daerah Semarang - Salatiga dan sekitarnya (Ambarawa, Banyubiru, Somowono, Tuntang, Jetis dan lain-lain).

c. Sama dengan kelompok Jago, Kelompok PKR dalam aksinya selalu mengadakan :

i. Teror kepada penduduk dengan mengadakan :

- pembunuhan terhadap penduduk yang melawan
- perampokan harta benda penduduk
- penculikan

ii. Perlawanan terhadap aparat pemerintah dengan melakukan :

- pencegahan patroli
- menyerbu kantor-kantor polisi dan pemerintah

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- mengadakan pembunuhan terhadap aparat pemerintah

- iii. mengadakan agitasi dan intimidasi untuk mendukung kelompok komunis dalam PEMILU tahun 1955

d. Kelompok ini akhirnya mengalami kehancuran setelah Pemerintah daerah dan Militer mengaambil kebijaksanaan untuk melawan mereka dengan mengadakan operasi yang disebut Operaasi Tri Tunggal dengan operasi tersebut PKR akhirnya mengalami kemunduran.

Faktor yang mendorong melemahnya Kelompok PKR adalah :

- Perpecahan dalam tubuh PKR sendiri
- Operasi militer yang dilakukan oleh Divisi Diponegoro dengan menggunakan tehnik Benteng Steelsel
- Tindakan pemerintah daerah yang mengadakan penyuluhan dan bantuan pada masyarakat
- Keberanian masyarakat dalam melawan gerombolan

5. Adanya Gerakan MMC yang melakukan tindakan pengacauan ini ternyata membawa akibat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Merapi-Merbabu.

Akibat itu adalah :

a. Bidang Ekonomi

Gerakan ini berhasil memporakporandakan kehidupan rakyat sehingga mengakibatkan :

- muncul kemiskinan
- ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah
- memunculkan kecemburuan ekonomi yang memungkinkan untuk mudah diagitasi

b. Bidang Politik

keadaan kacau memudahkan berkembangnya pengaruh komunis yang terbukti dengan berhasilnya pengaruh komunis mendominasi daerah ini dalam Pemilu 1955.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Kegiatan Belajar Mengajar

Dalam kegiatan belajar mengajar mengingat materi yang disampaikan merupakan materi baru, maka kegiatan yang dominan dalam proses ini adalah metode ceramah. Sedangkan kegiatan siswa adalah dengan mengadakan pengamatan dari apa yang diterangkan pendidik.

## Sumber dan Media Pelajaran

### 1. Sumber Pelajaran

Pendidik memberikan salinan atau foto copy artikel tentang Gerakan MMC di Jawa Tengah.

### 2. Media Pelajaran

- peta sejarah tentang daerah operasi Gerakan MMC
- peta daerah Jawa Tengah

## Evaluasi

1. Sebutkan latar belakang munculnya Gerakan MMC di Jawa Tengah pada tahun 1950-an !
2. Jelaskan secara singkat mengapa Gerakan MMC cenderung menggunakan daerah pegunungan sebagai basis gerakannya !
3. Sebutkan tokoh-tokoh utama dalam Kelompok Jago !
4. a. Apa tindakan pemerintah dengan adanya Gerakan MMC yang menyebarkan ketakutan di dalam masyarakat ?  
b. Siapakah yang diberi tugas untuk memadamkan gerakan kelompok Jago itu ?  
c. Apa hasilnya ?
5. Sebutkan 4 saja tokoh utama dalam kelompok PKR !
6. Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh Gerakan MMC secara umum baik oleh Kelompok Jago maupun Kelompok PKR ! Beri pula contohnya !
7. Jelaskan secara singkat wilayah operasional dari kelompok PKR pada tahun 1952 - 1955 !



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong semakin melemahnya Kelompok PKR !
9. Jelaskan secara singkat apa akibat yang ditimbulkan dengan adanya Gerakan MMC di Jaawa Tengah ini !

